

Penyunting:
Rusydi Syahra, Ph.D.



Isu Perdagangan dan Industri sebagai Kebijakan Strategis Daerah dalam Menghadapi Globalisasi dan Liberalisasi



Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

**ISU PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH
DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI
DAN LIBERALISASI**



**Penyunting:
Rusydi Syahra, Ph.D**

**Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2011**

Judul:
Isu Perdagangan dan Industri
Sebagai Kebijakan Strategis Daerah
dalam Menghadapi Globalisasi dan Liberalisasi

Penyunting:
Rusydi Syahra, Ph.D

Perancang Sampul:
Aiq Banindiya Afad

Perancang Tata Letak:
Sony Sifa tita

Cetakan Pertama, 2011

Penerbit:
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

ISBN: 978-602-8722-22-3

Alamat Penerbit:
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyurikan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Dengan semakin terbukanya perekonomian Indonesia dan adanya berbagai kesepakatan antar negara dalam era globalisasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan daerah. Dalam lingkup globalisasi ekonomi dimana perekonomian dan seluruh aspek didalamnya meluas melampaui batas-batas antar negara. Globalisasi ekonomi termasuk perdagangan dan jasa saat ini, khususnya di Indonesia bisa dikatakan belum berdampak positif seperti yang diharapkan bagi perekonomian secara keseluruhan. Fakta umum mengindikasikan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi tantangan tersebut dan banyak daerah-daerah yang notabene merupakan kawasan yang sangat terbuka, masih banyak hidup di dalam kemiskinan serta pengangguran akibat ketimpangan perekonomian, serta fakta-fakta lainnya. Untuk membahas masalah-masalah tersebut ada kajian dan beberapa hasil penelitian yang dapat menggambarkan kondisi dihadapi dalam era globalisasi dibahas dalam beberapa bagian buku dengan tema utama "Isu Perdagangan Dan Industri Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Dan Liberalisasi "

Bagian pertama buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. Mandala Harefa yang mengambil topik tentang "Disparitas Ekonomi Antar Wilayah dan Kebijakan Pengembangan Pusat Pertumbuhan" Topik ini tentunya merupakan isu strategis mengingat berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah ternyata tidak sepenuhnya berdampak positif bagi daerah yang minim potensi SDA nya. Tujuan dari pembangunan ekonomi merupakan upaya negara agar berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Kebijakan dan Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

yang pada era globalisasi telah bergeser pada sektor Industri dan perdagangan. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Selama ini, strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan Indonesia telah berhasil mengubah struktur ekonominya, dari struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur terlebih semakin terbukanya perekonomian melalui investasi asing. Seiring dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Namun demikian perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia pada masa itu terjadi pada level nasional; sedangkan pada level daerah setelah otonomi, tidak semua daerah memperoleh manfaat dari strategi tersebut terjadi disparitas, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Bahkan strategi yang diterapkan tersebut, secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya, antar provinsi dan antar kabupaten.

Masalah klasik dan mendasar terjadinya ketimpangan ekonomi tersebut potensi ekonomi yang tidak sama. Ada beberapa wilayah atau provinsi yang memiliki berbagai sumber daya alam berlimpah, tidak akan mengalami permasalahan dalam membangun kegiatan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan, Namun, tidak dapat dipungkiri, masih banyak wilayah selain tidak memiliki SDA, dan kondisi lahannya banyak kering. Namun demikian, adanya wilayah yang tidak didukung kondisi alam yang memadai untuk kegiatan pertanian, namun memiliki posisi strategis dan memperoleh bantuan secara maksimal dari pemerintah pusat untuk dibentuk sebuah kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*).

Tulisan Sdr. Asep Ahmad Saefuloh akan mengisi bagian *kedua* buku kajian ini. Tulisannya akan membahas isu. **Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Sektor Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali**. Masalah ini merupakan salah satu isu yang sangat strategis yang keterkaitannya sangat erat bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan. Saat ini dunia sedang berada pada era globalisasi, dimana perdagangan antar negara bergerak ke arah perdagangan bebas. Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tidak bisa menghindari dari kenyataan tersebut. Terutama sekali, tantangan pasar bebas semakin nyata setelah tanggal 1 Januari 2010 perdagangan bebas ASEAN

-China Free Trade Area atau ACFTA dinyatakan mulai berlaku. Konsekuensi dari keberadaan ACFTA adalah produk China akan semakin membanjiri pasar domestik dengan harga kompetitif. China dapat menghasilkan produk kompetitif dikarenakan produktivitas pekerjaannya sangat tinggi. Sementara bagi Indonesia, sesuai dengan catatan ILO, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di peringkat 59 dunia jauh di bawah produktivitasnya masih rendah dibandingkan negara-negara pesaing. Sebagai suatu perbandingan, Korea berada pada peringkat 29, dan China peringkat 31.

Salah satu persoalan yang menjadi kendala sektor industri yang menurunkan daya saing adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini terkait dengan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, disamping kendala lain seperti ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor dan mesin-mesin produksi yang sudah tua. Penjelasan diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dimana untuk menjaga daya saing kedepan, diperlukan perbaikan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah logistik dan penyediaan energi listrik dan gas, serta penciptaan iklim investasi dengan mempersiapkan SDM yang produktif, serta menekan biaya yang tidak kompetitif, dan menyelesaikan regulasi ketenagakerjaan.

Sejalan dengan adanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 ada 2 (dua) prioritas RUU bidang ekonomi yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan perekonomian yaitu sektor industri dan sektor perdagangan. *Pertama*, DPR-RI telah menetapkan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. *Kedua*, adanya RUU tentang Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah.

Hal ini tentunya harus direspon oleh DPR RI melalui regulasi dalam rangka meminimalisir dampak dari liberalisasi perdagangan dunia dalam konteks globalisasi pasar. Terlebih sektor perdagangan pada saat ini dan masa depan dihadapkan pada tantangan menuju liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang efisien dan efektif, sehingga dapat menggerakkan ekonomi nasional dan perekonomian daerah/lokal. Begitu juga momentum ini dapat digunakan untuk melakukan pembenahan SDM di bidang perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan SDM di sektor industri dan perdagangan perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap SDM di sektor industri dan perdagangan tersebut. Untuk keperluan studi maka dilakukan studi dengan mengambil Provinsi Bali sebagai suatu

studi kasus. Pemilihan Bali ini dikarenakan Bali memiliki faktor kekhasan (*endowment*) yang diharapkan akan menjadi nilai positif dalam menghadapi persaingan kedepan

Bagian ketiga buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. **Ahmad Sani Alhusain** yang mengambil topik tentang **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memperkuat Perdagangan Luar Negeri Pasca Pemberlakuan Asean-China Free Trade Area (ACFTA)** yang mengambil Studi di Provinsi Bali. Isu ini merupakan telah mengemuka sejak awal tahun, mengingat tantangan era pasar bebas semakin nyata setelah tanggal 1 Januari 2010 perdagangan bebas (*Free Trade Area*) ASEAN-China atau ACFTA dinyatakan mulai berlaku. Adanya kebijakan perdagangan bebas ini cenderung dapat mengancam eksistensi industri dan perdagangan dalam negeri. Hal ini ditandai dengan semakin membanjirnya produk China dengan harga yang semakin murah. Tentu saja harga yang semakin murah tersebut menjadikan produk China semakin digemari oleh konsumen dalam negeri.

Kebijakan ACFTA sendiri melibatkan enam negara di kawasan ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya di tahun 2015, negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

Pemberlakuan ACFTA tersebut mendapat tanggapan dari banyak pihak, terutama dari pelaku usaha. Tanggapan dari pelaku usaha, seperti yang disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI menilai bahwa kebijakan ACFTA sangat riskan karena ketidakseriusan dalam persiapannya dan lebih lanjut dijelaskan bahwa ACFTA akan mengancam sejumlah kawasan industri. Padahal China sendiri sudah mempersiapkan sejak 8 sampai 10 tahun lalu, sedangkan Indonesia cuma dalam hitungan bulan.

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian pengusaha-pengusaha di daerah untuk bersaing dengan produk luar khususnya dari China. Disamping itu, untuk meningkatkan daya saing produk lokal dalam era perdagangan bebas ini, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerahpun dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat memberi dukungan bagi pengusaha daerahnya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing produk perdagangannya.

Bagian *keempat* buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. **Suhartono** yang mengambil topik tentang **Peran Pemerintah dalam Mengelola Perdagangan: Studi di Provinsi Bali**. Isu yang mengambil studi daerah Provinsi Bali, dengan

potensi pariwisatanya, telah berkembang menjadi pusat perdagangan produk Indonesia kepada pembeli dari mancanegara. Selain itu, perkembangan pariwisata yang melibatkan industri pariwisata internasional dan banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk impor sesuai kebutuhan industri pariwisata dan wisatawannya. Posisi ini memberikan tempat yang strategis dari Bali dalam konteks perdagangan bebas. Perkembangan perdagangan yang pesat tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi peran pemerintah dalam mengelola daerahnya. Bali bukan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas, tetapi arus perdagangan barang dan jasa memiliki kemiripan dengan kawasan FTZ. Dalam hal ini bagaimana pemerintah Bali mengelola wilayahnya dalam konteks perdagangan bebas menjadi studi yang menarik dalam memproyeksikan lebih jauh peran pemerintah dalam mengelola perdagangan.

Pada bagian kelima, buku kajian ini akan ditulis oleh Sdr. Juli Panglima Saragih yang akan membahas isu tentang "Analisis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Dan Implikasinya Terhadap Ekspor-Impor Provinsi Kepulauan Riau". Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan dan merupakan isu yang sangat strategis bagi daerah, terutama provinsi kepri, sektor perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian saat ini. Sektor perdagangan berkaitan erat dengan aspek kebijakan/peraturan perundang-undangan, tidak hanya kebijakan pemerintah pusat tetapi juga kebijakan pemerintah daerah. Aspek lainnya adalah aspek kelembagaan dan aspek politik luar negeri. Aspek kebijakan dalam perdagangan luar negeri (ekspor-impor) sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Tuntutan liberalisasi pasar sudah semakin nyata. Artinya setiap negara harus membuka pasar domestiknya terhadap produk-produk dari luar negeri. Setiap negara juga semakin terbuka terhadap berbagai informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan pasar. Oleh karena kegiatan perdagangan luar negeri adalah kegiatan ekonomi, maka pasar pun harus semakin terbuka dan sedikit mungkin timbul hambatan dalam perdagangan luar negeri.

Sebelum globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia muncul, banyak negara yang masih menerapkan suatu kebijakan atau peraturan perdagangan luar negerinya seperti membatasi impor dengan sistem kuota. Ada negara yang menerapkan tarif impor yang cukup tinggi terhadap suatu jenis barang tertentu.

Negara lain menerapkan kebijakan non-tarif di bidang perdagangan luar negeri yakni dengan melokalisasi pasar.

Dalam kerangka liberalisasi perdagangan dunia, setiap negara kini cenderung melakukan kerja sama perdagangan secara bilateral (perjanjian kerja sama perdagangan bebas secara bilateral atau *free trade agreement*). Sektor perdagangan tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah pusat semata, tetapi juga partisipasi atau peran aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Kepentingan pemerintah daerah semakin meningkat khususnya di era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dalam konteks ekspor-impor yang dilakukan oleh daerah. Artinya daerah ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan nilai kontribusi perdagangan luar negeri terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, serta ekonomi daerah.

Dalam kaitan ini pemerintah pusat dan daerah harus dapat membuat kebijakan perdagangan luar negeri yang benar-benar mendukung sektor perdagangan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang juga berkepentingan terhadap perdagangan luar negeri, khususnya ekspor-impor. Kecenderungan globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian daerah, termasuk perekonomian di daerah Kepulauan Riau. Daerah Kepulauan Riau sampai saat ini juga melakukan kegiatan perdagangan luar negeri, di samping kegiatan industri dan investasi asing. Hal ini juga didukung dengan penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Perkembangan Kepulauan Riau, khususnya Batam tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan, khususnya ekspor dan impor.

Masalah globalisasi perekonomian merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia termasuk wilayah dan daerah harus siapa. Dengan perkembangan yang terakhir telah tampak indikasi bahwa para pelaku ekonomi pada sektor industri diberbagai wilayah mulai mengeluh. Untuk itu DPR dan Pemerintah seharusnya telah menyusun strategi dalam menghadapi berbagai implikasi darai kondisi tersebut dimana akan semakin tingginya ketimpangan ekaonomi anatr wilayah dan tergerusnya sektor-sektor industri akibat tidak mampu bersaing dalam era globalisasi.

Jakarta, September 2011

Penyuting,
Rusydi Syahra, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN 1	
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH	1
<i>Oleh: Mandala Harefa</i>	
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II KONSEP DAN INDIKATOR KETIMPANGAN EKONOMI	9
BAB III STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA	19
BAB IV PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	37
BAGIAN 2	
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI	39
<i>Oleh: Asep Ahmad Saefuloh</i>	
BAB I PENDAHULUAN	41
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	47
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN	49
BAB IV PEMBAHASAN	53
BAB V PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAGIAN 3

PERDAGANGAN BEBAS DAN PARIWISATA: PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI PROVINSI BALI 75

Oleh: Suhartono

BAB I PENDAHULUAN 77

BAB II HUBUNGAN ANTARA PARIWISATA DAN PERDAGANGAN 85

BAB III PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 89

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA 93

BAB V TANTANGAN ACFTA TERHADAP PERDAGANGAN BALI... 101

BAB VI PENUTUP 105

DAFTAR PUSTAKA 107

BAGIAN 4

PERKEMBANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR PROVINSI BALI MENGHADAPI

PERSAINGAN GLOBAL 109

Oleh: Achmad Sani Alhusain

BAB I PENDAHULUAN 111

BAB II PARTISIPASI DALAM PERDAGANGAN GLOBAL: IMPLIKASI, MANFAAT DAN KEBIJAKAN 115

BAB III PERKEMBANGAN PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI BALI 119

BAB IV KENDALA PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI BALI 129

BAB V KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR 133

BAB VI PENUTUP 137

DAFTAR PUSTAKA 139

BAGIAN 5

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI

DAN GLOBALISASI PERDAGANGAN 141

Oleh: Juli Panglima Saragih

BAB I PENDAHULUAN 143

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN 149

BAB III PEMBAHASAN 153

BAB IV PENUTUP 163

DAFTAR PUSTAKA 165

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 167





BAGIAN 1

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH

*Mandala Harefa**

* Penulis adalah Periset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

BAGIAN 5

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI

DAN GLOBALISASI PERDAGANGAN 141

Oleh: Juli Panglima Saragih

BAB I PENDAHULUAN 143

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN 149

BAB III PEMBAHASAN 153

BAB IV PENUTUP 163

DAFTAR PUSTAKA 165

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 167





BAGIAN 1

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH

*Mandala Harefa**

* Penulis adalah Periset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

BAGIAN 5

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI

DAN GLOBALISASI PERDAGANGAN 141

Oleh: Juli Panglima Saragih

BAB I PENDAHULUAN 143

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN 149

BAB III PEMBAHASAN 153

BAB IV PENUTUP 163

DAFTAR PUSTAKA 165

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 167





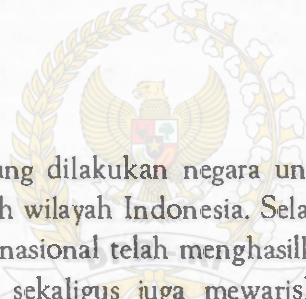
BAGIAN 1

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KESENJANGAN EKONOMI ANTAR WILAYAH

*Mandala Harefa**

* Penulis adalah Periset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI

BABI PENDAHULUAN



Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Selama ini strategi pembangunan yang diterapkan Indonesia telah berhasil mengubah struktur ekonomi, dari struktur yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Seiring dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencapai tingkat yang cukup tinggi. Namun demikian perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia pada masa lalu hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah tidak semua daerah memperoleh manfaat dari strategi tersebut. Sebab telah terjadi disparitas, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Bahkan strategi yang diterapkan tersebut secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya, antar provinsi dan antar kabupaten.

Masalah klasik dan mendasar terjadinya ketimpangan ekonomi tersebut potensi ekonomi yang tidak sama. Ada beberapa wilayah atau provinsi yang memiliki berbagai sumber daya alam berlimpah, tidak akan mengalami

permasalahan dalam membangun kegiatan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan, Namun, tidak dapat dipungkiri, masih banyak wilayah selain tidak memiliki SDA, dan kondisi lahannya banyak kering. Namun demikian, adanya wilayah yang tidak didukung kondisi alam yang memadai untuk kegiatan pertanian, namun memiliki posisi strategis dan memperoleh bantuan secara maksimal dari pemerintah pusat untuk dibentuk sebuah kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*).

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah terus menerus terjadi antara pedesaan dan perkotaan, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan *hinterland* dan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 adalah masih terdapatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2008 menunjukkan bahwa kemiskinan antarpulau terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yaitu sebanyak 20,2 juta jiwa dan berikutnya di Pulau Sumatera sebanyak 7,3 juta jiwa. Namun, secara persentase, angka kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan angka yang paling kecil, yaitu hanya sekitar 4,3%, sedangkan angka persentase kemiskinan di Papua mencapai persentase terbesar, yaitu 37,1%. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antar wilayah.

Pada tahun 2006 penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,8.¹ tahun (tertinggi), sedangkan penduduk di Nusa Tenggara Timur rata-rata hanya bersekolah selama 6,4 tahun (terendah). Berdasarkan statistik potensi desa pada tahun 2006, terdapat desa-desa di empat wilayah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, yaitu: Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua. Sementara itu, Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sulawesi, cukup dapat mengakses fasilitas kesehatan baik rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, dan puskesmas.

Data BPS tahun 2007 menunjukkan bahwa dominasi provinsi di Jawa dan Bali sebagai pusat perekonomian menguasai sekitar 60,20% dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera menguasai sekitar 22,98%, provinsi di Kalimantan menguasai 9,13%, Sulawesi menguasai 4,09%, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 3,61 %. Sementara itu, laju pertumbuhan

1 Bab 26 Pengukuran Ketimpangan Pembangunan Wilayah. <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8426/>

ekonomi provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2007 sebesar 6,17%, provinsi di Sumatera sebesar 4,96%, provinsi di Kalimantan 3,14%, provinsi di Sulawesi sebesar 6,88%, provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 5,04%. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah.

Sedangkan pada tahun 2006 data BPS mengenai penguasaan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) seluruh provinsi dan laju pertumbuhan PDRB antar provinsi menunjukkan bahwa provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 65,49% dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera menguasai sekitar 19,82%, provinsi di Kalimantan menguasai 6,35%, Sulawesi menguasai 4,51 %, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 3,81%. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2006 sebesar 5,75%, provinsi di Sumatera sebesar 5,33%, provinsi di Kalimantan 3,75%, provinsi di Sulawesi sebesar 6,95%, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 4,22%. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak merata akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah.

Indikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa kemiskinan antar pulau terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebanyak 20,71 juta jiwa dan di Pulau Sumatera sebanyak 7,88 juta jiwa. Namun, secara persentase, angka kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan angka yang paling kecil yaitu hanya sekitar 3,2 %, sedangkan di Papua mencapai persentase terbesar yaitu sekitar 38,7%. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antar wilayah, yaitu pada tahun 2005 penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,6 tahun (tertinggi), sedangkan penduduk di Sulawesi Barat rata-rata hanya bersekolah selama 6 tahun (terendah). Hanya 3 provinsi saja, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali yang desanya tidak ada kesulitan menjangkau prasarana kesehatan seperti puskesmas pembantu, tetapi di provinsi Papua Barat masih terdapat 35,3% desa yang mengalami kesulitan dalam menjangkau prasarana kesehatan.

Data BPS tahun 2006 mengenai penguasaan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) seluruh provinsi dan laju pertumbuhan PDRB antar provinsi menunjukkan bahwa provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 65,49% dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera menguasai sekitar

19,82%, provinsi di Kalimantan menguasai 6,35%, Sulawesi menguasai 4,51%, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 3,81%. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2006 sebesar 5,75%, provinsi di Sumatera sebesar 5,33%, provinsi di Kalimantan 3,75%, provinsi di Sulawesi sebesar 6,95%, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 4,22%. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antar wilayah.

Dengan kondisi perekonomian seperti itu, tidak dapat dihindari kenyataan bahwa pemerintah mengalami berbagai permasalahan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah atau daerah di Indonesia. Target pengentasan kemiskinan 50 kabupaten tertinggal sekarang ini rupanya diilhami oleh keberhasilan pengentasan kabupaten tertinggal pada RPJM periode 2005–2009 yang lalu. Selama kurun 2005–2009 telah dicapai pengentasan 50 kabupaten tertinggal, tetapi pada waktu yang sama muncul 34 kabupaten tertinggal baru akibat pemekaran wilayah. Sehingga jumlah kabupaten tertinggal yang tadinya sebanyak 199 turun menjadi 183 kabupaten. Dengan target KPDT untuk mengentaskan lagi 50 kabupaten tertinggal selama RPJM 2010–2014, maka pada akhir 2014 jumlah kabupaten tertinggal akan turun lagi menjadi 133 kabupaten. Dengan asumsi tidak terjadi tambahan kabupaten tertinggal baru, maka setelah tahun 2014 diperlukan 3 kali RPJM lagi agar Indonesia terbebas dari kabupaten tertinggal. Artinya pada tahun 2030 di Indonesia tidak ada lagi kabupaten tertinggal².

Permasalahan³ yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

2 Socia Prihawantoro Peneliti BPPT. "Paradigma Inovasi Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal" [http://inspirasiablog.wordpress.com/16 Juli 2010](http://inspirasiablog.wordpress.com/16%20Juli%202010)

3 *Ibid*, hal 1dan2

Kondisi tersebut berdampak terhadap perbedaan dari distribusi pendapatan antar daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain. Dilakukannya satu kebijakan pemerintah yaitu otonomi daerah masih belum mampu memperkecil adanya ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah.

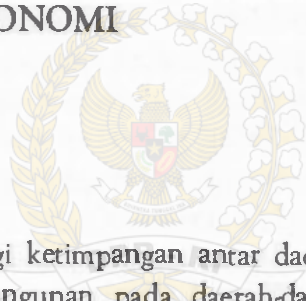
Selain itu wilayah yang berada dipetbatasan, termasuk pulau-pulau kecil tetluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Dengan posisi tersebut permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'* sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah petbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Dengan kondisi seperti diuraikan di atas maka disparitas atau kesenjangan ekonomi antar-daerah masih menjadi masalah utama penerapan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi mengingat masih lebarnya gap kesejahteraan antar-daerah, terutama wilayah Barat dan Timur Indonesia. Padahal salah satu tujuan utama kebijakan tersebut adalah setiap daerah atau wilayah otonomi dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya.

Bab ini difokuskan untuk membahas struktur perekonomian dan ketimpangan antar wilayah di indonesia, tetapi sebelumnya terlebih dahulu akan dipaparkan konsep dan indikator ketimpangan ekonomi serta kesenjangan antar wilayah pada umumnya.

BAB II

KONSEP DAN INDIKATOR KETIMPANGANEKONOMI



A. Ketimpangan Antar Wilayah

Salah satu upaya negara untuk mengurangi ketimpangan antar daerah/wilayah tentunya melalui pemerataan pembangunan pada daerah-daerah. Pembangunan regional merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan akan dapat terdistribusi dan teralokasi ke tingkat regional. Dalam mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah, terutama dalam pembangunan ekonominya, dibutuhkan beberapa kebijakan dan program pembangunan daerah yang mengacu pada kebijakan regionalisasi atau perwilayahan.

Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat, 2001:13)⁴. Hal senada disampaikan oleh Todaro (1994:15)⁵ bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan.

Masalah ketimpangan dan kemiskinan, telah dibahas dalam banyak tulisan mengenai hubungan antara penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, yang dalam beberapa tahun terakhir ini memunculkan istilah “pertumbuhan yang berpihak pada kaum miskin” dan *pro-poor budget*.

4 Gunawan Sumodiningrat, *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi – Studi Empiris Pada Kebijakan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PerPod, 2001, hal 13

5 Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga. 1994, hal 15

Ketimpangan memainkan peran yang besar dalam hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan karena ketimpangan mempengaruhi baik pertumbuhan maupun kemiskinan.

Ravallion (1997)⁶ mengemukakan bahwa terdapat dua cara di mana ketimpangan dapat mempengaruhi kemiskinan. Cara pertama adalah melalui hubungan ketimpangan dan pertumbuhan dan hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Tingginya ketimpangan awal menghalangi pertumbuhan, yang pada gilirannya mengurangi tingkat penanggulangan kemiskinan. Cara kedua adalah argumen elastisitas-pertumbuhan. Argumen ini menyatakan bahwa dalam proses pertumbuhan bila semua tingkat pendapatan secara umum meningkat dengan tingkat yang sama, maka ketimpangan yang lebih besar akan membuat kaum miskin hanya dapat mengenyam proporsi hasil pembangunan yang lebih sedikit. Hal ini berarti bahwa masyarakat miskin akan terus mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari pendapatan total dan dari hasil peningkatannya melalui pertumbuhan, yang juga berarti semakin rendahnya tingkat penurunan kemiskinan. Namun, ini juga berarti bahwa masyarakat miskin secara proporsional tidak akan banyak menerima dampak dari suatu keadaan kontraksi ekonomi.

Dalam upaya merumuskan hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan, salah satu kajian yang baru-baru ini dilakukan (Bourguignon, 2004)⁷ menyebutkan bahwa perubahan distribusi (yaitu perubahan pada ketimpangan) mempunyai dampak yang besar pada kemiskinan. Kajian ini juga menyatakan bahwa penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan distribusi secara bersamaan dan bahwa hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan sangat berbeda antarnegara.

Selain kajian Bourguignon, studi lainnya menyebutkan aspek lain dari hubungan antara kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan (McCulloch et al., 2000)⁸. Disebutkan bahwa perubahan kemiskinan merupakan penjumlahan dari tiga komponen: komposisi pertumbuhan dengan ketimpangan konstan, komponen ketimpangan dengan pertumbuhan konstan, dan residual. Ini berarti ketimpangan adalah aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan

6 Ravallion, M. "Can High-inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty?" *Economics Letters*, 56, hal. 51-57, 1997

7 Bourguignon, F. "The Poverty-Growth-Inequality Triangle." Makalah dipresentasikan untuk Dewan Penelitian Hubungan Ekonomi Internasional India, New Delhi, 4 Februari, 2004.

8 McCulloch, N., B. Baulch, M. Cherel-Robson. "Poverty, Inequality, and Growth in Zambia during the 1990s." Makalah untuk Konferensi Umum ke 26 Asosiasi Internasional untuk Penelitian tentang Pendapatan dan Kekayaan. Krakow, Polandia, 2000.

dan, oleh karena itu, harus diberikan perhatian yang lebih banyak dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu model pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan aspek tata ruang adalah konsep pusat-pusat pertumbuhan. Konsep pusat-pusat pertumbuhan ini menekankan pada fakta bahwa pembangunan tidak terjadi dimana-mana secara serentak, tetapi di tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dan pada akhirnya akan menyebar melalui berbagai saluran dan mempunyai akibat akhir yang berlainan pada perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan otonomidaerah melalui pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dan fiskal merupakan salah satu upaya yang tepat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, walupun diakui bahwa ada perbedaan-perbedaan potensi antara daerah yang disebabkan oleh sumber daya alam, terbatasnya sarana dan prasarana, perbedaan kesuburan tanah maupun perbedaan kondisi daerah secara geografis. Hal ini tentunya akan mengakibatkan perbedaan dalam tingkat kemakmuran masyarakat pada wilayah tersebut. Karena itu sangat dibutuhkan metode yang tepat untuk pengembangan kota-kota dan wilayah agar tercapai pemerataan pembangunan dalam rangka pengurangan kemiskinan pada wilayah tertentu.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005: 108) ⁹.

Todaro (1994:15) mendefenisikan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidakmerataan dan pengangguran dalam kerangka pembangunan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, Todaro melihat bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan.

Sementara itu dalam kerangka yang lebih empiris, dua teori besar yang mewarnai pelaksanaan pembangunan di banyak negara berkembang pasca perang dunia II adalah teori Rostow mengenai tahap-tahap pertumbuhan

9 Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (1st ed.). Yogyakarta: BPFE-UGM. Tahun 1999. hal 108

(*stages of growth*) dan teori Harrod-Domar tentang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1994:69)¹⁰. Rostow yang mengajukan lima tahap pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi, memandang bahwa tingkatan kritis bagi negara berkembang adalah tahap tinggal landas, dimana masyarakat suatu negara berkembang akan mengalami transformasi menuju masyarakat yang maju. Selanjutnya Rostow berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dilaksanakan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan luar negeri agar dapat menghasilkan investasi yang cukup bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1994:70)¹¹.

B. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Disparitas pembangunan regional merupakan fenomena universal. Di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, disparitas pembangunan merupakan masalah antar wilayah yang tidak merata. Disparitas ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai setiap bangsa. Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan *hinterland* menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan (*backwash*) yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah di pusat-pusat pembangunan secara masif dan berlebihan.

Profesor Gunnar Myrdal dalam Jhingan (1996:268)¹² berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang.

Myrdal juga menjelaskan bahwa asal ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar nonekonomi. Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Penyebab gejala ini menurut Myrdal ialah peranan bebas kekuatan pasar, yang cenderung

¹⁰ Opcit, Michael P Todaro, Hal 69

¹¹ Ibid.

¹² M.L. Jhingan., *Ekonomi Pembangunan & Perencanaan*. Edisi 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996, hal 268

memperlebar ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Dia berkata "Jika segala sesuatu diserahkan pada kekuatan pasar tanpa dirintangi oleh intervensi kebijakan apapun maka produksi, industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan dan hampir semua kegiatan ekonomi yang cenderung mendatangkan keuntungan pada umumnya akan mengelompok di daerah atau di wilayah tertentu saja dan meninggalkan daerah-daerah lain di negara tersebut tetap terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1996:270)¹³.

Menurut Lay (1993:53)¹⁴ indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana. Jadi berdasarkan pernyataan Lay diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketidakmerataan itu terbagi atas:

- Fisik: Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian.
- Ekonomi: Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing kecamatan.
- Sosial: Jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan.

Menurut Myrdal dalam Jhingan (1996:272)¹⁵, faktor lain yang menjadi penyebab ketimpangan regional di negara miskin adalah kebijaksanaan nasional "lembaga feodal yang kokoh dan lembaga lainnya yang tidak egaliter dan struktur kekuasaan yang membantu si kaya menghisap si miskin". Pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang bersifat adil (*egaliter*) guna memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar.

Dalam konteks pemikiran yang lebih universal proses pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan sesuatu yang dinamis. Suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang akan tetapi dapat juga mengalami kemunduran dalam perkembangannya, setidaknya-tidaknya apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemajuan atau kemunduran perkembangan di satu atau beberapa wilayah dapat mempengaruhi keadaan sistem yang terbentuk di wilayah tersebut. Seandainya suatu proses kemajuan terjadi pada wilayah yang tingkat perkembangannya sudah tinggi sedangkan perkembangan wilayah lainnya relatif masih kurang, maka dalam sistem wilayah tersebut akan terjadi

13 Ibid

14 Cornelis.Lay., *Ketimpangan dan Keterbelakangan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Sosial UGM. 1993, hal 53

15 *Opcit*, Jhingan, hal 272

disparitas perkembangan yang semakin besar. Sebaliknya, jika perkembangan yang tinggi terjadi di wilayah-wilayah yang tingkat perkembangannya masih rendah, maka disparitas perkembangan antar wilayah akan semakin kecil (Nurzaman, 1996:16)¹⁶.

Sehubungan dengan hal tersebut, Williamson menyatakan bahwa disparitas antar wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan. Lebih jauh dikatakannya bahwa secara umum beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah tersebut yaitu (Williamson dalam Friedman dan Alonso (ed), 1979: 166)¹⁷:

1. Migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki keahlian (terdidik) dari daerah-daerah kurang berkembang ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar.
2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain sebagainya), dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian relatif kecil pada umumnya. Disamping itu, terjadi pula pengaliran modal dari daerah miskin menuju daerah yang telah berkembang.
3. Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi di daerah yang telah berkembang - karena adanya kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru telah mendorong perkembangan industri yang lebih pesat di daerah yang lebih maju.
4. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang telah berkembang. Industri di daerah yang kaya telah menjadi sumber dari barang-barang yang diperdagangkan, dan demikian industri yang dikembangkan di daerah miskin akan mengalami banyak kesulitan dalam memperoleh pasarnya. Ketidaksanggupan untuk bersaing dengan industri di daerah yang lebih maju menjadi lebih serius lagi keadaannya sebagai akibat dari buruknya jaringan perangkutan dan prasarana ekonomi lainnya di daerah yang lebih miskin (Sukirno, 1976: 14)¹⁸.

16 Siti Suriah Nurzaman., *Perencanaan Wilayah di Indonesia - Pada Masa Sekitar Krisis*. Bandung: ITB, 2002, hal 16

17 John Friedman, & Weaver, Clyde., *Territory & Function- The Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold. Tahun 1979, hal 166

18 Opcit, hal 14

5. Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (regional market) telah menyebabkan terjadinya rintangan untuk pemencaran dan pelipatgandaan pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L.

Koefisien Gini (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i * (F c_i + F c_{i-1})$$

dimana:

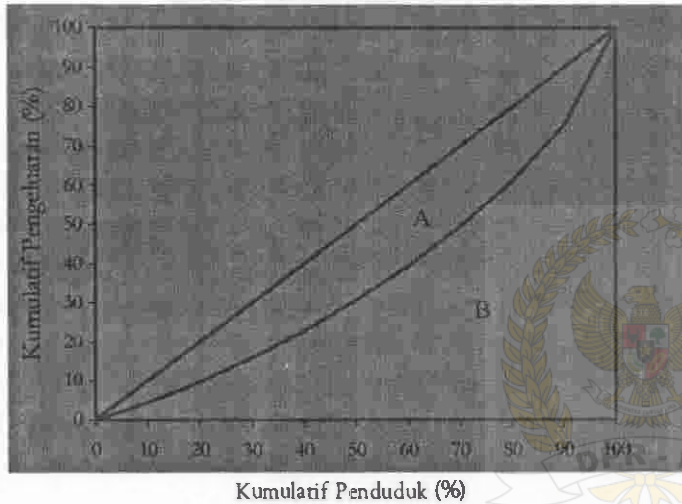
GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

$f p_i$ = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_i$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_{i-1}$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Gambar 2.1
Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5)¹⁹ berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya tingkat kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

¹⁹ Badan Pusat Statistik "Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008" Katalog BPS 3205015, 2008, hal.36

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

1. Dapat didekomposisi: Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).
2. Dapat diuji secara statistik: Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

C. Ukuran Bank Dunia²⁰

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

²⁰ *Ibid*, 37

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi ;
2. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
3. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.



BAB III

STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA

A. Kondisi Perekonomian Indonesia

Secara ringkas²¹ pertumbuhan ekonomi Indonesia bervariasi. Pada kurun waktu 1968-1982, rata-rata pertumbuhannya berkisar 7.65% per tahun. Ketika terjadi *external shocks* (OPEC Oil Price Shock 1979/1980) rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 4.5%. Indonesia pulih kembali di penghujung 1980an. Periode 1989- 1993, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%. Pada 1994-1996 menjadi 7.9% per tahun. Sesaat setelah krisis moneter, pertumbuhan ekonomi Indonesia kolaps hingga -13.1%. Tahun-tahun selanjutnya meski positif, pertumbuhan relatif rendah dibanding sebelum krisis, hanya mencapai 5% selama 2000-2010. Pengalaman ini tentu harus dicari hikmahnya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih tinggi, berkualitas dan mampu membawa kemakmuran rakyat secara merata.

Sedangkan pada Tahun 2011 adalah tahun tantangan bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi global 2010 dan 2011 masih melambat (IMF,2010.) Beberapa lembaga lain memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 dengan berbeda, seperti ADB 6,1% pada 2010 dan 6,3% pada 2011, Bank Dunia (6,0% dan 6,2%), IMF (6,0% dan 6,2%), *Standart Chartered* (6,0% dan 6,2%), Danamon (6,0% dan 6,4%) serta APBN (5,8% dan 6,4%). Secara sektoral, dalam periode 10 tahun terakhir, kontributor terbesar PDB adalah Industri pengolahan hingga akhir 2009 mencapai 26.4%. Proyeksi 2011 diperkirakan 26.6%. Industri pengolahan seperti migas; peralatan transportasi; makanan, rokok, dan pupuk; produksi kimia, tekstil, produk kulit dan alas kaki, yang menggunakan padat modal dan teknologi

21 Lihat DR. Harry Azhar Azis, MA, "Ekonomi Indonesia dan Daerah 2011" Makalah pertemuan KAHMI Padang Pariaman, Sumatera Barat, 11 Maret 2011.

tinggi. Sektor kontributor terkecil adalah listrik, gas, dan air bersih. Sektor pengangkutan dan komunikasi 0.8% dan 6.3% di 2009 diproyeksi sama terjadi di tahun 2011.

Sektor pertanian terus menurun di tahun 2009 (15,3%) dan diperkirakan sama pada 2011. Sektor pertambangan dan penggalian porsinya menurun hingga 10.5% pada 2009. Sumber ini bersifat *unrenewable*. Mengubah struktur sektoral sehingga Indonesia menjadi negara modern memerlukan perhatian serius dari pengambil kebijakan. Secara nasional laju pertumbuhan PDB 2000-2009 cenderung meningkat tapi per sektor perubahannya bervariasi. Selama periode ini pertumbuhan tertinggi terlihat pada sektor transportasi dan komunikasi sebesar 17.1% diikuti listrik, gas dan air 14.7%, jasa 7.4% dan industri konstruksi 6.4%.²²

Kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih bergerak pada sektor pertanian, walaupun demikian masih saja masyarakatnya banyak yang berada dalam kemiskinan. Sektor pertanian pertumbuhannya fluktuatif rata-rata 4%, walau sektor ini menampung lebih 40% tenaga kerja. Sejak krisis moneter 1998, jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian meningkat mencapai hampir 50% tahun 2002. Di Februari 2010, pekerja sektor pertanian 42.83%. Transformasi perekonomian dari sektor primer ke industri dan jasa belum berhasil, karena penyerapan tenaga kerja meningkat di sektor pertanian.

B. Struktur Perekonomian

Strategi yang ditempuh Indonesia pada awal pemerintahan orde baru melalui pengembangan industri manufaktur untuk kebutuhan pasar domestik dan melindungi barang-barang hasil produksi dalam negeri dengan berbagai kebijakan. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengadopsi strategi ini. Strategi industrialisasi substitusi impor (ISI) yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru terpusat pada pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari sebaran industri manufaktur, dimana lebih dari 80% industri manufaktur Indonesia berlokasi di pulau Jawa. Strategi industrialisasi substitusi impor ini diterapkan Indonesia hingga pertengahan dekade 1980. Selama strategi ISI diterapkan Indonesia telah berhasil mengubah struktur ekonominya, dari struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Seiring dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencapai tingkat yang cukup tinggi.

²² *Ibid*

Studi empirik yang berkaitan dengan interaksi ekonomi antar daerah di Indonesia, dilakukan oleh beberapa pihak dengan pembagian wilayah yang berbeda dan kurun waktu yang berbeda, namun menunjukkan fenomena kesenjangan ekonomi antardaerah di Indonesia yang serupa. Wuryanto (1996)²³ menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) membagi wilayah studi menjadi wilayah makro Jawa dan wilayah makro Luar Jawa, dan setiap wilayah makro dibagi lagi menjadi wilayah mikro. Wilayah makro Jawa terdiri atas tiga wilayah mikro, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan wilayah makro Luar Jawa terdiri atas empat wilayah mikro, yakni: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-pulau lainnya. Hadi (2001)²⁴ menggunakan model *Interregional Accounting Matrix* (IRSAM) membagi wilayah studi menjadi Kawasan Barat Indonesia (meliputi Jawa dan Sumatera) dan Kawasan Timur Indonesia. Achjar et al (2003) menggunakan model IRSAM dengan wilayah studi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di Luar Jawa. Sedangkan Alim (2006) menggunakan model IRSAM dengan wilayah studi Jawa dan Sumatera.

Secara umum, hasil studi empirik sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa melebarnya kesenjangan ekonomi antar daerah antara lain bersumber dari hal-hal sebagai berikut:

1. Lebih dari 80% industri manufaktur yang didirikan di Indonesia berlokasi di Jawa, sekitar 12 - 13% di Sumatera, dan sisanya yang kurang dari 10% (antara 7-8%) berada di wilayah lainnya. Kontribusi nilai tambahnya kurang lebih sama dengan persentase sebaran industri tersebut;
2. Daerah-daerah Luar Jawa pada umumnya mengekspor produk-produk primer ke Jawa dan mengimpor produk-produk sekunder dari Jawa, dimana nilai impor daerah Luar Jawa jauh lebih besar daripada nilai eksportnya. Hal yang demikian, membuat neraca perdagangan daerah-daerah Luar Jawa mengalami defisit terhadap neraca perdagangan Jawa. Ketimpangan neraca perdagangan ini menjadi semakin parah manakala harga relatif produk-produk primer semakin rendah terhadap produk-produk sekunder.
3. Kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi di Luar Jawa sangat bergantung pada input yang berasal dari Jawa, sedangkan sebaliknya tidak. Hal ini mengakibatkan efek multiplier yang diterima perekonomian Jawa atas

23 Wuryanto, L. E., *Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia, An Interregional Computable General Equilibrium Approach*, Dissertation, Cornell University, Ithaca, USA. 1996

24 Hadi, S. *Studi Dampak Kebijakan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model Analisis Neraca Sosial Ekonomi)*. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 2001

kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar Jawa sangat besar, sedangkan sebaliknya tidak. Dengan kata lain *spillover effect* yang ditimbulkan oleh kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar Jawa terhadap perekonomian Jawa jauh lebih besar daripada sebaliknya.

Paling sedikit tiga hal tersebut di atas, merupakan penyebab utama kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa menjadi semakin melebar. Kesenjangan ekonomi antar daerah yang sangat ekstrim akan sangat mudah menimbulkan konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal, yang pada gilirannya akan mengakibatkan terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah secara sungguh-sungguh merupakan suatu keharusan. Implikasinya, prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengatasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa. Sesungguhnya, upaya serius pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa, akan berdampak pada penyebaran penduduk, mengurangi tekanan pengangguran dan kemiskinan.

Dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia pada masa itu terjadi pada level nasional. Sedangkan pada level daerah, tidak semua daerah memperoleh manfaat dari strategi tersebut, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Malah strategi yang diterapkan tersebut secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya. Telah terbangun pula pola hubungan antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya dengan pola *dominan-tergantung*, dimana pulau Jawa (sebagai *centre*) pada posisi *dominan* dan pulau-pulau lainnya (sebagai *periphery*) pada posisi *tergantung*.

Pembangunan ekonomi sebelum krisis tahun 1997 memang telah memberi hasil-hasil positif bagi perekonomian Indonesia terutama sisi kinerja ekonomi makronya. Tingkat pendapatan nasional rata-rata perkapita mengalami peningkatan yang cukup sekitar US\$ 50 pertengahan 1960 menjadi lebih dari US\$1000 pertengahan 1990. Indonesia sempat disebut sebagai calon Negara industri baru di Asia Tenggara. Tetapi dari kualitasnya pembangunan ekonomi selama Orde Baru menciptakan kesenjangan yang besar dalam distribusi pendapatan antarkelompok maupun kesenjangan ekonomi antar daerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata membuat sebagian provinsi terutama yang memiliki SDA berlimpah mengancam ingin melepaskan diri

dari Indonesia Samapi kini masih ada daerah-daerah menginginkan hal tersebut, walaupun telah diberikan otonomi, desentralisasi kewenangan dan fiskal, perimbangan keuangan dan pembangian hasil dari sumber daya alamnya.

Pada awalnya melalui otonomi daerah (Otda) pasca pergantian rezim orde baru ke orde reformasi, banyak harapan akan terjadi perubahan dan menjadi titik balik untuk mengubah pola hubungan dari *dominan-tergantung* menjadi pola *saling tergantung secara berimbang*. Semangat untuk mengubah pola hubungan antar daerah ini harus dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah, yang disertai dengan upaya-upaya sistimatis dan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Apabila pola hubungan antar daerah telah berubah menjadi *saling tergantung secara berimbang*, maka semua daerah akan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional sembari memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah.

Namun demikian dampak yang diharapkan dari otonomi melalui desentralisasi hampir 12 tahun di Indonesia ternyata belum mampu menyejahterakan rakyat, karena terus terjadi ketimpangan struktural, sebab kontribusi perekonomian Indonesia 67,7% (tahun 2008) bersumber dari Jawa. Ironisnya lagi, separuh dari kontribusi itu bersumber dari kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jadi luar Jawa hanya memberi kontribusi tidak lebih dari 30% dan belum merata, sementara jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta, 130 juta jiwa di antaranya tinggal di Jawa. Melalui kebijakan fiskal, setiap tahun DPR selalu mendesak penambahan anggaran bagi kawasan di luar Jawa dan Indonesia Timur khususnya, namun pengaruhnya terhadap distribusi pemerataan tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan pembelian barang-barang dan jasa masih lebih dominan dipasok dari Pulau Jawa. Otonomi daerah ini belum menolong, sementara sumber daya manusia yang digunakan masih itu-itu juga. Salah satu penyumbang ketimpangan struktural seperti dikemukakan Simandjuntak adalah penyebaran industri yang sangat timpang. Antara tahun 2003, 2006, dan 2009, sekitar 57,8% industry ada di Jawa, 6,2% di Bali, NTB, dan NTT, 21% di Sumatra, 3,4% di Kalimantan, 7,5% di Sulawesi, dan 4,2% di Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua²⁵.

²⁵ Robert Simanjuntak.Ph.d. dalam seminar nasional yang dilaksanakan memperingati HUT ke-62 Fakultas Ekonomi Unhas, Makasar. Senin 18 Oktober 2010

Setelah sepuluh tahun Otonomi Daerah pemerataan pembangunan belum terjadi, ketimpangan pembangunan antar wilayah masih berlanjut. Tanpa koreksi, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan terus terjadi. Jawa dan Sumatera tetap mendapat distribusi PDRB lebih 2/3 dari total GDP nasional. Pembangunan wilayah merupakan kombinasi yang sinergis antara kebijakan regulasi (terutama izin dan pajak serta pungutan) dan anggaran (terutama *public investment*). Kebijakan atas penggunaan kedua alat pemerintahan tersebut bukan saja menunjukkan keberpihakan politik pembangunan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tetapi sekaligus erupakan arah dan strategi pilihan rakyat atas pemimpin yang dipilihnya, sejak reformasi dan demokratisasi. Tabel-tabel berikut menunjukkan kondisi pembangunan, terutama dikaitkan politik pembangunan bagi sebesar-besarnya bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Kita berharap pada tahun-tahun berikutnya kondisi kesejahteraan akan menjadi lebih baik (lihat Tabel 1).

Tabel 1: PDRB Menurut Pulau Besar

REGIONAL	1971	1980	1990	2008
Jawa	54,5	46,5	56,8	60,7
Sumatera	29,0	32,3	25,2	21,6
Kalimantan	5,4	11,3	9,1	8,8
Sulawesi	6,0	4,8	4,1	4,6
Bali dan Nusa tenggara	3,4	2,5	2,9	2,7
Maluku dan Papua	1,7	2,6	1,9	1,6
	100	100	100	100

Sumber: Suahasil Nazara, Tahun 2009

C. Ketimpangan Antar Daerah

Pada aspek makro, Dumairy (1996)²⁶, menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugerah awal (*initial endowment*) diantara pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan yang tidak tepat cenderung berorientasi pada pertumbuhan, (*growth*). Perbedaan disebabkan oleh kualitas SDA yang dimiliki masing-masing daerah, ketidaksetaraan, serta adanya kesenjangan antara bekal “resources” yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi yang meliputi, sumberdaya alam, kapital, keahlian/keterampilan, bakat/ potensi atau sarana dan prasarana. Sedangkan pelaku ekonomi adalah

26 Dumairy, MA. “Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga 1996.

perorangan, sektor ekonomi, sektor wilayah/daerah/kawasan. Sumberdaya alam yang dimiliki tidak sama antar daerah, (pra)sarana ekonomi yang tersedia tidak sama antar daerah, begitu pula yang lain-lainnya seperti kapital, keahlian/keterampilan serta bakat atau potensi. Dilihat secara objektif, ketimpangan pembangunan yang selama ini berlangsung khususnya di negara-negara berkembang adalah dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah biasanya ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan²⁷.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan sebuah kondisi yang dapat dilihat dari berbagai perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Permasalahan kesenjangan dalam pembangunan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi. Berdasarkan data kemiskinan (BPS, 2007) persentase penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 0,79% dan terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,61%. Kesenjangan antar wilayah dalam pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi juga masih sangat besar. Penduduk di Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah 10,6 tahun, sedangkan penduduk di Sulawesi Barat baru mencapai 6,0 tahun.²⁸

Ketimpangan di bidang pelayanan kesehatan diindikasikan dari sebagian besar provinsi di Indonesia Bagian Timur, terutama di Provinsi Papua Barat, Papua dan Sulawesi Barat, dimana masih banyak wilayah yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Sementara itu, kesenjangan akses terhadap sumber air minum menurut data BPS tahun 2006 juga masih tinggi, dimana hanya 31,7% penduduk Maluku yang kesulitan air minum, namun sebanyak 66,1% penduduk kesulitan akses air minum di Provinsi Kepulauan

27 BAB 25 Pengurangan Kesenjangan Wilayah .www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5658/diakses tanggal 14 Maret 2011

28 Badan Pusat Statistik tahun 2005

Bangka Belitung. Untuk sanitasi layak (BPS,2006), hanya 6,2% penduduk DKI yang kesulitan akses, sedangkan di NTB sebanyak 53,8 % penduduk yang masih kesulitan akses sanitasi layak.

Kesenjangan kawasan antara perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Dilain pihak kawasan perkotaan mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif sangat cepat karena urbanisasi. Urbanisasi sendiri sebenarnya merupakan gejala normal dalam tahapan pembangunan suatu negara. Urbanisasi selain disumbang oleh migrasi penduduk dari desa ke kota serta pertumbuhan penduduk alami, juga disumbang oleh terjadinya reklasifikasi wilayah-wilayah yang semula tergolong perdesaan (*rural*) menjadi wilayah perkotaan(*urban*) sebagai akibat dari pembangunan dan proses aglomerasi.

Sementara itu ketimpangan²⁹ pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya; sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi dan modal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan orde baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan di Indonesia. Sementara sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur, banyak mengalami ketertinggalan di berbagai sektor pembangunan. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat kesenjangan atau ketimpangan pembangunan ekonomi adalah adanya kemiskinan diberbagai sektor. Kemiskinan menjadi problem kolektif bangsa Indonesia. Berbagai program dan strategi pengentasan kemiskinan juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah; mulai dari penguatan kualitas sumberdaya manusia, pembukaan lapangan kerja, eksploitasi sumberdaya alam dan penyediaan program padat karya.

Sebuah negara pasti tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian ini terdapat dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan dan terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun pada masyarakat kalangan atas. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang.

29 Strategi Mengukur Ketimpangan Daerah, <http://ojimori.com/strategi-mengukur-ketimpangan-daerah.html>, diakses tanggal 9 Maret 2011

Begitu juga dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomian yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks karena letak antara pulau satu dengan pulau yang lainnya sangat berjauhan. Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang tetap terjadi hingga saat ini adalah terjadinya ketimpangan pembangunan perekonomian. Untuk mengatasi masalah perekonomian pemerintah harus menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu ketimpangan pembangunan dan perekonomian yang terjadi di wilayah Indonesia. Apabila permasalahan inti ini sudah terselesaikan atau paling tidak pembangunan perekonomian di Indonesia mulai terjadi pemerataan, maka permasalahan perekonomian lain yang timbul sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan perekonomian satu per satu akan terpecahkan.

Setiap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, setidaknya akan mendapatkan apa yang disebut prestasi pembangunan. Prestasi pembangunan suatu negara atau daerah dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non-ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non-pendapatan. Tolak ukur pendapatan perkapita, sebagaimana semakin disadari belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan. Karena baru merupakan konsep rata-rata, pendapatan perkapita tidak mencerminkan bagaimana pendapatan suatu daerah terbagi di kalangan penduduknya, sehingga unsur pemerataan atau keadilan tidak terpantau. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya.

D. Kesenjangan dan Kemiskinan

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda didalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan orde baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan di Indonesia. Sementara sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur, banyak mengalami ketertinggalan diberbagai sektor pembangunan. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat kesenjangan atau ketimpangan pembangunan ekonomi adalah adanya kemiskinan di berbagai sektor.

Terlepas dari perdebatan metodologi dan indikator yang digunakan—dari waktu ke waktu, pengurangan jumlah orang miskin di negeri ini tidaklah membanggakan. Data BPS per Maret 2007 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah orang miskin (dengan standar pendapatan Rp. 166.697,-) yang bertengger di angka 37,17 juta jiwa, dibandingkan dengan data BPS per Maret 2006 dimana angka orang miskin (dengan standar pendapatan Rp. 151.997,-) berjumlah 17,8% atau 39.30 juta jiwa.³⁰

Sementara data BPS per Maret 2008 lalu menunjukkan, adanya tren penurunan angka orang miskin sebesar 2,21 juta jiwa dibanding tahun 2007 yang berjumlah 37,17 juta jiwa. Namun, tren penurunan ini tidak serta merta bisa mengabaikan jumlah orang miskin yang masih besar di negeri ini, yakni mencapai 34,96 juta atau 15% dari total penduduk Indonesia. Sementara jumlah penduduk miskin di desa dan kota tidak mengalami banyak perubahan. Sebagian besar penduduk miskin sebanyak 63,47% berada di desa. Sekitar 70% penduduk miskin di daerah pedesaan bekerja di sektor pertanian.³¹

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15%), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun lebih besar daripada daerah pedesaan. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah pedesaan berkurang 0,69 juta orang (Tabel 2). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah dari Maret 2009 ke Maret 2010. Pada Maret 2009, sebagian besar (63,38%) penduduk miskin berada di daerah pedesaan begitu juga pada Maret 2010, yaitu sebesar 64,23%. (lihat Tabel)

Menanggapi data tersebut ekonom Iman Sugema³² mengatakan, hasil survei BPS mengenai penurunan jumlah penduduk miskin tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, masih ada sekitar 30 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, atau dengan kata lain yang berpendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari. Itu berarti masih banyak masyarakat yang belum makmur. Dengan Produk

30 Dikutip dari Labor Analysis (penerbitan bulanan ALNI Indonesia), Edisi Agustus 2007, hal. 4.

31 Laporan BPS, Maret Tahun 2008.

32 Iman Sugema, "Nggak Bisa Jadi Patokan", *Ekonom (ICAPE)*, Harian Rakyat Merdeka. 25 Oktober 2010

Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 7.000 triliun, dan jumlah penduduk sekitar 230 juta, rata-rata pendapatan penduduk Indonesia memang lebih dari 3.000 dolar AS, tapi itu hanya angka rata-rata. Selain itu, di dalam PDB juga terdapat kekayaan milik investor asing, seperti Freeport Amerika, atau Bank Danamon yang sebagian sahamnya dimiliki investor Malaysia. Jika kekayaan perusahaan-perusahaan asing itu dikeluarkan dari PDB, tentu pendapatan penduduk Indonesia akan sangat kecil.

Tabel 2 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2004-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15
2010	11,10	19,93	31,02	9,87	16,56	13,33

Sumber: BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Tahun 2010

Demikian pula, jika digunakan ukuran garis kemiskinan menurut versi Bank Dunia, dengan ukuran pendapatan 1 dollar AS (sekitar Rp. 8.500,-) per orang per hari, maka akan dihasilkan angka penduduk miskin hampir dua kali lipat. Sementara jika digunakan ukuran pendapatan 2 dollar AS per harinya, dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa, maka akan dihasilkan separuh jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal pagu pendapatan sebesar rata-rata 2 dollar AS per hari tidaklah tinggi, karena mereka yang harus hidup dengan hanya Rp 20.000,- per hari, di mana pun ia tinggal, baik di desa apalagi di kota-kota, jelas tidak termasuk kategori penduduk yang sejahtera.

Fakta tentang kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa angka kemiskinan atau batas miskin sangat ditentukan oleh jumlah penghasilan. Jika indikator jumlah penghasilan yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan berbeda, maka akan dihasilkan jumlah angka kemiskinan yang berbeda pula. Kemiskinan yang diderita mayoritas pekerja (baik pekerja formal maupun informal) sangat ditentukan oleh pendapatan/ penghasilan yang mereka terima. Seperti terus digugat para aktivis buruh, untuk pekerja formal, dari waktu ke waktu, pemerintah selalu menggunakan standar penghasilan

buruh berdasarkan nalar kebutuhan hidup minimum (KHM)—sebagai perluasan dari konsep pengupahan berdasarkan kebutuhan fisik minimum (KFM), bukan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL) dan/atau kebutuhan hidup manusiawi.

Konsep KHM (KFM) merujuk pada gagasan teori upah liberal, dimana upah ditetapkan menurut hukum besi “permintaan dan penawaran”. Teori ini menganggap persoalan upah sebagai bagian dari ekonomi pasar. Bila dalam pasar kerja terdapat banyak tenaga kerja karena angka pengangguran tinggi, maka tenaga kerja bisa dibayar dengan upah murah. Sementara jika pekerja tidak bersedia menerima upah murah, maka perusahaan akan dengan mudah merekrut tenaga kerja baru yang tersedia melimpah di pasar kerja.³³

Dalam situasi seperti ini, pekerja jelas berada pada posisi tidak berdaya. Nilai tenaga kerja berdasarkan pasar bebas ini merupakan bagian dari strategi kebijakan “politik upah murah” yang telah dipraktikkan sejak awal Orde Baru. Kebijakan ini merupakan derivasi dari apa yang diistilahkan dalam literatur ekonomi sebagai “keunggulan komparatif” (*comparative advantage*), yakni keunggulan ekonomi yang dibangun di atas fondasi kebijakan upah murah yang menjadikan Indonesia selama 40 terakhir begitu memikat bagi investasi asing.

Sementara dalam konteks demografi kehidupan masyarakat desa (*rural society*), hasil survei LSI (2006) menunjukkan kondisi perekonomian rakyat pasca reformasi tidak lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Data kenaikan harga energi di dua desa di Jawa Tengah selama kurun waktu 15 tahun terakhir memperlihatkan, rakyat kian dipermiskin dalam mengonsumsi makanan (yang mengalami penurunan dari 63,8% menjadi 57,6%) dan belanja kesehatan (turun dari 4% menjadi 2,5%).

Sementara bila dilihat dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tahun 2006 IPM Indonesia masih berada di peringkat 110 dari 117 negara, dan tahun 2007 berada di peringkat 108 dari 189 negara. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih jauh tertinggal: Singapura di peringkat 25, Malaysia 63, Thailand 77, dan Vietnam 105.³⁴

Menurut Mudrajat Kuncoro, ekonom dari Universitas Gajah Mada (UGM), sebanyak 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah makin tersisih. Kelompok penduduk ini hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi

33 Augustinus Simanjuntak, “UMK dan Liberalisasi Ketenagakerjaan”, Jawa Pos, 27 Oktober 2008.

34 Koran Tempo, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Terendah di Asia Tenggara, 17 Desember 2007.

19,2% pada 2006, makin mengecil dari 20,92% pada 2000. Sebaliknya, 20% kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi dari 42,19% menjadi 45,72%. Rasio gini yang menunjukkan ketimpangan ekonomi juga makin membesar dari 0,29 menjadi 0,35.

Tingginya angka kemiskinan nasional antara lain, menurut Kuncoro, terjadi akibat adanya monopoli kepemilikan aset ekonomi oleh sejumlah kecil orang. Angka nasional menyebutkan, 0,2% dari 220 juta penduduk Indonesia diperkirakan menguasai 56% aset ekonomi Indonesia. Monopoli kepemilikan aset itu meliputi kekayaan dalam hal agraria, seperti tanah, tambak, kebun dan properti. Sebanyak 62-87% aset itu berupa aset agraria. Data ini memang perlu dikaji lebih mendalam. Ketimpangan akses terhadap aset agraria itu, memicu angka penduduk miskin di desa mencapai 65% yang notabene menggantungkan hidup dari sektor pertanian³⁵. Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa ketimpangan dan kemiskinan masih terlihat baik di kawasan Barat maupun kawasan Timur Indonesia. Ketimpangan ini semakin jelas bila dibandingkan antara provinsi yang memiliki sumber daya alam dan tidak, serta antara kota dan desa.

Distribusi nasional merupakan indikator terutama di antara indikator yang lain digunakan untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu Negara. PDRB nasional relatif sama antar provinsi memberi indikasi distribusi PDB nasional relatif merata. Terdapat tujuh provinsi yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional. Kenyataan ini menandakan masih terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah. Dalam lima tahun terakhir terdapat tujuh provinsi yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ketujuh daerah tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan DKI Jakarta.

Walaupun demikian, menurut Latif Adam (2009)³⁶, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indeks pemerataan antar wilayah memang makin baik. Ia menilai hal itu terjadi karena pemerintah berhasil melakukan akselerasi pembangunan di daerah, seperti membuka perkebunan sawit di daerah-daerah. Namun, jika dilihat dari peran masing-masing daerah dalam pembentukan PDB, ia menilai tetap masih ada ketimpangan. Kawasan Barat Indonesia, dalam lima tahun terakhir, masih tetap menjadi penyumbang PDB nasional terbesar. Data

35 <http://www.investorindonesia.com> Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar, 23 November 2007

36 Latif Adam "Masih Terjadi Ketimpangan" peneliti/ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Koran Jakarta, Senin, 24 Agustus 2009.

BPS menyebutkan peranan kawasan barat Indonesia terhadap PDB dalam lima tahun terakhir masih di atas 80% bagi PDB nasional, sisanya kawasan timur. Berturut-turut, dari 2004-2008, kawasan barat menyumbang 81,74%, 80,95%, 81,76%, 82,00%, dan 80,90%. Sedangkan kawasan Timur dari 2004-2008, secara berturut-turut menyumbang 18,26%, 19,05%, 18,24%, 18%, dan 19,1%. Latif Adam selanjutnya menyebutkan walaupun dalam kurun lima tahun terakhir indeks pemerataan antar wilayah makin baik, namun sayangnya tidak dibarengi dengan perbaikan kesenjangan pendapatan antar golongan. Gini rasio dalam lima tahun terakhir persentasenya makin besar. Pada tahun 2005-2008, rasio berturut-turut tercatat sebesar 0,36%, 0,33%, 0,37% dan 0,37%. Ketimpangan pendapatan terjadi terjadi karena, ternyata akselerasi pembangunan di daerah, seperti pembukaan perkebunan sawit, dan kebun-kebun lainnya, bukanlah domain petani kecil tapi pengusaha kaya, sedangkan mayoritas petaninya hanya jadi buruh.

E. Upaya Yang Harus Dilakukan

Bertolak dari pembahasan di atas, maka solusi dalam mengatasi ketimpangan struktural ini adalah dengan perencanaan pembangunan ekonomi regional melalui membangun infrastruktur, jaringan transportasi yang memadai, industri, dan pengembangan kawasan yang memiliki potensi-potensi sesuai dengan karakteristik wilayah dan daerah dengan mengandalkan produk-produk unggulan, yang samapai saat ini belum memperoleh hasil yang diharapkan. Padahal melalui kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal seharusnya mampu menciptakan perekonomian daerah.

Tugas utama negara pada saat sekarang tentunya memilah-milah kondisi ketimpangan pada tiap-tiap daerah dengan diperlukan adanya *imperative action* (perintah aksi/kegiatan) dari pemerintah pusat untuk negara ini. Namun kebijaka ini harus didukung dengan meningkatkan melalui kelembagaan indeks pembangunan manusia provinsi (IPMP) agar kondii tersebut harus menjamin kualitas pelayanan. Sinergi program dan anggaran untuk meningkatkan kualitas promosi investasi daerah.

Negara dalam hal ini pemerintah pusat harus melaksanakan kebijakan-kebijakan bagaimana mengalihkan ekonomi dari daerah tertentu yang memilki tingkat pertumbuhan tinggi agar bisa menyebar secara merata ke daerah lain yang masih mengalami ketimpangan. Terutama daerah-daerah yang memilki SDA yang melimpah seharusnya merelakan sebagian penghasilannya untuk paling tidak dalam pembiayaan kebutuhan dasar daerah yang timpang dengan

pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ketimpangan antar wilayah dapat berkurang. Namun upaya selanjutnya bagaimana menggerakkan perekonomian wilayah-wilayah yang timpang tersebut. Semua upaya harus dimaksimalkan dengan menggali potensi daerah dan potensi penduduk sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya alam maupun untuk sumberdaya manusianya. Masalah ketimpangan dan kemiskinan ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa kerjasama dari semua elemen. Peran pemerintah harus dioptimalkan dalam upaya pengaturannya.



BAB IV

PENUTUP

Permasalahan besar yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi masalah perekonomian pemerintah harus menyelesaikan permasalahan akarnya yaitu ketimpangan pembangunan dan perekonomian yang terjadi di wilayah Indonesia. Sehingga terjadi perbedaan dari distribusi pendapatan antara daerah dan distribusi pengeluaran pemerintah pusat dan daerah merupakan satu permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi selama bertahun-tahun lamanya sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah satu dengan yang lain.

Salah satu upaya kebijakan pemerintah adalah melakukan desentralisasi kewenangan dan keuangan. Namun kebijakan ini masih belum mampu memperkecil ketimpangan tersebut, dimana terlihat adanya perbedaan tingkat pembangunan, seperti perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena minimnya pengeluaran pembangunan di daerah serta kendala-kendala SDM, infrastruktur, teknologi dan dana.

Berbagai pandangan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang fenomena ketimpangan yang berlangsung di Indonesia. Kebijakan industrialisasi yang semula diyakini akan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi terbukti sangat rapuh bila dalam implementasinya tidak melibatkan sektor primer. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pertumbuhan sektor industri yang cukup tinggi ternyata tidak memberikan dampak apapun bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan sektor industri tumbuh sangat tinggi namun tidak diringi dengan pembangunan sektor pertanian sehingga kondisi ini semakin meningkatkan ketimpangan sektoral yang sangat tidak menguntungkan bagi

daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Pada sisi lain sektor industri sendiri yang memperoleh berbagai dukungan kebijakan begitu luar biasa tidak menunjukkan prestasi apapun karena daya saingnya yang rendah. Hal ini sebagian terjadi karena sektor industri tersebut tidak betbasis pada sektor pertanian yang merupakan basis ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia; belum lagi pembangunan sektor industri tersebut dibangun dengan berbagai permasalahan yang memperlemah daya saing.

Tentu saja untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya sebatas bantuan subsidi modal bagi kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan (keterampilan) tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu, harus diakui bahwa persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksud nya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya perlu direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung pada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya.

Di samping itu upaya meminimalkan ketimpangan pendapatan juga harus menyentuh aspek distribusi faktor produksi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia model serupa belum bisa efektif karena lemahnya institusi serikat kerja dan dominannya kekuasaan pihak perusahaan. Dalam kondisi seperti ini fungsi pemerintah adalah mengeluarkan tegulasi yang mengatur pembagian keuntungan ekonomi di antara faktor produksi tersebut, di samping undang-undang yang mengatur masalah pendapatan minimum. Sementara itu upaya penguatan serikat pekerja tetap harus dilakukan agar mereka bisa memiliki posisi yang setara dalam membicarakan masalah upah dan insentif lainnya dengan pihak pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (edisi pertama). Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Friedman, John, & Clyde Weaver. 1979. *Territory & Function- The Evolution of Regional Planning*. London: Edward Arnold. Jhingan, M.L. 1996. *Ekonomi Pembangunan & Perencanaan*. Edisi 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lay, Cornelis. 1993. *Ketimpangan dan Keterbelakangan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik UGM.
- Nurzaman, Siti Sutriah, 2002. *Perencanaan Wilayah di Indonesia – Pada Masa Sekitar Krisis*. Bandung: ITB.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2001. *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi – Studi Empiris Pada Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PerPod.
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

JURNAL/ MAKALAH

- Bourguignon, F. 2004. "The Poverty-Growth-Inequality Triangle." Makalah dipresentasikan untuk Dewan Penelitian Hubungan Ekonomi Internasional India. New Delhi, 4 Februari, 2004.
- Azis, Harry Azhar, 2011. "Ekonomi Indonesia dan Daerah 2011" Makalah pertemuan KAHMI Padang Pariaman, Sumatera Barat, 11 Marer 2011.
- Hadi, S. 2001. *Studi Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah (Pendekatan Model Analisis Neraca Sosial Ekonomi)*. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 2001.

- McCulloch, N., B. Baulch, M. Cherel-Robson. 2000. "Poverty, Inequality, and Growth in Zambia during the 1990s." Makalah untuk Konferensi Umum ke 26 Asosiasi Internasional untuk Penelitian tentang Pendapatan dan Kekayaan. Krakow, Polandia, 2000.
- Ravallion, M. 1997. "Can High-inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty?" *Economics Letters*, 56.1997.
- Simanjuntak, Robert. 2010. (—————) Makalah dalam seminar nasional yang dilaksanakan memperingati HUT ke-62 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar. Senin 18 Oktober 2010.
- Wuryanto, L. E., 1996. "Fiscal Decentralization and Economic Performance in Indonesia, An Interregional Computable General Equilibrium Approach", Disertasi, Cornell University, Ithaca, USA. 1996.



SURAT KABAR DAN MAJALAH

- Simanjuntak, Augustinus, 2008. *UMK dan Liberalisasi Ketenagakerjaan*, Jawa Pos, 27 Oktober 2008.
- Iman Sugema, "Nggak Bisa Jadi Patokan", *Ekonom (ICAFE)*, Harian Rakyat Merdeka. 25 Oktober 2010.
- Koran Tempo*, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Terendah di Asia Tenggara 17 Desember 2007.
- Labor Analysis* (penerbitan bulanan ALNI Indonesia), Edisi Agustus 2007.

WEBSITE

- <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/5658/> BAB 25 Pengurangan Kesenjangan Wilayah.
- <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8426/> Bab 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.
- [http://inspirasiatabloid.wordpress.com/Socia Prihawantoro Peneliti BPPT. "Paradigma Inovasi Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal"](http://inspirasiatabloid.wordpress.com/Socia_Prihawantoro_Peneliti_BPPT._Paradigma_Inovasi_Dalam_Pembangunan_Daerah_Tertinggal/) 16 Juli 2010.



BAGIAN2

KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

*Asep Ahmad Saefuloh**

* Penulis adalah Peneliti Bidang Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis dapat dihubungi pada asepp3i@yahoo.com.

BABI PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Saat ini dunia sedang berada pada era globalisasi, di mana perdagangan antar negara bergerak ke arah perdagangan bebas. Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia tidak bisa menghindari dari kenyataan tersebut. Tetutama sekali, tantangan pasar bebas¹ semakin nyata setelah tanggal 1 Januari 2010 perdagangan bebas Cina-ASEAN *Free Trade Area*² atau CAFTA dinyatakan mulai berlaku. Konsekuensi dari keberadaan CAFTA adalah produk Cina akan semakin membanjiri pasar domestik dengan harga kompetitif. Cina dapat menghasilkan produk kompetitif dikarenakan produktivitas pekerjaannya sangat tinggi. Sementara bagi Indonesia, sesuai dengan catatan ILO, produktivitas³

- 1 Sejarah perdagangan bebas internasional adalah bagian dari sejarah perdagangan internasional yang memfokuskan pada pengembangan pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan maju sepanjang sejarahnya telah bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang. Teori ini berkembang dalam masa kebudayaan moderen komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, yaitu lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas dan keberlanjutannya, kebijakan merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Ekonom awal yang menolak merkantilisme adalah David Ricardo dan Adam Smith. Dalam perkembangannya ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya kalau itu merupakan alasan kenapa beberapa kebudayaan secara ekonomis makmur. Adam Smith, contohnya, menunjukkan bahwa peningkatan perdagangan sebagai alasan berkembangnya kebudayaan tidak hanya di Mediterania seperti Mesir, Yunani, dan Roma, tapi juga Bengal dan Tiongkok. Begitu juga kemakmuran dicapai Belanda setelah menjatuhkan kekaisaran Spanyol, dan mendeklarasikan perdagangan bebas. Adanya kebebasan berpikir telah membuat pertentangan merkantilis/perdagangan bebas menjadi pertanyaan paling penting dalam ekonomi selama beberapa abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berinteraksi dengan merkantilisme, proteksionisme, isolasionisme, komunisme dan kebijakan lainnya sepanjang abad 20.
- 2 Dua puluh satu tahun lalu, Peter Drucker (1989:115-116), menjelaskan bahwa dunia sedang dihadapkan pada "perekonomian dunia", atau menurutnya *transnational economy* sehingga kebijakan tidak lagi perdagangan bebas ataupun proteksionisme tetapi tindakan timbal balik. Karena itu dengan sudut pandang ini seharusnya ACFTA dirancang untuk memberikan keseimbangan perdagangan antara Cina dan Asean.
- 3 Produktivitas, berarti jam kerja buruh/pekerja terhadap total produk atau GDP riil (McConnel, 2006:505)

tenaga kerja Indonesia masih berada di peringkat 59 dunia jauh di bawah negara-negara pesaing. Sebagai suatu perbandingan, Korea berada pada peringkat 29, dan Cina peringkat 31.⁴

Menghadapi kondisi tersebut, sebagian kalangan cemas bahwa CAFTA akan membuat industri Indonesia gulung tikar dan menambah pengangguran. Namun banyak juga kalangan melihat perdagangan bebas tersebut akan membuat Indonesia semakin makmur.⁵ Kecemasan muncul dikarenakan pemerintah sendiri dalam kebijakannya tidak mendukung untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, tetapi justru menerbitkan kebijakan yang mempermudah masuknya produk impor. Saat ini, industri dalam negeri sedang mengalami kesulitan untuk bersaing⁶ dengan industri di negara lain dikarenakan biaya produksi, distribusi dan pemasaran lebih tinggi dibandingkan di negara lain. Selain itu, industri di negara lain mendapat dukungan penuh dari pemerintahnya. Kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah justru menimbulkan tambahan biaya yang harus ditanggung kalangan industri nasional.⁷

Menurut Menteri Perindustrian M.S Hidayat, salah satu persoalan yang menjadi kendala sektor industri yang menurunkan daya saing adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini terkait dengan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, di samping kendala lain seperti ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor dan mesin-mesin produksi yang sudah tua.⁸ Penjelasan di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di mana untuk menjaga daya saing ke depan, diperlukan perbaikan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah logistik dan penyediaan energi listrik, penciptaan iklim investasi dengan

4 Tanti Syachroni, "Manufaktur: Peluang & Tantangan di Era CAFTA (China-Asean Free Trade Agreement)", "makalah disampaikan dalam, "Kuliah Umum Penyiapan SDM Industri Manufaktur: Peluang dan Tantangan Era CAFTA" yang diselenggarakan Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (TK FTI UII), 17 Februari 2010 (http://fit.uii.ac.id/media/CAFTA_pismagroup.pdf), diakses 8 Maret 2010).

5 "Perdagangan bebas ASEAN-Cina." 25 Juni 2010 (http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/06/100625_acftahalaman.shtml), diakses 27 Desember 2010).

6 Studi dari Bhattacharyya and Mandal (2010) terhadap perdagangan India dengan FTA, India akan mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara Asean, kecuali dengan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa India masih kompetitif dibandingkan dengan Indonesia.

7 "Perdagangan Bebas: Serbuan Produk Impor Matikan Industri Nasional," 17 Desember 2010 (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=268543>), diakses 27 Desember 2010).

8 "Laporan Akhir Tahun: Industri, Hambatannya Masih Sama," 28 Desember 2010 (<http://bisnis.kompas.com/read/2010/12/28/11002592/Industri.Hambatannya.Masih.Sama>), diakses 27 Desember 2010).

mempersiapkan SDM yang produktif, menekan biaya yang tidak kompetitif, dan menyelesaikan regulasi ketenagakerjaan.⁹

Sejalan dengan adanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010 terdapat 2 prioritas RUU bidang ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam suatu kegiatan perekonomian yaitu sektor industri dan sektor perdagangan. Pertama, DPR-RI telah menetapkan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Kedua, adanya RUU tentang Perdagangan yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini tentunya harus direspon oleh DPR RI melalui regulasi dalam rangka meminimalisir dampak liberalisasi perdagangan dunia dalam konteks globalisasi pasar. Terlebih sektor perdagangan pada saat ini dan masa depan dihadapkan pada tantangan menuju liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang efisien dan efektif, sehingga dapat menggerakkan ekonomi nasional dan perekonomian daerah/lokal. Begitu juga momentum ini dapat digunakan untuk melakukan pembenahan SDM di bidang perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan SDM di sektor industri dan perdagangan perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap SDM di sektor industri dan perdagangan tersebut. Untuk keperluan studi maka dilakukan studi dengan mengambil Provinsi Bali sebagai daerah studi. Pemilihan Bali ini dikarenakan Bali memiliki faktor kekhasan (*endowment*) yang diharapkan akan menjadi nilai positif dalam menghadapi persaingan ke depan.

B. Perumusan Masalah

Perekonomian Provinsi Bali menunjukkan suatu gejala perkembangan yang cukup menarik untuk diperhatikan. Selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun telah terjadi pergeseran peranan sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, perekonomian Bali masih tergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama penghasilan masyarakat Bali. Namun sejalan perkembangan perekonomian nasional serta berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, maka proporsi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Bali menjadi semakin kecil walaupun secara absolut nilainya tetap mengalami peningkatan. Sebagai gambaran dari perubahan struktur ekonomi Bali tersebut terlihat pada tahun 2009 di mana sektor pertanian dalam pembentukan PDRB

9 "Indonesia Tidak Siap Hadapi "Persaingan"," 2 Desember 2010 (<http://bisnis.keuangan.kompas.com/read/2010/12/02/09125588/Indonesia.Tidak.Siap.Hadapi..quot.Persaingan.quot.,> diakses 27 Desember 2010).

Bali menurun menjadi 18,21 persen dari persentase pada tahun 2005 yang masih menunjukkan sumbangan sebesar 20,29 persen. Begitu juga, peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi semakin dominan yaitu mencapai sekitar 30 persen. Sektor lainnya yang membentuk PDRB Bali pada tahun itu di antaranya adalah: sektor jasa 14,72 persen; pengangkutan dan telekomunikasi 13,76 persen; industri 9,16 persen; keuangan 7,11 persen; listrik, gas dan air bersih 2 persen; serta sektor pertambangan 0,65 persen.¹⁰ Persentase tersebut tidak banyak berubah sampai dengan 2005. Gambaran ini memberikan indikasi bahwa telah terjadi pergerakan menuju ke arah keseimbangan dalam struktur perekonomian Bali, dan semakin pentingnya sektor perdagangan kedepannya.

Dalam kaitan perdagangan tersebut tidak dapat melepaskan diri dengan sektor industri. Artinya dengan semakin berkembangnya sektor industri maka sektor perdagangan juga akan terdorong untuk semakin berkembang. Bali sendiri merupakan salah satu daerah yang sejak lama melakukan perdagangan luar negeri. Selama Triwulan IV (Oktober-Desember) 2009, Bali telah mengeksport berbagai jenis mata dagangan ke pasar mancanegara, senilai 53,58 juta dolar AS. Adapun komoditi ekspor utama Bali yang mampu bersaing dan menembus pasar mancanegara antara lain: ikan (tuna) dan udang mencapai 29,34 persen; perhiasan/permata 22,27 persen; pakaian jadi bukan rajutan 16,19 persen; kayu dan berbagai jenis cinderamata sentuhan perajin Bali yang berasal dari bahan kayu 5,36 persen; dan produk penerangan rumah 4,54 persen. Komoditi andalan Bali itu telah menembus pasaran Jepang mencapai 25,92 persen, Amerika Serikat 12,69 persen, Singapura 11,65 persen, Hongkong 8,41 persen dan Australia 6,83 persen.¹¹

Keterkaitan kedua sektor tersebut dalam kerangka kebijakan adalah bagaimana membangun kebijakan industri dalam bentuk kebijakan sektoral dan horisontal.¹² Upaya sektoral merupakan berbagai macam tindakan yang dirancang untuk mentargetkan industri-industri atau sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, sedangkan upaya horisontal dimaksudkan untuk mengarahkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan kerangka persaingan. Hal ini sejalan dengan penjelasan di atas bahwa mendorong kinerja

10 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, *Bali Dalam Angka Tahun 2009* (Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2010).

11 "Nilai ekspor Bali 53,58 juta dolar AS." (http://ekonomi.tvone.co.id/berita/view/33132/2010/02/15/nilai_ekspor_bali_5358_juta_dolar_as/, diakses 28 Juli 2010).

12 Cowling (1999) seperti yang dikutip oleh Kuncoro dalam "Industri Indonesia di Persimpangan Jalan." *Kompas*, 19 Februari 2005.

sektor industri maka akan mendorong kinerja sektor perdagangan. Karena itu untuk mendorong kinerja kedua sektor tersebut dibutuhkan SDM yang cukup dan kompeten.

Selanjutnya berdasarkan hal di atas maka pokok permasalahannya adalah bagaimana kesiapan sektor industri dan perdagangan Bali dalam menghadapi persaingan bebas ke depan. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan ketenagakerjaan, khususnya di sektor industri dan perdagangan di Provinsi Bali selama ini?
2. Bagaimana kebijakan ketenagakerjaan, khususnya di sektor industri dan perdagangan di Provinsi Bali selama ini?
3. Bagaimana mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan sektor industri dan perdagangan ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memetakan persoalan ketenagakerjaan di sektor industri dan perdagangan di Provinsi Bali, termasuk kebijakan yang selama ini ada serta implikasi kebijakan yang harus dilakukan terkait dengan sektor industri dan perdagangan. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan substansi yang perlu diatur dalam RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan RUU Perdagangan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis dengan berdasarkan pada data primer dan sekunder, yang kemudian dari hasil pembahasan diambil kesimpulan dan rekomendasi. Untuk keperluan analisis dilakukan studi literatur dan penelitian lapangan. Studi literatur dipergunakan untuk memperluas pemahaman serta mendukung analisis.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan. Informan yang dimaksud adalah pejabat di instansi terkait dan wakil pengusaha, yaitu: Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pengembangan Investasi Daerah Provinsi Bali, Bank Indonesia Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handycraft* Indonesia (Asephi) Provinsi Bali, dan Kamar Dagang dan Industri. Untuk data sekunder berasal dari literatur dan sumber lainnya seperti surat kabar, majalah, dan internet.

C. Tempat Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan di Bali Pemilihan Bali sebagai daerah penelitian karena daerah tersebut menggambarkan studi kasus yang dilihat dengan dasar karakteristik daerah yang mengandalkan sektor keunggulan budaya (*endowment factor*) sebagai pendorong sektor industri dan perdagangan.

D. Waktu Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan di Provinsi Bali dilaksanakan pada 3-12 Oktober 2010.



BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Tambunan, ada tiga faktor yang menentukan tingkat daya saing sebuah negara. *Pertama*, persyaratan-persyaratan dasar seperti kelembagaan, infrastruktur, kondisi ekonomi makro dan tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat. Faktor-faktor ini dianggap sebagai motor utama penggerak proses/pertumbuhan ekonomi. Secara empiris, faktor-faktor ini sudah terbukti berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, faktor-faktor yang bisa meningkatkan efisiensi (atau produktivitas) ekonomi seperti pendidikan tinggi dan pelatihan (kualitas SDM), kinerja pasar yang efisien, dan kesiapan teknologi di tingkat nasional maupun perusahaan secara individu. *Ketiga*, faktor-faktor inovasi dan kecanggihan proses produksi di dalam perusahaan yang secara bersama (agregat) menentukan tingkat inovasi suatu negara.¹³

Dalam meningkatkan daya saing, menurut Adam (2010), Indonesia seharusnya mengembangkan faktor *endowment*-nya di sektor industri dan perdagangan barang yaitu mengembangkan sektor primer yang sudah ada, seperti produk pertambangan migas dan non-migas, produk dari sektor perkebunan (*agro-industry*), produk sektor pertanian, serta produk perikanan/kelautan. Walaupun fokus pada sektor industri tetapi harus mengembangkan sektor industri (sebagian industri) yang benar-benar efisien dan tidak memiliki ketergantungan besar akan impor bahan baku dari luar negeri. Dalam hal ini memanfaatkan sesuatu yang justru menjadi *competitive advantage*¹⁴ Bali lebih baik

13 Tulus Tambunan, "Pengkajian Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Indonesia," Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, 2008 (<http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-292816062008.pdf>), diakses 17 Oktober 2010).

14 Banyak ekonom berpendapat bahwa dalam perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar, sementara yang lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena dapat menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan konflik atau perang.

dibandingkan produk impor.¹⁵ Pilihan atas itu, sebagai sebuah perbandingan dari arti penting keunggulan bagi suatu negara adalah bagaimana Turki menguasai pasar tekstil. Studi dari Gurler et.al (2006), setelah adanya *Free Trade Agreements on Intra-Industry Trade* atau perdagangan bebas tekstil, justru produk tekstil Turki semakin penting atau perdagangan tersebut memberikan dampak positif.

Namun demikian, dalam menjaga daya saing tersebut harus didukung dengan kebijakan pemberdayaan terhadap ketenagakerjaan/SDM. Menurut Pfeiffer (1996:14), SDM menjadi penting karena ketika sumber-sumber persaingan telah menjadi kurang penting, maka SDM menjadi penting dan pembeda dari lainnya. Selanjutnya strategi yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan *strategic planning*. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat peran SDM dalam suatu kegiatan ekonomi melalui model fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri salah satunya akan dipengaruhi oleh seberapa besar dan baiknya sumbangan faktor produksi, seperti modal, sumber daya alam (SDA) teknologi, dan yang terpenting tenaga kerja.

Tenaga kerja sendiri berasal dari penduduk, dan selanjutnya jumlah penduduk yang mewakili sisi tenaga kerja akan menyediakan penawaran. Bila tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi meningkat, maka dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas. Tetapi sebaliknya jika tingkat produksi atau produktivitas menurun maka tenaga kerja yang dapat diserap juga akan berkurang atau terjadi *labour surplus*.¹⁶ Penurunan produksi tersebut dapat muncul jika kemampuan dan kualitas produksi kalah bersaing dengan produsen (negara) lainnya. Dan sebaliknya jika produk dan kualitas baik maka akan mampu bersaing dan mendorong lebih banyak produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin meningkat. Di sisi lain, menurut Roxanna (2009: 444) kompetitif dapat disumbang dengan semakin tendahnya *unit cost* dari tenaga kerja dalam proses produksi.

Selanjutnya dalam kondisi *ceteris paribus*, menurut Rutkowski dan Pryzybla (2002) struktur ekonomi yang lebih besar adalah faktor utama dalam mempengaruhi ketersediaan kesempatan kerja. Selanjutnya struktur ekonomi sendiri, salah satunya dapat dilihat dari indikator output atau produktivitas dan investasi. Struktur ekonomi ini berperan karena menjadi sumber permintaan

15 Latief Adam. "Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Perdagangan," makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari tentang Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Perdagangan, di Pusat pengkajian, Pengolahan data dan Informasi DPR RI, 10 Agustus 2010.

16 Jack Nobb dan Ian Hopkins, *Economics, A Core Text*, Fourth Edition (McGraw-Hill International, United Kingdom, 1995), hal 176-181.

tenaga kerja.¹⁷ Karena itu pemerintah harus mampu menciptakan struktur ekonomi yang mampu mendorong produktivitas dengan berbagai instrumen kebijakan. Dalam terminologi kebijakan, biasa disebut sebagai kebijakan sektor riil dan moneter, di mana kebijakan dibuat untuk menciptakan iklim yang kondusif dan harus sejalan satu sama lainnya.

Terkait dengan Provinsi Bali sebagai unit analisis, maka dalam konteks persaingan sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa faktor *endowment* menjadi penting bagi suatu daerah yang memiliki karakteristik khusus. Berdasarkan hal tersebut, untuk Provinsi Bali maka proses produksi didorong dengan sektor pariwisata sebagai faktor *endowment* yang diikuti dengan pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan sektor sektor UMKM menjadi penting karena biasanya sektor pariwisata ditunjang oleh UMKM (*small industries*).

Seperti penjelasan sebelumnya, daya saing meskipun berfokus pada faktor *endowment*-nya juga perlu didukung dengan kualitas SDM. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Ehrerberg and Smith (1996:31) bahwa untuk mengimbangi perubahan dunia usaha perlu adanya perubahan terhadap pekerjaan (*skill*) pekerja. Meskipun terkait dengan sektor pariwisata di Bali umumnya sudah didukung dengan SDM yang berkualitas untuk karakteristik pariwisatanya, tetapi ketika berbicara konteks pengelolaan terhadap industri pariwisata secara utuh, perlu didukung dengan pengembangan SDM-nya yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Rajar and Shah (tanpa tahun) bahwa dalam menghadapi globalisasi, perhatian untuk memperkuat SDM sesuai dengan kompetensi yang relevan. Karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang difokuskan untuk meningkatkan SDM yang mempunyai daya saing dalam memproduksi produk lokal. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan pembuatan desain produk sesuai selera masyarakat, pelatihan cara mempublikasikan produk agar lebih dikenal, pelatihan distribusi dan pemasaran, serta pelatihan yang merangsang untuk membuat inovasi-inovasi terbaru dan berbeda.

Dalam konteks nasional, membangun faktor *endowment* Bali, hal ini sejalan dengan pemikiran dari Damanhuri (tanpa tahun), harus ada *shifting paradigm*, yaitu proses pembangunan yang mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang memandirikan struktur ekonomi nasional. Supaya visi tersebut

17 Jan Rutkowski and Marcin Przybła, "Poland: Regional Dimensions of Unemployment." *Labor, Employment and Social Policies in the EU: Enlargement Process, Changing Perspectives and Policy Option*, ed. Bernard Funck and Lodovico Pizzati (The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2002).

juga terjadi di berbagai daerah, maka kebijakan pembangunan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Karena itu pluralitas masuk didalamnya konteks *endowment* tersebut.

Di sisi lain adanya perdagangan bebas memberikan kecenderungan arus Investasi asing akan semakin mudah masuk ke kawasan perdagangan. Studi dari Karim and Othman (2005) dengan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa arus masuk investasi asing terbukti meningkat ke kawasan Asean setelah adanya AFTA. Dengan demikian jika SDM lokal tidak unggul, maka akan terjadi migrasi pekerja dari luar negeri (ekspatriat).



BAB IV PEMBAHASAN

A. Perkembangan Ketenagakerjaan

Provinsi Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia, luas wilayah Provinsi Bali dapat dikatakan relatif kecil yaitu hanya 5.636,66 km². Pemerintah Daerah Provinsi Bali terdiri dari 9 kabupaten/kota, 56 pemerintahan tingkat kecamatan, 686 pemerintahan tingkat desa, serta sekitar 4.317 pemerintahan setingkat dusun atau banjar.

Tabel.1. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2008 (Agustus)	2010 (Februari)
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	726.287	673.928
Pertambangan dan penggalian	12.180	7.150
Industri pengolahan	263.331	304.728
Listrik, gas dan air	7.760	6.807
Bangunan	140.102	123.421
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	481.818	472.840
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	92.742	86.399
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	45.454	53.087
Jasa kemasyarakatan	260.056	312.977
Total Penduduk Bekerja di Provinsi Bali	2.029.730	2.041.337

Sumber: BPS (2009) dan Depnakertrans (2010)

Penduduk Bali pada tahun 2004 berjumlah 3.179.918 jiwa tetapi sebaran penduduknya tidak merata. Beberapa kabupaten di Bali seperti Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem, Bangli dan Tabanan memiliki tingkat kepadatan di bawah 500 jiwa per km². Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki kepadatan penduduk tinggi di antaranya adalah Kota Denpasar sebesar 3.599,17 jiwa per km², Kabupaten Gianyar sebesar 1.029,90 jiwa per km²,

Kabupaten Badung sebesar 852,93 jiwa per km², dan Kabupaten Klungkung sebesar 539,97 jiwa per km². Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi masih berada di beberapa daerah tertentu seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung.¹⁸ Kemudian di tahun 2010 jumlah penduduk Bali meningkat menjadi 3.891.428 jiwa¹⁹ dengan pola sebaran yang relatif tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Sebaran penduduk dilihat dari konsentrasi kegiatan ekonomi berdasarkan pendekatan daerah memberikan dampak partisipasi angkatan kerja dan kondisi tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan data Sakernas 2010, di Provinsi Bali pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja mencapai 2.116.972 jiwa. Dari jumlah tersebut yang sudah bekerja baik formal maupun informal mencapai 2.041.337 jiwa, meningkat dari 2.029.730 jiwa pada tahun 2008. Adapun angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (tingkat pengangguran terbuka) di Provinsi Bali mencapai 75.635 jiwa, meningkat dari 69.543 jiwa di tahun 2008.²⁰ Kondisi ini memperlihatkan pertumbuhan produksi tidak mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja atau terjadi *labor surplus*²¹, yang berarti pula terjadi pengangguran.

Tabel.2. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Lapangan Usaha	2008 (Agustus)	2010 (Februari)
Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis	105.369	111.020
Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	22.538	19.168
Tenaga tata usaha dan yang sejenis	120.585	126.477
Tenaga usaha penjualan	352.395	345.772
Tenaga usaha jasa	136.754	146.836
Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	723.177	667.510
Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar	552.240	597.275
Lainnya	16.672	27.279
Total Penduduk Bekerja di Bali	2.029.730	2.041.337

Sumber: BPS (2009) dan Depnakertrans (2010)

Dilihat dari penduduk yang bekerja tersebut, bagian terbesar mereka bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Namun demikian dilihat perbandingan tahun 2008 dengan tahun 2010, dari jumlahnya

18 (<http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=2&no=1010401&idrb=21&prop=51>, diakses 16 Oktober 2010).

19 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat per Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2010 (Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2010).

20 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali Dalam Angka Tahun 2009, dan (<http://pusdatinaker.balitgo.depnakertrans.go.id/?section=pt&province=17&period=2010-02-01#gotoPeriod>, diakses 16 Oktober 2010).

21 Nobb dan Hopkins, loc. cit.

mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya (lihat tabel.1). Tetapi mereka yang bekerja di sektor pengolahan justru memperlihatkan kenaikan. Hal ini sejalan dengan perubahan pada proporsi peran sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Bali menjadi semakin kecil. Tetapi hal ini sebaliknya yang terjadi pada sektor industri pengolahan²², di mana pada tahun 2004 kontribusinya hanya 9 persen dan meningkat menjadi 9,34 persen di tahun 2008.²³

Tabel.3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Lapangan Usaha	2009 (Ribu)	2010 (Ribu)
Berusaha sendiri	327.445	326.937
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	488.184	434.947
Berusaha dibantu buruh tetap	50.839	54.891
Buruh/Karyawan/Pegawai	597.034	639.322
Pekerja bebas di Pertanian	56.774	37.543
Pekerja bebas di Non Pertanian	119.913	126.693
Pekerja tidak dibayar	389.541	421.004
Total Penduduk Bekerja di Bali	2.029.730	2.041.337

Sumber: BPS (2009) dan Depnakertrans (2010)

Dilihat dari jenis pekerjaan, maka tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan tetap bagian yang terbesar (lihat tabel.2). Hal ini sejalan dengan mereka yang bekerja berdasarkan lapangan usaha. Kemudian dilihat berdasarkan status pekerjaan, maka jumlah terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai (lihat tabel 3). Hal ini sejalan dengan semakin besarnya sumbangan sektor industri dalam struktur perekonomian Bali (sumbangan terhadap PDRB) dan penyerapan tenaga kerja.

22 Umumnya industri pengolahan dilakukan pada barang-barang yang didatangkan dari luar Bali. Jadi yang berkembang adalah kegiatan akhir (*finishing*). Hal ini muncul karena tenaga kerja di Bali cukup mahal ketika harus melakukan pekerjaan secara keseluruhan. Misalnya untuk mebel barang didatangkan dari Jepara dan Jawa Timur yang kemudian di Bali dilakukan *finishing*. Wawancara dengan Pejabat Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Bali, 4 Oktober 2010. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara bersama Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 5 Oktober 2010.

23 Biro Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Bali, *Tinjauan Perekonomian Bali 2008* (Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2009).

Tabel.4 Penduduk Bekerja di Sektor Formal dan Informal

Urutan	2005	2006	2007	2008
Formal	671.208	801.818	846.285	647.873
Informal	1.224.533	1.068.470	1.135.849	1.381.857
Total	1.895.841	1.870.288	1.982.134	2.029.730

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2005 dan 2009

Kemudian jika dilihat berdasarkan pendekatan formal dan informal, maka terjadi perubahan/pergeseran dari sektor formal ke informal (lihat tabel. 4). Pergeseran terbesar terjadi dari tahun 2007 ke 2008. Selama kurun waktu 2005-2008 proporsi pekerja di sektor formal menurun dari 36,23 persen menjadi 31,92 persen.

1. Kerenagakerjaan Sektor Industri

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri skala besar dan sedang di Provinsi Bali mengalami penurunan, jika tahun 2003 rata-rata menyerap 71 orang, maka di tahun 2007 menurun menjadi 67 orang. Jika dilihat dari sektor maka pertanian tetap sebagai sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja dan justeru sektor industri pengolahan menunjukkan jumlah yang menurun selama periode 2005-2008 (lihat tabel.6).

Namun dilihat dari produktivitas mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 20.664 menjadi sebesar Rp69.978 pada tahun 2007. Nilai produktivitas sebesar Rp69.978, artinya 1 unit tenaga kerja dapat menghasilkan output sebesar Rp69.978. Sedangkan efisiensi, yang dilihat dari rasio input terhadap output perusahaan industri besar dan sedang di bali selama tahun 2007 adalah sebesar 0,49. Artinya perusahaan besar dan sedang selama tahun 2007 telah menggunakan input sebesar Rp49 untuk menghasilkan Rp100 nilai output. Secara komprehensif indikator tenaga kerja pada sektor industri besar dan menengah disajikan pada tabel.5.

Tabel.5 Indikator Tenaga Kerja Perusahaan Industri Besar dan Seding

Urutan	2003	2005	2007
Rata-Rata Banyaknya Tenaga Kerja per Perusahaan	71	78	67
Rata-Rata Pengeluaran untuk Pekerja per Orang per Tahun	4.860	16.679	11.189
Rata-Rata Nilai Tambah per Tenaga Kerja	20.664	26.016	36.540
Rata-Rata Produktivitas Tenaga Kerja	42.279	55.327	69.978
Efisiensi Produksi	0,52	0,53	0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali Dalam Angka Tahun 2009

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, industri skala besar dan sedang di Provinsi Bali mengalami penurunan, jika tahun 2003 rata-rata menyerap 71 orang, maka di tahun 2007 menurun menjadi 67 orang. Penurunan ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya bahwa terjadi pergeseran dari formal ke sektor informal. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan tentang perkembangan daya serap tenaga kerja pada sektor industri pengolahan yang menunjukkan jumlah menurun selama periode 2005-2008 (lihat tabel.5).

2. Ketenagakerjaan Sektor Perdagangan

Dengan mempergunakan pendekatan perhitungan PDRB, hal menarik dari distribusi PDRB Bali adalah terdapatnya ekspor netto yaitu selisih antara ekspor dengan impor mencapai 25,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi perdagangan barang dan jasa dari Bali ke luar Bali masih lebih besar dibandingkan dengan pembelian barang maupun jasa dari luar Bali. Ini berarti, peran ekspor terhadap pembentukan PDRB Bali lebih besar.²⁴

Perkembangan sektor perdagangan tersebut tidak terlepas dari perkembangannya sektor industri. Produk dari sektor industri, seperti produk garmen yang dihasilkan oleh industri-industri pakaian jadi²⁵ di Bali telah mampu menembus pasar internasional, baik di Benua Asia, Australia, Afrika, Amerika maupun Eropa. Hal ini dapat dilihat dari realisasi ekspor komoditas hasil industri sebesar \$USA 193,8 juta atau sebesar 51,1 persen dari total realisasi ekspor pada Tahun 2006. Dari ekspor hasil industri tersebut sebesar \$USA 172,6 juta atau 89,1 persen²⁶ berasal dari komoditas tekstil dan produk tekstil yang merupakan produksi dari perusahaan garmen.²⁷

24 (<http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=28&no=1010401&idrb=21&prop=5>, diakses 16 Oktober 2010).

25 Namun demikian Bali mulai cemas dengan kehadiran tekstil dari Cina. Sangat beralasan jika Cina banyak mengekspor industri tekstilnya karena kuota produk tekstil Cina dicabut (Sun and Tian, 2009).

26 Menurut pengakuan Pengurus Asephi, seharusnya realisasi ekspor lebih dari itu. Hal ini muncul karena ketidakakuratan pencatatan ekspor. Wawancara dengan Pengurus Asephi, 5 Oktober 2010. Hal yang sama diakui oleh Kadinda Bali, bahwa transaksi ekspor lebih dari apa yang tercatat dalam BPS. BPS biasanya menggunakan data dari Bank Indonesia dimana transaksi ekspor dihitung dari penggunaan LC, padahal LC hanya digunakan pada saat awal perdagangan. Wawancara dengan Pengurus Kadinda Bali, 6 Oktober 2010. Sementara menurut Bank Indonesia, saat ini pencatatan transaksi dengan LC semakin berkurang dan tidak digunakan lagi sebagai dasar penghitungan. Wawancara dengan Peneliti dan Staf Bank Indonesia, 6 Oktober 2010.

27 Wayan GedeSupartha, "Pengaruh Kepemimpinan dan Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Terhadap Disiplin dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Perusahaan Garmen di Kota Denpasar," Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar-Bali (<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/shop/16783/16769>, diakses 17 Oktober 2010).

Tabel.6. Daya Serap Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor (persen)

Sektor	2005	2006	2007	2008
Pertanian	33,60	35,45	36,03	35,78
Industri Pengolahan	16,60	13,40	14,59	12,97
Perdagangan	22,00	21,58	23,33	23,74
Jasa-jasa	14,00	14,49	14,49	12,81
Lainnya	13,80	15,08	15,08	14,70

Sumber: Biro Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Bali, 2009.

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, maka sektor perdagangan menunjukkan persentase yang terus meningkat. Jika pada tahun 2005 adalah 22 persen, maka di tahun 2008 meningkat menjadi 23,74 persen (lihat tabel.6).

3. Perkembangan Pekerja Asing

Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar menjadi tempat utama berkembangnya perusahaan asing di Bali melalui jalur Penanaman Modal Asing (PMA). Di Gianyar sendiri, berdasarkan data di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Bagian Ekonomi Pemkab Gianyar, saat ini ada sekitar 42 buah perusahaan PMA. Sebagian besar dari perusahaan ini dimiliki warga negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sektor yang digarap diantaranya bidang ekspor-impor (kargo), hotel dan restoran, serta perdagangan.²⁸

Untuk mengurus PMA memerlukan proses yang cukup panjang, yaitu: mengajukan permohonan di pemerintah pusat; kemudian dikeluarkan izinnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD); selain izin operasional dari BKPMDD, calon perusahaan asing yang ingin beroperasi juga harus mengurus berbagai perizinan lainnya. Namun demikian, dalam prakteknya proses tersebut mudah untuk dimanipulasi. Begitu juga karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuat banyak warga asing di Bali yang membuka usaha tanpa jalur PMA. Praktek ini dilakukan dengan cara mengatasnamakan isteri atau suami, pembantu, atau teman yang berkewarganegaraan Indonesia sebagai pemilik usaha (pinjam nama) dan juga diatasnamakan. Bahkan, tidak sedikit juga orang asing yang tetap membuka usaha tanpa mengantongi izin apapun. Kondisi ini justru dimaklumi sejumlah pejabat daerah karena menganggap memberi keuntungan.²⁹

28 "Simalakama Maraknya Usaha dan Pekerja Asing di Bali Menjamur, Data Valid Tak Ada," (<http://izin.usahadibali.multiply.com/journal/item/153>, 17 Oktober 2010).

29 *Ibid.*

Tabel.7. Perkembangan Tenaga Kerja Asing Terkait PMA, Tahun 2001-2008

Urutan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rencana	326	384	392	1.467	424	245	256	333
Realisasi	81	185	33	84	24	44	-	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali Dalam Angka Tahun 2009

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Bali, sampai bulan Juli 2010, jumlah tenaga kerja asing (TKA) secara resmi mencapai 1.416 orang. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 1.707 orang. Jumlah TKA terbesar bekerja di sektor perdagangan yaitu sebanyak 480 orang dan berikutnya di perhotelan dan restoran sebanyak 252 orang.³⁰ Jumlah TKA resmi ini terkait dengan kegiatan PMA (lihat tabel.7), di mana setiap pengajuan rencana investasi, yang berikutnya dikeluarkan Izin Prinsip, didalamnya akan memuat tentang kebutuhan tenaga kerja termasuk TKA yang akan dipekerjakan.³¹

B. Kebijakan dan Praktek Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi SDA, SDM dan tepat guna. Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Selain apa yang jelas diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, praktek kebijakan ketenagakerjaan dapat dilihat sebagai aturan ketenagakerjaan yang diberlakukan untuk perusahaan yang berisi tentang pengawasan dinas tenaga kerja terhadap jam kerja di perusahaan, penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di masing-masing perusahaan, pengawasan terhadap keselamatan kerja, dan pelaksanaan tunjangan kesejahteraan sosial bagi karyawan.³² Berdasarkan hal di atas maka kebijakan ketenagakerjaan di Bali saat ini terkait tiga hal yaitu peningkatan

30 Jawaban Tertulis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.

31 Wawancara dengan Pejabat Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Bali, 6 Oktober 2010.

32 Supartha, op.cit.

kompetensi sebagai upaya perluasan penyerapan tenaga kerja, penerapan aspek ketenagakerjaan, dan mempertemukan pengusaha dengan pekerja dalam kerangka hubungan industrial.³³

1. Perluasan Kesempatan Kerja

Tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali mencapai 3,13 persen.³⁴ Alasan penduduk menganggur, salah satunya adalah rendahnya kompetensi yang dimiliki ketika harus terjun ke sektor informal. Dalam hal ini kebutuhan SDM untuk kompetensi industri tidak terpenuhi di Angkatan Kerja.³⁵ Hal ini pula yang mendorong Angkatan Kerja lebih banyak terjun sektor informal.

Dalam kontek tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali fokus terhadap peningkatan kompetensi Angkatan Kerja. Dalam rangka peningkatan kompetensi tersebut Disnakertrans Provinsi Bali mengelola Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK). Berbagai program pelatihan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Namun kondisi yang dihadapi UPT BLK sekarang ini adalah bagaimana membenahi UPT BLK agar dapat mengikuti perkembangan dunia industri. Hal ini terlihat dari media pembelajaran yang menggunakan teknologi yang sudah jarang atau tidak digunakan lagi.³⁶

2. Penerapan Aspek Ketenagakerjaan

Salahsatu kebijakan ketenagakerjaan adalah pemberlakuan upah minimum regional (UMR). UMR sendiri mengalami peningkatan pada tahun 1990-an, dan pada saat itu tren upah menjadi isu penting dalam wacana perekonomian dan lingkungan politik (Manning, 1994). Karena UMR sendiri terjadi sebagai respons terhadap rendahnya tingkat upah. Bagi pemerintah, penentuan upah minimum didasarkan atas kebutuhan fisik minimum yang dilakukan sejak adanya kebijakan upah minimum tahun 1956, dan mulai tahun 1996 didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (Sumhudi, 2002:iv). Meskipun begitu penentuan UMR tersebut tidak hanya berdasarkan kebutuhan fisik atau hidup saja tetapi juga didasarkan pada indeks harga konsumen, upah regional,

33 Wawancara dengan Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 5 Oktober 2010.

34 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. *Bali Dalam Angka Tahun 2009* (Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2010).

35 Wawancara dengan Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 5 Oktober 2010.

36 *Ibid.*

perkembangan ekonomi nasional dan regional, kemampuan perusahaan, dan atas dasar kesempatan kerja (Murni dan Wiranta, 2001;235). UMR ini biasanya ditetapkan oleh peraturan kepala daerah.

Tabel.8. Upah Minimum Di Provinsi Bali dan Beberapa Daerah Lainnya Tahun 2009 dan 2010 (dalam rupiah)

Kabupaten/Kota	2009	2010
Kabupaten Badung	950.000	1.100.000
Kabupaten Bangli	769.500	829.500
Kabupaten Buleleng	765.000	830.000
Kabupaten Gianyar	842.500	925.000
Kabupaten Jembrana	812.500	875.000
Kabupaten Karangasem	815.606	875.800
Klungkung	767.000	835.000
Kabupaten Tabanan	777.000	854.500

Sumber: Depnakertrans (2010) dan <http://www.hrcentro.com/umr>

UMR Provinsi Bali pada tahun 1996 adalah Rp127.500 kemudian tahun 2000 meningkat menjadi Rp 202.300 (Saefuloh, 2002), dan meningkat lagi menjadi Rp447.500 pada tahun 2005. Perkembangan terakhir adalah Rp829.316.³⁷ Adapun perkembangan upah minimum kota/kabupaten disajikan pada tabel 8. Dilihat dari besar upah minimum kota/kabupaten, maka upah minimum tertinggi adalah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, kemudian berikutnya tertinggi di Kabupaten Gianyar. Ketiga daerah tersebut memiliki upah minimum yang tinggi karena daerah-daerah tersebut merupakan konsentrasi kegiatan ekonomi Bali.

Dilihat dari segi upah secara umum pada sektor industri pengolahan termasuk rendah dibandingkan dengan sektor lainnya, misalkan untuk sektor listrik, gas dan air. Jika dibandingkan dengan upah minimum maka upah tersebut masih jauh dibawah upah minimum, hanya upah di lapangan usaha keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan yang mendekati upah minimum. Upah secara umum pada sektor perdagangan (Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel) termasuk sedang. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri (lihat tabel.9).

³⁷ Jawaban Tertulis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.

Tabel.9. Upah Menurut Lapangan Usaha (dalam rupiah)

Lapangan Usaha	2008 (Agustus)	2010 (Februari)
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	632.215	537.740
Pertambangan dan penggalian	624.006	166.304
Industri pengolahan	753.701	386.154
Listrik, gas dan air	1.913.757	0
Bangunan	966.887	638.156
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	1.080.738	710.793
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	1.906.644	484.618
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	1.194.886	972.842
Jasa kemasyarakatan	1.512.671	1.360.195
Upah Provinsi Bali	1.129.280	853.481

Sumber: Depnakertrans (2010)

Pemberlakuan UMR di Bali sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan indikator yang menjadi dasar pertimbangan penetapannya. Begitu pula penerapan UMR tidak menimbulkan permasalahan.³⁸ Hal ini ditandai dengan jarang sekali terjadi perselisihan industrial karena permasalahan UMR.³⁹ Bagi kinerja perekonomian Bali ini sangat menguntungkan karena memperlihatkan iklim yang kondusif bagi daya tarik investasi.

Selain kebijakan upah minimum, juga pengawasan oleh Disnakertrans Provinsi Bali terhadap pelaksanaan jaminan asuransi tenaga kerja dan keselamatan kerja. Meskipun harus diakui pelaksanaan oleh pelaku usaha belum optimal.⁴⁰ Bahkan untuk pelaksanaan jaminan asuransi tenaga kerja, sebagai contoh di kabupaten Badung sampai dengan Juli 2010 baru 10 persen tenaga kerja yang terproteksi Jamsostek.⁴¹

3. Hubungan Industrial

Pekerja/buruh di Bali secara organisasi mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam pengorganisasiannya pasca berlakunya UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Terbukti dengan munculnya beberapa serikat pekerja yang baru. Sampai dengan tahun 2010 terdapat 459 serikat pekerja.⁴²

³⁸ Wawancara dengan Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 5 Oktober 2010.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Bali Post. "Di Badung Baru 10 Persen Naker Terproteksi Jamsostek." 8 Oktober 2010.

⁴² Jawaban Tertulis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.

Dilihat dari karakteristiknya, serikat pekerja di Provinsi Bali termasuk bukan serikat pekerja yang radikal. Hal ini ditandai dengan hampir tidak adanya aksi-aksi pemogokan atau demonstrasi.⁴³ Kondisi ini juga sangat memudahkan Disnakertrans dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan.⁴⁴

Keadaan di atas, merupakan tantangan tersendiri bagi serikat-serikat pekerja tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi anggotanya masing-masing. Pembinaan, pembelaan, advokasi kebijakan publik dan membangun jaringan antar serikat sudah cukup baik. Dalam rentang waktu hampir sembilan tahun serikat pekerja juga mengalami pasang surut, utamanya dalam permasalahan pengkaderan pengurus serikat baik di tingkat perusahaan dan tingkat kepengurusan di atasnya. Selain itu juga ada permasalahan interaksi antar serikat yang masih terbelenggu pada "romantisme" masa lalu sehingga komunikasi yang diharapkan dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh di Bali menjadi buntu. Kebebasan berserikat pun juga belum mampu memberikan kesempatan terhadap pekerja yang ada di Bali. Begitu juga masih banyak pekerja dalam suatu perusahaan yang belum berserikat. Pekerja akan berusaha secara mandiri menghadapi permasalahan yang meskipun pada akhirnya terjebak pada rumitnya proses penyelesaian hubungan industrial.⁴⁵

C. Mendorong Ketenagakerjaan Pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan

1. Mendorong Sektor Pariwisata

Perkembangan sektor industri dan perdagangan tidak terlepas dari perekonomian Provinsi Bali yang dibangun melalui keunggulan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata ini dikarenakan sesungguhnya Provinsi Bali tidak memiliki SDA yang bisa diandalkan untuk dieksplorasi guna membangun ekonomi daerah. Hal ini mengakibatkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pariwisata bersama-sama memperkuat perekonomian Provinsi Bali.⁴⁶ termasuk pengembangan industri yang keluarannya digunakan bagi sektor pariwisata.

43 Wawancara dengan Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, 5 Oktober 2010.

44 *Ibid.*

45 "Forum Komunikasi Pekerja Bali," (<http://forumkomunikasipekerjabali.blogspot.com/>, diakses 16 Oktober 2010).

46 Wawancara dengan Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali, 5 Oktober 2010.

Penjelasan diatas didukung oleh studi Dwikarini di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 1997 sampai dengan 2006 memperlihatkan bahwa elastisitas kesempatan kerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan angka negatif artinya penambahan output pada sektor ini hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi tenaga kerja pada sektor tersebut. Tetapi karena pariwisata sebagai salah satu subsektor dari sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang dapat memberikan efek multiplier terhadap sektor ekonomi yang lain. Dampak langsungnya adalah perubahan yang terjadi pada industri pariwisata, yang berkaitan langsung dengan pengeluaran wisatawan. Dampak tidak langsungnya adalah ada pada penjualan, pendapatan, atau kesempatan kerja dari sektor yang tidak berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Karena itu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tanpa harus menurunkan produktivitas tenaga kerja adalah dengan tetap menjaga pertumbuhan output sektor tersebut untuk tetap tumbuh lebih tinggi dari laju pertumbuhan kesempatan kerjanya.⁴⁷ Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali antara lain meningkatkan jumlah investasi pada sektor pariwisata khususnya investasi PMDN. Perlunya peningkatan pada sektor PMDN dikarenakan kegiatannya masih terbatas dan lebih memberikan sisi positif bagi penyerapan tenaga kerja dan akan mendorong berkembangnya wisatawan domestik.

2. Mendorong Sektor UMKM

Berdasarkan data per-Oktober 2006 jumlah UMKM terbagi menjadi usaha informal dan usaha formal sebesar 179.700 unit usaha. Usaha informal sebanyak 144.455 unit usaha (80,39 persen) dan usaha formal 35.246 unit usaha (19,61 persen). Lebih lanjut usaha formal dan informal dibagi ke dalam sektor usaha perdagangan, industri pertanian, industri non-pertanian serta aneka jasa pada setiap kabupaten/kota di Bali. Pada kategori ini tidak menggolongkan menjadi usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagian besar usaha formal dan informal tersebut bergerak di sektor perdagangan 46,32 persen. Pengolah hasil pertanian (industri pertanian) sebesar 13,18 persen dan sektor industri non-pertanian sebesar 26,87 persen, sedangkan pada sektor aneka jasa 13,63 persen. Struktur tenaga kerja yang digunakan oleh UMKM berdasarkan jenis kelamin

⁴⁷ Ni Made Labha Dwikarini, "Analisis Prioritas Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karangasem Tahun 1997-2006," 11 Februari 2009 (<http://dwikarinimade.blogspot.com/2009/02/analisis-prioritas-sektoral-penyerapan.html>, diakses 16 Oktober 2010).

menunjukkan 51,03 persen laki-laki dan 48,97 persen perempuan. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja laki-laki yang dibayar 51,65 persen sedangkan tenaga kerja perempuan yang dibayar 48,35 persen. Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar (46,63 persen) adalah lulusan SLTA ke atas. Kemampuan sektor UMKM menyerap tenaga kerja di Bali, berdasarkan data⁴⁸ BPS Bali 2005, diketahui bahwa setiap unit usaha UMKM dapat menyerap rata-rata 3 orang tenaga kerja. Dari jumlah angkatan kerja di Bali 2005 (Sakernas) sebesar 2.002.171 orang maka daya serap tenaga kerja oleh UMKM di Bali 26,93 persen.⁴⁹

Kemudian berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM di Provinsi Bali menunjukkan jumlah yang signifikan, antara lain jumlah koperasi berjumlah 3.968 unit, sedangkan jumlah UMKM adalah 227.609 unit. Dari jumlah UMKM tersebut terdiri dari sektor perdagangan 97.520 unit, sektor industri pertanian 58.166 unit, sektor non pertanian berjumlah 45.590 unit dan sektor aneka jasa sebesar 29.333 unit.⁵⁰

Karena begitu besar potensi UMKM, maka peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekarang ini fokus terhadap pemberdayaan UMKM. Namun kendala yang dihadapi oleh UMKM ini adalah kualitas SDM terutama di bidang manajemen, kewirusahaan dan Penguasaan Teknologi Informasi, kemampuan dalam mengakses pasar, serta kemampuan dalam mengakses sumber permodalan.⁵¹ Di samping itu masalah klasik yang dihadapi oleh UMKM, seperti perajin adalah kontinuitas dan mutu. Padahal tuntutan order dari pembeli adalah rutin dan berkualitas. Kontinuitas ini penting ketika sasaran pasar lebih luas baik domestik maupun asing. Namun ketika pasar tersebut luas, perajin hanya mampu mempekerjakan perajin lainya dengan angka terbatas. Begitu juga perajin kesulitan memproduksi barang yang berkualitas berarti kualitas produksi harus standar dan sesuai dengan keinginan konsumen, padahal perajin di Bali memiliki karakter yang sama yaitu cenderung memproduksi produk sesuai dengan selera sendiri.⁵²

48 Memang sulit memastikan jumlah KUKM, karena BPS sendiri tidak memiliki data pasti, dan juga tidak ada survei tentang KUKM. Wawancara dengan Pejabat BPS Provinsi Bali, 4 Oktober 2010. Begitu juga Kadinda Bali meragukan keakuratan data UKM yang ada di Bali. Wawancara dengan Pengurus Kadinda Bali, 6 Oktober 2010.

49 "Sistem Informasi Pengembangan usaha Kecil," (<http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=2&no=1010402&idrb=21&prop=51>), diakses 16 Oktober 2010).

50 Wawancara dengan Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 5 Oktober 2010.

51 Ibid.

52 Bisnis Bali, "Mutu dan kontinuitas Kendala Klasik yang Dihadapi Perajin," 9 Oktober 2010.

Berhadapan dengan hal di atas, pengembangan UMKM sekarang ini ditujukan pada pengembangan SDM melalui berbagai kegiatan pembinaan, termasuk berbagai pelatihan dalam bidang manajemen, kewirusahaan dan Penguasaan Teknologi Informasi. Meskipun anggaran untuk pembinaan dalam dua tahun terakhir ini mengalami penurunan, karena prioritas APBD ditujukan pada program pengentasan kemiskinan, peningkatan anggaran pendidikan, dan kesehatan.⁵³

Namun di sisi lain terdapat faktor pendorong bagi pengembangan UMKM di Bali yaitu beragamnya potensi yang ada meliputi: komitmen pemerintah daerah untuk membina dan mengembangkan unit usaha UMKM melalui berbagai kebijakan; budaya masyarakat Bali dikenal sebagai pekerja ulet/pekerja keras serta jujur; semakin berkembangnya lembaga keuangan di Bali baik yang berskala lokal seperti LPD, BPR, Koperasi serta organisasi yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan, maupun lembaga keuangan yang berskala nasional dan internasional.⁵⁴ Sebagai sebuah contoh, dari berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Pemkot Denpasar dalam membantu permodalan UMKM mendapatkan apresiasi positif oleh berbagai kalangan termasuk perbankan seperti Bank Windu yang berkantor pusat di Jakarta.⁵⁵ Begitu juga dengan koperasi di mana sudah terjadi pergeseran jika dulu dibentuk oleh kelompok orang tak mampu, tapi sekarang dibentuk oleh kalangan berduit.⁵⁶ Kondisi ini menjadikan koperasi akan semakin mudah berkembang tanpa tergantung pada akses perbankan.

53 Wawancara dengan Pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 5 Oktober 2010.

54 Wawancara dengan Pejabat Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Bali, 4 Oktober 2010.

55 Bisnis Bali, "UMKM di Denpasar Kian Dilirik," 9 Oktober 2010.

56 Bisnis Bali, "Keanggotaan Koperasi mulai Bergeser," 9 Oktober 2010.

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa telah terjadi perubahan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ke sektor lainnya terutama industri dan perdagangan. Begitu juga telah terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal.

Perkembangan sektor industri menunjukkan sumbangan yang semakin penting pada PDRB Bali meskipun sumbangan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Tetapi sektor perdagangan menunjukkan perubahan yang sejalan antara sumbangan terhadap PDRB dengan penyerapan tenaga kerjanya.

Kebijakan ketenagakerjaan di Bali saat ini terkait tiga hal yaitu peningkatan kompetensi, penerapan aspek ketenagakerjaan, dan mempertemukan pengusaha dengan pekerja. Penerapan kompetensi dilakukan dengan mengoptimalkan UPT BLK. Adapun penerapan aspek ketenagakerjaan dilakukan dengan penerapan upah minimum dan pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi tenaga kerja dan keselamatan kerja. Sedangkan dilihat dari Serikat Pekerja di Bali, keberadaannya membantu terhadap penciptaan kondisi kondusif bagi perkembangan sektor industri dan perdagangan, karena Serikat Pekerja di Bali termasuk tidak radikal.

Sekarang ini usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan perdagangan adalah dengan meningkatkan kinerja sektor pariwisata dengan harapan akan mendorong peningkatan sektor industri dan perdagangan.

B. Rekomendasi

Program Legislasi Nasional Tahun 2010 di mana terdapat 2 RUU yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan perekonomian yaitu sektor yang berkaitan dengan industri dan perdagangan. Dalam Prolegnas tersebut DPR RI telah memutuskan untuk mereformasi kebijakan di sektor industri dan perdagangan melalui RUU Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan RUU tentang Perdagangan.

Persoalan pembenahan SDM di bidang perindustrian melalui pengaturan masalah SDM sebagai salah satu muatan dari RUU Perindustrian, melalui pengaturan bahwa:

1. Pengembangan industri perlu ditujukan pada perluasan kesempatan kerja yang dikaitkan dengan pengembangan UMKM.
2. Perlu adanya perencanaan pengembangan SDM baik pada level nasional, regional maupun lokal dalam kebijakan pengembangan industri.

Sedangkan persoalan pembenahan SDM di bidang perdagangan melalui pengaturan masalah SDM sebagai salah satu muatan dari RUU Perdagangan, melalui pengaturan bahwa:

1. Pengaturan perdagangan bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja langsung maupun tidak langsung. Keterkaitan langsung dilakukan melalui kegiatan perdagangan, sedangkan tidak langsung melalui pengembangan sektor industri.
2. Pengaturan tentang peran pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengembangan SDM melalui kegiatan pembinaan dan pendidikan dan pelatihan dalam manajemen keuangan dan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Drucker, Peter F. *The New Realities: In Government and Politics/In Economics and Business/In Society and World View*. New York: Harper&Row Publisher, In., 1989.
- Ehrerberg, Ronald. E and Robert S.Smith. *Modern Labor Economics, Theory and Public Policy*. Sixth Edition. Addison-Wesley Educational Publisher, Inc, 1996.
- McConnell, Campbell, Stanley L.Brue and David A. Macpherson. *Contemporary Labor Economic*. New York: McGraw Hill, International Edition, 2006.
- Nobb, Jack dan Ian Hopkins. *Economics, A Core Text*. Fouth Edition, McGraw-Hill International, United Kingdom, 1995.
- Jeffrey Pfeffer. *Keunaggulan Bersaing Melalui Manusia (Competitive Adavantage through People)*. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Porter, Michael E. *The Competitive Advantage of Nations: With A New Introduction*. New York: Simons&Schuster Inc., 1998.
- Rutkowski, Jan dan Marcin Przybla. "Poland: Regional Dimensions of Unemployment." *Labor, Employment and Social Policies in the EU: Enlargement Process, Changing Perspectives and Policy Option*. ed, Bernard Funck dan Lodovico Pizzati, The International Bank for Reconstruction and Development/The Worl Bank, 2002.

Dokumen

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. "Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat per Kabupaten/Kota Provinsi Bali." Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2010.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. "Bali Dalam Angka Tahun 2009." Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2009.

Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Bali. "Tinjauan Perekonomian Bali 2008." Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2009.

Badan Pusat Statistik Pemerintah Provinsi Bali. "Tinjauan Perekonomian Bali 2005." Denpasar: BPS Provinsi Bali, 2006.

Jawaban Tettulis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Bali, 2010.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Jurnal

Bhattacharyya, Ranajoy, and Avijit Mandal. "Estimating the Impact of the Indo-ASEAN FreeTrade Agreement on India's Balance of Trade." *Journal of Global Analysis*, Vol: 1 Issue: 1, 2010, pp.07-25.

Karim, Mohd Zaini Abd and Yusairi Othman. "Does AFTA and China's Entry Into WTO Affect FDI inASEAN Countries?" *Asian Academy of Management Journal*, Vol: 10, Issue: 1, 2005, pp.37-58.

Gutler, Zafer, Gulistan Erdal, Hilmi Erdal and Adnan Cicek. "The Effects of Free Trade Agreement on Intra-Industry Trade (A Case Study of Textile Sector in Turkey)." *Journal of Applied Sciences*, Vol: 6 Issue: 5 Pages/record, 2006, pp.1204-1208.

Manning, Chris. "What Has Happened to Wages in the New Ordet?" *Bulletin of Indonesian Economics Studies*. 30(3), Desember 1994, pp.73-114.

Murni, Yanti dan Sukarna Wiranta. "Kebijakan Penentuan Upah Regional : Kasus Pada Industri Manufaktur." *Kajian*. 6(2), Juni 2001.pp.233-250.

Roxana, Nae Tatiana."Competitive and Unit Labour Cost in Romania." *Economic Science*, Vol: 2 Issue: 1, 2009, pp.444-450.

Saeifuloh, A. Ahmad. "Pengaruh Upah Minimum dan Struktur Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia." *Kajian*, 6(4), Desember 2002.

Sun, Wenzhuan, Junying Tian and Junying Tian. "Under the New Situation of the Textile Economy." *International Business Research*, Vol: 2 Issue: 2, 2009, pp.202-207.

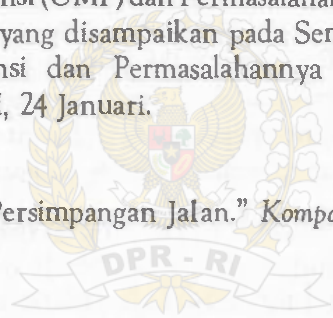
Makalah

Adam, Latief. "Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Perdagangan." makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari tentang Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Perdagangan, di Pusat Pengkajian, Pengolahan data dan Informasi DPR RI, tanggal 10 Agustus 2010.

Sumhudi, Aslam. 2002. "Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Permasalahannya: Kasus UMP 2002 DKI Jakarta." Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari tentang Upah Minimum Propinsi dan Permasalahannya yang diselenggarakan oleh Komisi VIII DPR-RI, 24 Januari.

Artikel dalam Surat Kabar

Kuncoro, Mudrajad. "Industri Indonesia di Persimpangan Jalan." *Kompas*, 19 Februari 2005.



Berita Surat Kabar

Bali Post. "Di Badung Baru 10 Persen Naker Terproteksi Jamsostek." 8 Oktober 2010.

Bisnis Bali. "Mutu dan kontinuitas Kendala Klasik yang Dihadapi Perajin." 9 Oktober 2010.

Bisnis Bali. "UMKM di Denpasar Kian "Dilirik." 9 Oktober 2010.

Bisnis Bali. "Keanggotaan Koperasi mulai Bergeser." 9 Oktober 2010.

Internet Karya Individual

Damanhuri, Didin S. "SDM Indonesia dalam Persaingan Global." (<http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/ekonomi/eko61.htm>, diakses 27 Desember 2010).

Dwikarini, Ni Made Labha. "Analisis Prioritas Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Karangasem Tahun 1997-2006." 11 Februari 2009 (<http://dwikarinimade.blogspot.com/2009/02/analisis-prioritas-sektoral-penyerapan.html>, diakses 15 Oktober).

Rajar, Sana Saleh and Asadullah Shah. "The Challenges of Globalization and The Role of Human Resources." (<http://www.usa.edu.pk/Web/Publications/PDF/globalization%20n%20role%20of%20HRM.pdf?m=8>, diakses 27 Desember 2010).

Supartha, Wayan Gede. "Pengaruh Kepemimpinan dan Kebijakan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Terhadap Disiplin dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Perusahaan Garmen di Kota Denpasar." Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar-Bali (<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/shop/16783/16769>, diakses 15 Oktober).

Syachroni, Tanti. "Manufaktur : Peluang & Tantangan di Era CAFTA (China-Asean Free Trade Agreement)." makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Penyiapan SDM Industri Manufaktur: Peluang dan Tantangan Era CAFTA yang diselenggarakan Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (TK FTI UII), 17 Februari 2010 (http://fii.uui.ac.id/media/CAFTA_pismagroup.pdf, diakses 8 Maret 2010).

Tambunan, Tulus. "Pengkajian Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Indonesia." Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti, 2008 (<http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2928-16062008.pdf>, diakses 17 Oktober).

Internet Karya Non Individual

"Forum Komunikasi Pekerja Bali." (<http://forumkomunikasipekerjabali.blogspot.com/>, diakses 15 Oktober).

(http://bali.bps.go.id/pressrelease/BRS_Industri_08_2010.pdf, diakses 16 Oktober 2010).

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diakses 27 Desember 2010).

(<http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/>, diakses 16 Oktober 2010).

(<http://www.bi.go.id/sipuk/id/>, diakses 16 Oktober 2010).

"Indonesia Tidak Siap Hadapi "Persaingan"." 2 Desember 2010 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/02/09125588/Indonesia.Tidak.Siap.Hadapi..quot.Persaingan.quot.>, diakses 27 Desember 2010).

"Informasi Upah Minimum Regional, Tahun 2009, 2010."(<http://allows.wordpress.com/2009/01/12/informasi-upah-minimum-regional-umr/>, diakses 15 Oktober).

"Laporan Akhir Tahun: Industri, Hambatannya Masih Sama." 28 Desember 2010 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/28/11002592/Industri.Hambatannya.Masih.Sama>, diakses 27 Desember 2010).

- "Nilai ekspor Bali 53,58 juta dolar AS." ([http://ekonomi.tvone.co.id/berita /view/33132/2010/02/15/nilai_ekspor_bali_5358_juta_dolar_as/](http://ekonomi.tvone.co.id/berita/view/33132/2010/02/15/nilai_ekspor_bali_5358_juta_dolar_as/), tanggal 28 Juli 2010).
- "Perdagangan Bebas ASEAN-Cina." 25 Juni 2010 (http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/06/100625_acftahalaman.shtml, diakses 27 Desember 2010).
- "Perdagangan Bebas: Serbuan Produk Impor Matikan Industri Nasional." 17 Desember 2010 (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=268543>, diakses 27 Desember 2010).
- "Simalakama Maraknya Usaha dan Pekerja Asing di Bali Menjamur, Data Valid Tak Ada." 28 Juni 2010 (<http://izinusahadibali.multiply.com/journal/item/153>, diakses 15 Oktober).
- "Sistem Informasi Pengembangan usaha Kecil." (<http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=2&no=1010402&idrb=21&prop=51>, diakses 15 Oktober).

Sumber Informan

1. Pejabat Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Bali.
2. Pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pejabat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Pemerintah Provinsi Bali.
5. Pejabat Badan Pengembangan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Bali.
6. Peneliti dan Staf Bank Indonesia Provinsi Bali
7. Staf Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
8. Pengurus Asosiasi Eksportir dan Produsen *Handycraft* Indonesia (Asephi) Provinsi Bali.
9. Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bali.



BAGIAN 3

PERDAGANGAN BEBAS DAN PARIWISATA: PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA DI PROVINSI BALI

*Suhartono**

* Peneliti Bidang Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan bebas menjadi sorotan publik, khususnya pelaku usaha dalam negeri, seperti protes yang disampaikan oleh Asosiasi Industri dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan¹. Protes tersebut terkait dengan tingginya kegiatan impor barang dari Cina sejak pemberlakuan *Asean China Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA merupakan wujud dari kesepakatan regional mengenai perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang identik dengan berkurang atau dihapuskannya hambatan tarif dan non tarif diyakini oleh kelompok yang mendukungnya sebagai jalan menyejahterakan masyarakat dunia, karena dengan perdagangan bebas setiap orang akan memperoleh produk yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau dan volume yang memadai. Perdagangan bebas juga diyakini menyebabkan barang bergerak dan berpindah berdasarkan titik keseimbangan yang optimum dari resultante antara permintaan dan penawaran. Masing-masing negara juga akan terspesialisasi dalam perdagangan internasional berdasarkan keunggulan komparatif, dimana memproduksi barang sesuai dengan efisiensi tertinggi dibanding dengan negara lainnya.

Dalam konteks perdebatan kerugian dan keuntungan atau yang menjadi tujuan terbentuknya sistem perdagangan bebas, provinsi Bali memiliki keunikan tersendiri terhadap polemik seputar dampak dari perdagangan bebas. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Ekspor Disperindang Bali², bahwa pariwisata telah meningkatkan volume perdagangan internasional Bali. Salah satunya berasal dari barang bernilai seni hasil dari seniman atau pengrajin Bali. Dari perspektif ini Bali termasuk provinsi yang berpandangan

1 Abeng, Emil, "ACFTA, antara Harapan dan Realitas" diunduh dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/acfta-antara-harapan-dan-realitas/>.

2 <http://202.134.4.124/news/item/bali-tourism-boost-foreign-trade>.

positif terhadap perdagangan bebas, karena berhubungan erat dengan aktivitas pariwisata.

Walupun demikian, secara fakta dampak perdagangan bebas terutama merujuk kepada perjanjian Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) yang berlaku tahun 2010 memiliki dampak tersendiri terhadap Provinsi Bali. Hal ini bisa dilihat dari data pada tahun 2007 sebelum berlaku ACFTA, perdagangan Bali-Cina bernilai surplus bagi Bali. Menurut laporan Bank Indonesia perwakilan Bali antara Januari – Agustus 2007 terdapat surplus US\$3,8 juta antara Bali dengan Cina termasuk Hongkong³.

Sedangkan menurut keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Bali⁴, selama tahun 2010 telah terjadi defisit dalam perdagangan Cina-Bali. Realisasi ekspor Bali terdiri atas aneka barang kerajinan, hasil industri kecil, ikan dalam kemasan kaleng, pakaian jadi termasuk hasil perikanan laut hanya bernilai US\$1,3 juta selama Januari-September 2010. Impor dari China pada triwulan III 2010 bernilai US\$22,6 juta dari US\$64,9 juta impor periode itu. Khusus impor dari Cina tersebut terdapat kenaikan sebesar 266 persen jika dibandingkan triwulan II 2010 yang hanya US\$6,1 juta.

Walaupun mengalami defisit dalam pandangan Gubernur Bali, peningkatan perdagangan memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Bali, karena defisit dari perdagangan dengan Cina lebih didominasi oleh komoditas utama untuk membangun perekonomian masyarakat Bali seperti antara lain kapal laut, bangunan terapung, mesin-mesin mekanik, peralatan listrik, perhiasan/permata, serta benda-benda dari besi dan baja. Bali tidak terlalu mempermasalahkan realisasi impor bertambah terus karena komoditas itu adalah barang-barang produksi yang akan mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari gambaran di atas Bali menjadi wilayah penting adanya integrasi atau hubungan yang erat antara kegiatan ekonomi pembangunan wilayahnya dengan perdagangan. Hal tersebut terbentuk karena struktur ekonominya tumbuh diatas potensi pariwisata, sehingga memiliki sudut pandang tersendiri terhadap berlakunya perjanjian perdagangan pasar bebas. Perspektif positif dari pemerintah Bali terhadap perkembangan perdagangan di wilayahnya menjadi perhatian untuk mengetahui bagaimana pemerintah Bali mengelola perdagangan di wilayahnya, sehingga memiliki pemikiran yang positif terhadap

3 "surplus-perdagangan-bali-china" diunduh dari <http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/surplus-perdagangan-bali-china-qiauj9.html>.

4 "Volume Perdagangan Bali-China Meningkat" diunduh dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/11/181072/129/101/Volume-Perdagangan-Bali-China-Meningkat>.

perdagangan bebas khususnya dalam konteks berlakunya ACFTA. Bila dari sisi neraca terdapat defisit, bagaimana defisit dikelola untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas yang notabeneanya diputuskan oleh pemerintah pusat. Selain itu penting mengelaborasi hubungan antara pariwisata dengan perdagangan, karena Bali memiliki wilayah pasar yang unik dimana menjadi titik penting pertemuan antara produsen dengan produknya dan pembeli atau konsumen dari mancanegara.

B. Perkembangan Pemikiran Perdagangan Antar Negara

Pemikiran mengenai perdagangan antar negara dikembangkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*. Walaupun pada saat bersamaan terdapat karya lain yang secara spesifik mengupas perdagangan dan pemerintah (*Government and Commerce*) karya Abbe de Condillac, tetapi *wealth of nations* menjadi referensi utama pengembangan lebih jauh konsep perdagangan antar negara. Menurut Baghwaty karya Adam Smith menginspirasi sejumlah teoritis perdagangan termasuk model-model yang dikembangkan oleh David Ricardo⁵. Model David Ricardo menggambarkan bagaimana bekerjanya satu variabel faktor produksi dalam proses produksi dua barang dengan asumsi tingkat produktivitas tenaga kerja konstan dari dua negara yang memiliki tingkat produktivitas relatif, dan kedua negara yang terlibat perdagangan diasumsikan memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut. Model ini menjelaskan bahwa keberlanjutan perdagangan tersebut ditentukan oleh margin/keuntungan, dimana berlaku hukum pasar bebas yaitu harga (keseimbangan antara *supply and demand*) menentukan alokasi sumber.

Pandangan ini sendiri menurut Baghwaty memiliki kelemahan, ketika terjadi *market failure* (distorsi), maka perdagangan bebas bukan kebijakan terbaik, sebaliknya kebijakan tersebut dapat membahayakan dibanding bermanfaat. Pasar bebas tidak serta merta mendatangkan keuntungan ketika terdapat distorsi pasar seperti adanya praktek monopoli dan pemberlakuan tarif impor secara diskriminatif. Salah satunya sering dipraktekkan oleh negara berkembang saat menerapkan kebijakan *infant industry*, yaitu dengan memproteksi industrinya yang baru tumbuh sebagai bagian dari *substitution import strategy* (yaitu strategi memproduksi barang impor untuk kebutuhan domestik, selanjutnya dikembangkan untuk kebutuhan ekspor). Tujuannya untuk menciptakan kekuatan industri dalam negeri yang monopolistik, sehingga skala ekonomi dari industri tersebut dapat lebih cepat tercapai dan

5 Bhagwati, Jagdish N. 2002, *Free Trade Today*, Princeton University Press, hal.1.

mampu melakukan kompetisi dengan industri dari negara yang sudah maju. Akibatnya alokasi sumber produksi (modal, bahan baku, pekerja) tidak dapat berjalan sesuai hukum pasar, tetapi ditentukan oleh kebijakan pemerintah (*invisible hand*).

Dalam pemikiran ekonomi sendiri, titik *trade off supply and demand* merupakan faktor penting yang mempengaruhi aktivitas perdagangan. Pada sisi supply/produsen dipengaruhi oleh variabel kemampuan produsen memproduksi barang dengan efisiensi. Efisiensi dapat dalam bentuk proses produksi yang singkat dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dan distribusi yang efisien juga. Dengan efisiensi tersebut produsen berharap dapat menekan biaya, sehingga produsen lebih besar perannya dalam menentukan harga produk yang sampai di tangan konsumen. Perdagangan antar negara terjadi ketika masing-masing negara mengembangkan produk yang berbeda sehingga menciptakan permintaan dan penawaran antar negara atas dasar perbedaan barang yang diproduksinya. Perdagangan antar negara tidak hanya terjadi karena adanya perbedaan produk (*comparative advantage*) saja, tetapi juga berkembang ketika terjadi perbedaan efisiensi produk (*competitive advantage*) dalam proses produksi dan distribusi. Perbedaan produk dan perbedaan efisiensi dan nilai kompetisi tersebut mengisi celah permintaan dan penawaran dari satu negara dengan negara lainnya.

Di dalam sistem perdagangan yang proteksionis ataupun semi proteksionis, peran pemerintah cukup besar dengan sejumlah kewenangan seperti pemberlakuan tarif impor, kuota impor, kontrol lalulintas perdagangan, syarat kandungan lokal dan perakitan produk. Menurut Krugman⁶, kebijakan proteksi membutuhkan peran pemerintah yang cukup besar dalam pelaksanaannya dari mulai pemilihan industri yang diproteksi, pengawasan kandungan lokal hingga memperbesar birokrasi pengawasan. Kelemahan dari kebijakan perdagangan yang proteksionis menurut Krugman terletak pada adanya distorsi insentif, fragmentasi pasar, monopoli dan menguatnya praktek *rent seeking*.

Ketika, sebuah negara mengubah kebijakannya dari proteksionis menjadi terbuka ada sejumlah dampak yang terjadi. Menurut Krugman⁷, pemerintah negara tersebut akan menghadapi persoalan dampak negatif proses transisi, perubahan distribusi pendapatan dan menurunnya kewenangan dan pengaruh aparat pemerintah. Dampak negatif proses

6 Krugman, Paul. "Protection in Developing Countries" di dalam *Policy Making in The Open Economy*, ed. Dornbusch Rudiger, Oxford University Press, 1993.

7 Ibid.

transisi tampak dari neraca perdagangan yang defisit dan meningkatnya pengangguran. Defisit neraca perdagangan disebabkan oleh derasnya barang impor masuk melebihi ekspor. Derasnya impor karena produk lokal kalah bersaing, baik karena proses produksi kurang efisien atau harga lebih mahal dari impor. Terpukuhnya produk lokal akan menekan penghasilan pekerja bahkan dapat mendorong penutupan industri lokal dan ini akan menciptakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja akan berdampak pada distribusi pendapatan, menciptakan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan. PHK akan terjadi di sektor tertentu, sedangkan keuntungan berupa harga murah dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Perdagangan bebas memberikan ruang yang lebih sempit bagi pemerintah untuk terlibat, tetapi menuntut peran strategis lainnya untuk mendorong dan mengembangkan industri dalam negeri dan kegiatan perdagangan. Dalam pendekatan kebijakan industri ada dua pola peran pemerintah yaitu intervensionis bersifat vertikal dan intervensionis bersifat horisontal⁸. Pendekatan kebijakan intervensionis bersifat vertikal difokuskan pada upaya pemberdayaan sektor usaha tertentu, dimana sasaran intervensi diarahkan pada hasil dan proses produksi dari usaha kecil agar dapat tumbuh dan bersaing. Dalam pendekatan ini sasaran diberikan kepada usaha kecil dan menengah melalui kebijakan-kebijakan bersifat mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh sektor produksi dari hulu sampai hilir. Dengan pendekatan koordinatif tersebut diharapkan terbangun sistem pengembangan usaha yang dapat melindungi dan menumbuhkan usaha kecil dalam persaingan yang tak seimbang. Oleh karenanya dalam pengembangannya satu unit usaha yang satu terkait dengan yang lainnya. Dalam pendekatan ini usaha kecil yang terkonsolidasi dapat meningkatkan efisiensi produksinya dan meningkatkan daya saing produknya.

Sedangkan pendekatan secara horisontal tidak memperlakukan pembedaan atas sektor tertentu, tetapi sektor tersebut tetap memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap struktur sektor usaha. Menurut Parker⁹ pendekatan horisontal fokus pada peningkatan kualitas (*input*) masukan proses produksi dalam hal ini *input* tenaga kerja dan teknologi. Kebijakan-kebijakan yang menjadi turunan pendekatan ini dari sisi tenaga kerja seperti hubungan industri, upah buruh,

8 Audretsch, D. B 1998. *Introduction to Industrial Policy and Competitive Advantage*, Vol 1-3, Aldershot: Edward Elgar.

9 Parker, Rachel 2002. "Coordination and competition in small business policy: A comparative analysis of Australia and Denmark", *Journal of Economic Issues*. Lincoln: Dec 2002. Vol.36, Iss. 4.

serta pelatihan. Dalam perkembangannya pendekatan ini juga memasukkan kebijakan yang fokus pada biaya produksi dan persaingan harga.

Dalam pendekatan kebijakan tersebut, kebijakan perdagangan dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu, kebijakan pemberdayaan terhadap usaha kecil dalam konteks perdagangan internasional, semacam insentif atau dukungan terhadap pelaku usaha dalam negeri agar dapat kompetitif. Kebijakan pemberdayaan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama penekanan pada hubungan pasar. Fokus pada hubungan pasar mengarah pada terciptanya sistem dimana pelaku usaha mau melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki resiko tinggi dengan memberikan insentif yang tinggi bagi pelaku usaha tersebut berupa tingkat keuntungan yang tinggi dan insentif pajak terkait dengan resiko usaha. Dalam hubungan pasar juga memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk memulai bisnis dengan melakukan reformasi pajak, syarat administratif dan upah tenaga kerja. Dengan begitu, pelaku usaha dapat selalu melakukan penyesuaian terhadap dinamika pasar dengan melakukan penyesuaian atas biaya produksi, bukan dengan mengikuti ketentuan birokrasi dan regulasi. Kedua, dalam melalui pendekatan kompetitif, pelaku usaha diarahkan menjadi wiraswastawan yang berjiwa individual, dimana manajemen usaha menjadi wilayah prerogatif dari pelaku usaha dan pemerintah membantu melalui insentif pajak dan infrastruktur.

Dalam sebuah model sistem ekonomi terbuka terbatas, tarif impor bagi kawasan pariwisata dapat menurunkan tingkat kesejahteraan warganya. Menurut Chao dan kawan-kawan¹⁰, di dalam perdagangan bebas yang lebih luas tidak ada kebijakan optimum dan ada kebutuhan akan kebijakan yang menjadi solusi akan keseimbangan antara terata substitusi domestik, rerata transformasi domestik dan rerata transformasi luar negeri. Prinsip keseimbangan tersebut penting untuk mendiskripsikan hubungan kegiatan pariwisata dengan perdagangan bebas. Menurut Hazare dan Segro¹¹, aktivitas kepariwisataan merupakan pergerakan konsumen dari satu negara ke negara yang lainnya untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak diperdagangkan. Proses selanjutnya adalah menciptakan permintaan untuk mentransformasi barang dan jasa yang tidak diperdagangkan ke dalam proses perdagangan atau menciptakan *an additional tourism terms-of-trade effect in the economy*. Akibatnya dalam satu kawasan pariwisata terdapat dua permintaan dan penawaran,

¹⁰ Chao, Chi-Chur; Hazari, Bharat R, Laffargue, "Is Free Trade Optimal for a Small Open Economy with Tourism?" di dalam Hazari, Bharat Rand Hoshmand Reza (eds), 2011, *Tourism, Trade and Welfare: Theoretical and Empirical Issues*, Nova Publisher.

¹¹ Ibid.

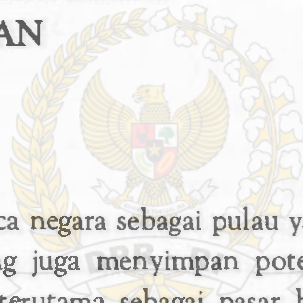
pertama terhadap produk barang dan jasa yaitu yang biasa diperdagangkan (*traditional trade*) dan kedua, dampak dari konsumsi barang dan jasa yang tidak diperdagangkan. Dengan demikian harga yang terbentuk ditentukan oleh keseimbangan antara penduduk lokal dan wisatawan dengan penawaran barang dan jasa dari produsen lokal.

Chao¹² menggunakan asumsi ketika wisatawan mengkonsumsi barang atau jasa lokal, hal ini akan mendorong peningkatan permintaan akan barang lokal. Di sisi lain produsen lokal akan memenuhi permintaan tersebut, sampai titik kesimbangan atau optimum kemampuan produsen lokal. Namun apabila permintaan tidak bisa dipenuhi maka penawaran dari luar produsen lokal akan masuk atau impor. Pengenaan tarif impor pada batas tertentu dapat membatasi konsumsi wisatawan terhadap produk lokal atau mengurangi konsumsi barang impor. Tarif impor terhadap komoditas yang sama dengan produk lokal pada titik tertentu dalam pemikiran Chao secara efektif memberikan kesejahteraan maksimal kepada penduduk lokal, karena wisatawan akan lebih mengkonsumsi barang atau jasa lokal. Apabila tarif tidak berlaku, maka produk impor bisa dikonsumsi para wisatawan secara lebih murah atau bersaing dengan produk lokal, bahkan dalam hal tertentu produk lokal tidak bisa menggantikan produk impor tersebut atau kalah dalam daya saing. Sehingga Chao berpendapat kebijakan tarif impor terhadap barang atau jasa dalam batas tertentu tertentu dapat menjadi instrumen negara dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal dalam suatu kegiatan pariwisata di suatu negara.

12 Ibid.

BAB II

HUBUNGAN ANTARA PARIWISATA DAN PERDAGANGAN



Provinsi Bali yang sudah lama dikenal di manca negara sebagai pulau yang memiliki keunggulan dari sisi obyek wisata, yang juga menyimpan potensi besar sebagai daerah perdagangan internasional terutama sebagai pasar bagi produk Indonesia dimata pembeli luar negeri. Posisi sebagai “tempat” wisata yang dikenal di mancanegara memberikan tempat sekaligus bagi Provinsi Bali sebagai titik bertemunya produsen atau produknya dengan pembeli. Oleh karenanya, potensi perdagangan tersebut berhubungan erat dengan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara menurut benua seperti yang tergambar dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Langsung Menurut Kawasan Tahun 2006-2008

Kawasan	2006	2007	2008
ASEAN	129.536	168.160	205.861
Asia Non Asean	562.318	760.371	820.818
Amerika	68.769	84.449	99.983
Eropa	350.340	425.583	523.578
Oseania	145.000	219.700	330.174
Afrika	5.991	10.268	11.885
Jumlah	1.262.537	1.668.531	1.992.299

Sumber: BPS Bali 2010

Potensi kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2008 memberikan gambaran adanya peningkatan wisatawan mancanegara yang mengenal Bali, bukan hanya alam dan patiwisatanya, tetapi juga produk-produk budaya dan industri dalam negeri yang dipasarkan di Bali. Adanya produk-produk dalam negeri yang dipasarkan di Bali dan kunjungan

wisatawan tersebut telah menciptakan permintaan tersendiri akan produk-produk yang bercirikan atau yang diproduksi oleh Bali. Ada hubungan yang penting antara kunjungan wisatawan dengan negara tujuan ekspor produk Bali. Pada tabel 2 Singapura bisa merepresentasikan asal wisatawan dari kawasan ASEAN. Jepang dan Hongkong bisa merepresentasikan negara Asia non ASEAN. Dalam hal ini pada tabel 2 Jepang menjadi negara tujuan ekspor terbesar pada tahun 2008. Hal yang sama terjadi pada Australia yang menjadi bagian dari Oceania juga memiliki hubungan positif antara kunjungan wisatawan pada tabel 1 dengan tabel 2.

Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara asal dan jumlah wisatawan dengan perkembangan tujuan ekspor produk Bali. Artinya kunjungan wisatawan bukan hanya meningkatkan belanja wisatawan terhadap produk Bali, tetapi juga menciptakan permintaan akan produk Bali melalui mekanisme ekspor. Ini juga menunjukkan bahwa transaksi dalam sektor pariwisata bukan hanya dilihat dari aspek jasa pariwisata, tetapi juga pengaruhnya yang besar terhadap perkembangan perdagangan.

Pada kenyataannya pariwisata bukan hanya menciptakan permintaan akan barang atau produk lokal (buatan Indonesia atau Bali) tetapi juga menciptakan permintaan akan produk impor. Hal ini karena para wisatawan masih membutuhkan produk-produk tertentu untuk memenuhi kebutuhannya selama tinggal di Bali, seperti jenis makanan, pakaian atau kebutuhan pokok lainnya yang tidak bisa disubstitusi oleh produk lokal. Oleh karenanya pariwisata dalam konteks Bali telah menciptakan pasar dan aktivitas perdagangan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dalam perdagangan keistimewaan Bali dalam konteks perdagangan tampak dalam neraca perdagangan pada tabel 2 (ekspor) dan tabel 3 (impor).

Tabel.2 Sepuluh Negara Tujuan Ekspor Terbesar Provinsi Bali Tahun 2008

No.	Tujuan	Volume (000 kg)	Nilai (000US\$)	Pangsa (%)
1	Jepang	10 292	57 875	21,64
2	USA	3600	40 259	15,05
3	Singapura	2992	33 273	12,44
4	Hongkong	590	20608	7,70
5	Australia	2 750	20 357	7,61
6	Italia	977	14 343	5,36
7	Inggris	610	9 356	3,50
8	Perancis	2064	9023	3,37

9	Jerman	981	8 480	3,17
10	Taiwan	2 089	5 404	2,02
11	Lain-lain	8 748	48 527	18,14

Sumber: BPS Bali 2010

Pangsa impor tertinggi berasal dari Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat seperti tampak dari tabel 3. Walaupun dari sisi jumlah wisatawan jumlah ini tidak sebanding dengan nilai impornya, tetapi ketiga negara tersebut termasuk yang tinggi. Tingginya pangsa impor dari ketiga negara tersebut bisa berhubungan dengan keberadaan jaringan hotel dan produk kebutuhan sehari-hari dengan merk internasional. Singapura, Hongkong dan Amerika merupakan negara-negara memiliki merk atau produsen produk bertaraf internasional.

Sebaliknya, perkembangan impor nilai tertinggi dicapai oleh Singapura yang termasuk negara ASEAN. Sedangkan negara Hongkong, Cina dan Taiwan termasuk lima besar asal negara pengimpor barang ke Bali. Ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya menciptakan permintaan akan ekspor, tetapi menciptakan permintaan akan produk tertentu. Dalam hal ini Singapura menduduki peringkat tertinggi dari sisi nilai impor.

Dengan membaca neraca perdagangan tersebut, tampak bahwa Bali memainkan peran penting dalam perdagangan barang terutama kerajinan baik dari kayu maupun kulit. Bali memiliki keunggulan di Industri kerajinan karena produknya telah memiliki posisi yang kuat dalam memori konsumen dari mancanegara. Hal ini mendorong permintaan yang tinggi akan produk kerajinan Bali dari sisi Ekspor. Bali menjadi pasar karena aktivitas pariwisata dengan ditunjukan oleh kegiatan impor. Hal ini menempatkan Bali sebagai titik penting dari pasar baik bagi produk Indonesia maupun manca negara.

Tabel 3. Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar Provinsi Bali Tahun 2008

Negara Asal	Volume	Nilai (000 US\$)	Pangsa (%)
Singapura	734	24 457	23,68
Hongkong	559	16 737	16,21
USA	328	15 842	15,32
Australia	1 221	9 628	9,32
Cina	2 004	7 968	7,71
Taiwan	1 704	4 792	4,64
Jerman	41	3 952	3,83
Jepang	207	3 344	3,24
Korsel	449	2 799	2,71

Thailand	1 091	2 633	2,55
Lainnya	4106	11149	10,79

Sumber: BPS Bali 2010

Data pada tabel 1, 2 dan 3 memberikan gambaran adanya hubungan antara kegiatan pariwisata dengan perdagangan. Setidaknya pariwisata di Bali telah menumbuhkan permintaan akan produk Bali dari negara lainnya. Hal ini berhubungan dengan masuknya wisatawan dari mancanegara, yang memiliki memori dan kebutuhan akan sejumlah produk yang dihasilkan oleh masyarakat Bali ataupun dari wilayah lain di Indonesia. Oleh karenanya kebijakan pembangunan pariwisata tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan perdagangan, karena masing-masing sektor dapat saling mempengaruhi. Keberadaan wisatawan menjadi kunci komunikasi produk Bali ke dunia luar, sekaligus sebagai faktor pemasaran terpenting terhadap produk-produk Bali.

Dari gambaran hubungan antara pariwisata dengan perdagangan, tampak bahwa pariwisata telah menciptakan permintaan produk Bali dari luar negeri. Ada hubungan yang positif antara lalu lintas wisatawan dengan perdagangan antar Bali dengan negara-negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa pariwisata berhasil melahirkan pasar tersendiri bagi produk Bali, bahkan Bali merupakan pasar bagi produk Indonesia¹³. Bali sebagai pasar produk Indonesia merupakan dampak dari *branding* Bali yang kuat sehingga walaupun sebagian besar produk dihasilkan dari luar Bali, tetapi produk tersebut dilihat sebagai produk Bali. Hal ini bisa terjadi karena produk-produk Bali yang sudah memiliki kematangan disain dan pasar biasanya mengalami duplikasi dari pengrajin di luar Bali, sehingga secara kuantitas sebagian produk dihasilkan dari luar Bali tidak mengurangi pasar bagi produsen Bali.

¹³ Suhartono, "Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali: Antara Kebijakan Kemitraan dan Persaingan", dalam *Majalah KAJIAN* Vol. 13, No.3, September 2008. Jakarta, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB III

PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAPPERTUMBUHAN EKONOMI

Dari data statistik yang ada proporsi perdagangan internasional terhadap PDRB menunjukkan perkembangan yang dinamis. Ini menunjukkan bahwa Bali telah menjadi salah satu titik atau wilayah yang mulai merubah komposisi PDRBnya dari dominasi belanja pemerintah secara perlahan tapi pasti menjadi wilayah perdagangan yang penting di Indonesia.

Pentingnya posisi Bali sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan pasar tampak dari keterangan Kepala Dinas Perdagangan Bali, bahwa volume ekspor Bali meningkat sejak Bom Bali menghancurkan jasa pariwisata di Bali. Di dalam tabel 3 tampak bahwa sejak bom Bali memberikan dampak pada jasa pariwisata, Bali mulai meningkat sumbangan aktivitas ekspornya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena pelaku usaha berusaha menjual produk secara langsung ke negara tujuan, karena pasca bom Bali wisatawan menurun secara signifikan.

Tabel 3: Sumbangan Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bali

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ekspor (%)	9	7	7,18	6,09	7,30	6,23	5,19
Impor	1,41	1,78	0,99	2,67	0,68	0,96	2,01

Sumber : BPS Bali 2010

Aktivitas perdagangan baik ekspor maupun impor merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan ekonomi Bali. Menurut Bank Indonesia Bali, pembangunan ekonomi Bali dari sisi kewilayahan ekonomi memiliki dua prinsip yaitu pro bisnis dan pro rakyat. Namun dua prinsip tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsep Tri Hita Karana (THK), yaitu penekanan pada hubungan manusia dengan tuhan, manusia-dengan manusia dan manusia dengan alam.

Prinsip pro bisnis tentunya mengarahkan provinsi Bali sebagai tempat yang prospektif bagi investasi dan kegiatan bisnis. Hal ini memerlukan dukungan kebijakan berupa kemudahan investasi dan bisnis. Indikator dari keberhasilan yang mendukung bisnis bisa dilihat dari sumbangan dari sisi perdagangan ekspor maupun impor terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Bali Berdasarkan harga Konstan 2000

	2006	2007	2008
%	5,28	5,92	5,97

Sumber: BPS Bali, Tahun 2010

Dari tingkat pertumbuhan PDRB pada tabel 4 sektor perdagangan menyumbangkan 5,11% tahun 2006, 7,58% Tahun 2007 dan 8,62 % pada tahun 2008. Ini menunjukkan kontribusi perdagangan semakin meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Ini juga menandakan iklim bisnis, investasi di sektor perdagangan semakin baik.

Dari Tabel 5 tampak bahwa presentase sumbangan perdagangan ekspor impor terhadap PDRB terus meningkat dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Yang menarik dari tabel 5 adalah pandangan yang melihat Bali sebagai pasar produk daerah lain di Indonesia didukung data dari kontribusi impor antar provinsi yang cenderung naik dari tahun 2004 hingga 2008. Kontribusi impor antar provinsi bahkan bisa melampaui kontribusi impor dari negara lain sejak tahun 2007. Hal ini menunjukkan kinerja perdagangan Bali bergerak ke arah yang positif baik dari sisi neraca perdagangan luar negeri (ekspor impor) maupun kemampuan Bali sebagai pasar dari produk daerah lain di Indonesia.

Tabel 5: Distribusi Persentase PDRB Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2004 – 2008

Komponen Penggunaan	2004	2005	2006	2007	2008
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	53.11	51.74	50.72	52.86	51.35
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta	0.83	0.79	0.76	0.86	0.88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.43	8.27	8.14	8.03	8.19
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	13.81	13.44	13.02	19.41	22.56
a. Perubahan Inventori /	0.23	0.23	0.22	0.25	0.27
b. Diskrepansi Statistik	9.22	16.36	8.04	4.55	9.27
Ekspor	53.87	52.55	56.04	57.67	63.66
a. Antar Negara	40.68	38.35	41.43	42.63	47.98
b. Antar Provinsi	13.19	14.20	14.61	15.04	15.68

Impor	39.50	43.37	36.92	43.63	56.17
a. Antar Negara	19.93	21.64	21.80	20.90	24.97
b. Antar Provinsi	19.56	21.73	15.12	22.72	31.20

Sumber: BPS Bali 2010

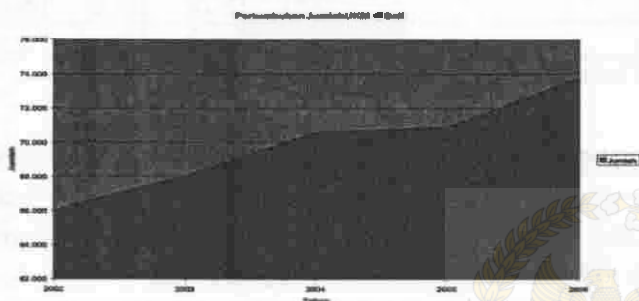
Walaupun perdagangan menjadi fokus perhatian pembangunan ekonomi di Bali, sisi keberpihakan kepada rakyat juga menjadi prinsip yang tetap digunakan oleh Provinsi Bali dalam membangun ekonominya. Keberpihakan pada rakyat kecil diberikan dalam bentuk dukungan bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satunya tampak dari pembentukan lembaga keuangan mikro dan kecil untuk memfasilitasi pertumbuhan kegiatan ekonomi rakyat Bali. Hal ini tampak dari pertumbuhan unit usaha mikro kecil dan menengah, seperti tampak pada tabel 6.

Usaha Kecil dan Menengah menjadi tulang punggung ekonomi Bali, terutama dalam memproduksi barang yang dibutuhkan akibat adanya aktivitas pariwisata, seperti hasil kerajinan atau hasil karya seniman Bali. Pelayanan-pelayanan tertentu yang bersifat jasa juga memberikan ruang bagi pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemberdayaan usaha kecil di Bali menggunakan pendekatan prioritas sektor tertentu. Hal ini dapat dilihat dari penekanan dan pertumbuhan PDRB per sektor. Pertumbuhan yang pesat tampak dari tahun 2002 hingga 2006, sebagaimana tampak pada Grafik 1. Dari grafik 1 juga dapat dilihat bahwa usaha kecil secara total dari keseluruhan UKM di Provinsi Bali terus menunjukkan pertumbuhan rata-rata 3% pertahun dari tahun 2002-2006. Tetapi pertumbuhan UKM mengalami stagnasi antara tahun 2004-2005. Menurut Nengah Artawayasa¹⁴ adanya pertumbuhan pada periode 2002-2004 karena UKM menjadi katup bagi masyarakat yang lesu akibat ledakan Bom Bali, sehingga memukul sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil menampung tenaga kerja yang tidak terserap akibat turunnya wisatawan ke Pulau Bali. Tenaga kerja ini membuka dan memulai usaha kecil tersebut.

Dari gambaran kegiatan ekonomi, kelihatan bahwa pertumbuhan PDRB dan perdagangan internasional memiliki hubungan yang kuat dengan aktivitas pariwisata. Oleh karenanya faktor gangguan terhadap aktivitas pariwisata di Bali dapat mempengaruhi juga aktivitas ekonomi yang tercipta dari kegiatan pariwisata. Artinya Bali mewakili fenomena munculnya permintaan akan barang dan jasa yang tidak diperdagangkan menjadi permintaan tersendiri atau pasar tersendiri bagi produk Bali.

¹⁴ Ibid Suhartono.

Grafik 1
Pertumbuhan UKM di Bali



Sumber: Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, tahun 2007

Kondisi di atas juga membuka peluang bagi daerah lain di Indonesia memasarkan produknya melalui Bali, karena Bali dapat memainkan peran sebagai titik temu antara konsumen (wisatawan) dengan barang-barang yang dibutuhkan wisatawan. Pemenuhannya bukan hanya dihasilkan oleh masyarakat Bali, tetapi produsen atau masyarakat di luar Bali, bahkan melihat dari data ekspor dan impor, Bali juga menciptakan permintaan tersendiri akan barang impor.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA

A. Peran pemerintah

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Bab 17, arah kebijakan di sektor perdagangan menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung penguatan daya saing produk ekspor, arah kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta penguatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Sedangkan, kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tata niaga dan kepastian usaha.

Secara geografis dua arah kebijakan perdagangan tersebut harus bisa memaksimalkan pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi kawasan yaitu *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Di tingkat ASEAN sendiri telah terjadi pergeseran dari kerjasama preferensi perdagangan barang menjadi lebih luas kepada perdagangan jasa dan investasi. Sedangkan di tingkat APEC, sifat kerjasama masih bersifat terbuka, informal dan tidak mengikat dengan tujuan lebih pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks arah kebijakan dan geografi ekonomi tersebut perkembangan ekonomi di Bali melalui aktivitas perdagangan menuntut adanya kelembagaan yang secara kuat mengatur dan mengarahkan perkembangan perdagangan, terutama dengan adanya perdagangan antar negara setelah berlakunya kerjasama ACFTA. Dalam kasus Bali, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan pemerintah tentang pembagian urusan SKPD yang bersentuhan dengan perdagangan, selain Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat Dinas Usaha kecil dan Menengah, dan Biro ekonomi dan Pembangunan. Sedangkan pemerintah pusat sendiri, melalui kebijakan yang

dikeluarkan baik oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan memiliki peran yang besar dalam membentuk regulasi dan mengendalikan aparatur yang bertanggungjawab terhadap lalulintas perdagangan.

Dari sisi kelembagaan, salah satu peran pemerintah yang penting menurut Dinas Perdagangan adalah fungsi monitoring atas lalu lintas perdagangan. Monitoring tersebut diharapkan memberikan gambaran perkembangan baik kepada pemerintah maupun masyarakat khususnya dunia usaha. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang yang menjadi salah satu dokumen ekspor dari lalu lintas barang. Surat Keterangan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah terutama dalam mengukur perkembangan kinerja perdagangan dan merencanakan pembangunan ekonomi.

Fungsi strategis lainnya yang bisa dijalankan oleh pemerintah daerah adalah membantu perluasan dan peningkatan akses produk daerah ke pasar ekspor. Peran perluasan pasar bisa dimainkan oleh pemerintah daerah, khususnya Bali dengan memanfaatkan keunggulan Bali sebagai daerah kunjungan wisata sekaligus menjadi pasar produk Bali dan daerah lain di Indonesia. Peran ini bisa dimainkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat berupa pembangunan sarana perdagangan yang mampu menampung produk Bali dan Indonesia, atau sebagai ruang pameran yang mudah dijangkau oleh pembeli luar negeri yang sedang berwisata ataupun memang bertujuan untuk berdagang. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas kemudahan berupa infrastruktur baik fisik tempat pembeli dan penjual bertemu dan juga infrastruktur keuangan yang mempermudah transaksi serta pengiriman barang.

Secara tidak langsung pemerintah daerah juga dapat mengambil peran mempromosikan posisi Bali dalam kegiatan perdagangan internasional melalui pameran yang diikuti oleh pemerintah. Dalam hal ini seharusnya pemerintah lebih mendorong peran swasta dengan sumber daya yang dimiliki, baik anggaran dan manusianya, untuk mengikuti pameran sebagai bentuk lain dari promosi. Jadi selain memanfaatkan keunggulan sebagai tempat tujuan wisata juga dapat mendorong dan memfasilitasi peran aktif pelaku usaha berpromosi dalam kegiatan pameran di luar negeri atau dalam negeri.

Dalam konteks pengembangan dunia usaha yang memerlukan dorongan dan bantuan dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor, maka pemerintah juga perlu menciptakan peluang bagi lahirnya eksportir-eksportir baru. Eksportir merupakan ujung tombak dari aktivitas perdagangan khususnya ekspor. Upaya

melahirkan ekportir tentunya dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan usaha, baik dari sisi izin dan tempat usaha. Selain itu insentif bersifat fiskal atau pajak juga dibutuhkan, terutama bagi pelaku usaha yang baru memulai usaha. Untuk menghadapi persaingan, pelaku usaha yang baru perlu mendapat kemudahan dari sisi fiskal, agar produknya dapat mencapai skala ekonomi yang memadai untuk berkompetisi dengan produsen di luar negeri.

Dari sisi keuangan, kebijakan kredit untuk permodalan juga menjadi bagian penting bagi kelahiran eksportir baru, terutama dalam memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor. Seluruh kegiatan ekspor membutuhkan fasilitas pembiayaan yang banyak diberikan jasa perbankan. Fasilitas ini harus memberikan keamanan berusaha, karena fasilitas ini menentukan keberlangsungan usaha. Tidak sedikit pelaku usaha harus gulung tikar karena kendala dari proses pembayaran. Menurut, pelaku usaha di Bali¹⁵, kegiatan usaha banyak dilakukan secara langsung tanpa menggunakan fasilitas *letter of credit* (LC). Menurut pelaku usaha biaya LC sering mengurangi tingkat keuntungan, walaupun LC memberikan tingkat keamanan yang lebih baik dibanding instrumen transaksi perdagangan internasional lainnya. Banyak pelaku usaha melakukan transaksi dengan pembayaran di muka baik secara transfer maupun tunai. Hal ini membutuhkan modal kepercayaan yang tinggi antara penjual (ekportir) dengan pembeli dari luar negeri. Karena tidak sedikit pelaku usaha pernah mengalami penipuan akibat transaksi yang tidak dijamin dengan LC.

Praktek pembayaran yang berkembang di luar LC tentunya memiliki resiko tersendiri, karena lebih mengandalkan kepercayaan dibanding dengan sistem transaksi yang aman. Keluhan dari pelaku usaha tersebut, seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi biaya transaksi, sehingga pelaku usaha lebih memilih transaksi yang aman dan mengurangi resiko kerugian. Hal ini seharusnya menjadi bagian dari lembaga pemerintah baik SKPD, maupun Bank Indonesia di daerah untuk memberikan layanan yang mendukung aktivitas pelaku usaha dalam meningkatkan ekspor.

Pemerintah daerah juga memerlukan kewenangan tertentu di tingkat daerah yang memudahkan pelaku usaha untuk mengekspor produknya. Pemerintah Bali menghadapi kendala berupa banyaknya produk Bali tercatat sebagai barang ekspor bukan dari Bali karena persoalan pencatatan asal barang

15 Wawancara dengan Putu Arya Sedhana, Wakil Ketua Umum Bidang perdagangan Kadinda Bali, tanggal 6 Oktober 2010.

sering berbeda dengan asal pengapalan atau pemberangkatan barang itu ke tujuan ekspor. Hal ini dapat merugikan pemerintah Bali terutama dalam mengukur kinerja ekspornya dan juga perkembangan bidang-bidang ekspor terkait dengan naik turunnya volume. Tentunya pemerintah akan lebih mudah mengambil tindakan atau koordinasi dengan pemerintah pusat apabila terdapat perkembangan ekspor yang memerlukan intervensi pemerintah pusat atau daerah. Untuk itu prosedur dokumen ekspor harus lebih pendek, tetapi dapat merekam kegiatan ekspor secara cermat agar perkembangan perdagangan dapat dimonitor dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku usaha.

Pemantauan perkembangan arus perdagangan dan memperlancar arus perdagangan merupakan salah satu tugas dari SKPD Dinas Perdagangan Provinsi Bali. Titik tekan SKPD pada memperlancar arus barang, sehingga ekonomi diharapkan bekerja secara efisien dan produsen dapat memasarkan produknya hingga ke tangan konsumen tanpa hambatan yang berarti. Dalam konteks perdagangan dan kerangka perdagangan bebas, peran pemerintah daerah tampak minimalis, tetapi dalam kenyataannya terhadap barang strategis seperti kebutuhan pokok peran pemerintah menjadi penting terutama dalam mendeteksi kelangkaan dan peningkatan harga, pemerintah memiliki instrumen operasi pasar. Tetapi dalam skala besar seperti komoditas perdagangan internasional agaknya pemerintah Bali tidak secara langsung berhubungan dengan arus perdagangan tersebut, karena sebagian besar merupakan urusan pemerintah pusat. Dalam konteks Bali, pemerintah daerah perlu memainkan peran deteksi lebih awal terhadap perkembangan perdagangan untuk dikoordinasikan kebijakannya dengan pemerintah pusat, terutama perdagangan antar negara.

Pemerintah daerah Bali¹⁶ juga melihat bahwa peran koordinasi kebijakan perdagangan antar daerah yang dikoordinasikan pemerintah pusat untuk komoditas tertentu masih diperlukan, bahkan perlu dikembangkan lebih jauh. Terutama dalam menghadapi perkembangan industri kerajinannya, saat seniman Bali memerlukan bahan baku dari provinsi lainnya. Namun, kebijakan pemerintah pusat yang kurang terkoordinasi sering kurang memperhatikan keterkaitan ekspor bahan baku dengan bahan kegiatan proses menjadi barang jadi yang menjadi andalan Provinsi Bali. Contoh kebutuhan kayu untuk industri kerajinan sering merugikan dan menghambat proses produksi produsen di Bali, karena harga bahan baku sampai di pengrajin menjadi mahal. Dalam

16 Wawancara dengan Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Bali, 6 Oktober 2010.

kasus ini dengan kewenangan kebijakan perdagangan pemerintah pusat perlu mengintegrasikan perdagangan bahan baku ke daerah pengrajin dalam prioritas yang lebih tinggi daripada prioritas memenuhi kebutuhan bahan baku untuk negara lainnya yang sering menjadi kompetitor produk Bali.

B. Respon pelaku usaha

Meningkatnya volume perdagangan di Bali dalam lima tahun terakhir memunculkan sejumlah tantangan bagi pelaku usaha di Bali. Salah satunya pelaku usaha di bidang jasa perhotelan dan ritel. Keinginan pelaku usaha Bali yang bergabung dalam Kadin daerah menginginkan adanya upaya meregulasi pasar, terutama untuk memberlakukan zona pengembangan usaha baru. Anggora Kadin¹⁷ khusus dari asosiasi pengusaha hotel dan restoran menghendaki pemerintah membatasi pembangunan hotel baru. Dalam pandangan PHRI hotel yang ada sudah *over supply* di beberapa kawasan. Oleh karenanya PHRI menghendaki agar pembangunan dibatasi. Sedangkan Kepala Badan penanaman Modal Bali¹⁸ melihat bahwa pengembangan perhotelan merupakan salah satu sektor investasi yang diminati oleh pemodal asing. Pembatasan bukan dari sisi *supply* tetapi menurut Kepala Penanaman Modal seharusnya berdasarkan peruntukan sebuah kawasan dan izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha. Lebih jauh kepala Badan juga menjelaskan kasus adanya PMA yang tertipu akibat perantaranya di Bali yang hanya mendapat izin membuka usaha perjalanan wisata tetapi menjualnya ke penanam modal asing (PMA) sebagai izin usaha perhotelan. Hotel yang dibangun akhirnya dikenai tindakan hukum.

Pembatasan bagi Bali seharusnya menyangkut tata ruang dan tata kota agar terjadi daya dukung antara alam dengan industri pariwisata. Persaingan diantara pelaku usaha perhotelan tidak bisa dihindari karena adanya daya tarik Bali tersebut. Selain itu juga untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi modal untuk mengatasi kemiskinan bagi daerah Bali.

Persoalan pertumbuhan sarana perhotelan dalam kegiatan pariwisata dan perdagangan di Bali juga sudah menjadi perhatian kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Hal ini tampak dari serangkaian aksi protes yang dilakukan oleh gerakan penentangan perubahan Peraturan Daerah tentang RTRW yang dilakukan

17 Wawancara dengan Panudhiana Khun (Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia Bali) 6 Oktober 2010.

18 Wawancara dengan Kepala BKPM Bali, 5 Oktober 2010.

oleh Gerakan Pemuda Hindu Peduli Bali (GANDI), Keluarga Mahasiswa Hindu Darma (KMHDHI), BEM Institut Hindu Dharma Indonesia dan BEM Universitas Hindu Indonesia¹⁹. Hal ini menjadi isu penting karena sejumlah usulan pembangunan ekonomi sebagai kelanjutan dari pertumbuhan jasa pariwisata telah mendorong terjadinya perubahan rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW). Hal ini berhadapan dengan prinsip THK yang meyakini tata ruang tidak bisa dikalahkan oleh kepentingan membangun ekonomi tersebut. Tri Hita Karana (THK) sendiri merupakan konsep yang menekankan pada hubungan manusia dengan tuhan, manusia-dengan manusia dan manusia dengan alam. Pertentangan muncul antara pembangunan ekonomi yang didorong dari meningkatnya aktivitas pariwisata dan perdagangan dengan kelompok yang berusaha mempertahankan konsep THK.

Selain munculnya kelompok yang mengadvokasi THK, aktivitas perdagangan dan pariwisata juga mendorong tumbuhnya pengusaha lokal baru sebagai respon terhadap perkembangan sektor perdagangan. Hal itu tampak dari bermunculnya "usaha *clothing* Bali"²⁰. Usaha tersebut berupa usaha *fashion* lokal, seperti yang tampak di toko-toko yang berada di pusat perdagangan Kuta. Usaha *clothing* ini berani mengangkat merk lokal seperti Justify, Cibola dan Heavy yang bersaing dengan merk dagang asing seperti Billabong, Quicksilver, Reef atau Ripcurl. Usaha *clothing* lokal tersebut setidaknya dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan lebih 20an pengusaha lokal.

Sebagai sebuah pasar dari produk luar maupun dalam negeri, Bali telah menjadi titik pertumbuhan penting dalam menata praktek perdagangan yang ada. Pelaku usaha menginginkan peran yang sinergis antara dunia usaha dengan pemerintah. Sejumlah kebijakan di sektor perdagangan seharusnya meminta pertimbangan dari pengusaha. Salah satunya selain pembatasan pertumbuhan usaha menurut pelaku usaha di Bali, dampak penerapan pajak terhadap minuman keras sebagai objek pajak barang mewah menyebabkan harga minuman tersebut menjadi tinggi, sehingga mempengaruhi pedapatan importir dan pelaku usaha restoran dalam usahanya.

Ada beragam respon dunia usaha dalam menyikapi semakin tingginya tingkat persaingan. Ada yang meresponnya sebagai sebuah peluang, seperti yang ditunjukkan dengan berkembangnya usaha *clothing* lokal, dengan banjirnya produk luar baik dari luar negeri maupun dari provinsi lainnya. Tumbuhnya

19 "Pemuda Hindu Unjuk rasa Protes Perusajan Alam Baii", diunduh dari <http://www.tempointeraktif.com>, 21 Oktober, 10:16.

20 "Aksi Lokal Membendung Dominasi Global", Jawa Pos, 10 Oktober 2010 hal. 25.

usaha lokal, walaupun tidak direncanakan oleh pemerintah, merupakan fenomena umum reaksi pengusaha lokal terhadap peluang yang tercipta dengan adanya pasar yang diciptakan oleh aktivitas pariwisata. Artinya sebenarnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha adalah iklim usaha yang memberikan peluang dan adanya dukungan kebijakan agar usaha bisa tumbuh secara alamiah.

Ketika usaha sudah tumbuh dan besar, pelaku usaha menjadi kelompok kepentingan yang menginginkan usahanya terproteksi, karena persaingan di tingkat yang lebih tinggi semakin ketat dan menuntut peran dalam mempengaruhi kebijakan. Kadin meminta sebagai kelompok yang mewadahi aspirasi pengusaha diberikan tempat dalam proses pembuatan kebijakan seperti pembatasan pembangunan hotel. Ini menunjukkan bahwa PHRI sebagai wadah pengusaha perhotelan merasakan dampak pembangunan hotel yang cepat telah mengurangi tingkat keuntungan dan persaingan penambahan modal, karena kecenderungan hotel baru melengkapi hotel dengan tampilan dan fasilitas baru yang tentunya sulit diikuti oleh pengusaha perhotelan yang sudah ada.

Pelaku usaha perdagangan barang konsumsi dari impor seperti minuman keras mengeluhkan penerapan tarif impor yang tinggi terhadap produk tersebut. Penerapan tarif tersebut mempengaruhi konsumsi minuman keras di kalangan wisatawan asing. Akibatnya perputaran usaha juga berkurang, akibat penurunan konsumsi. Hal ini bisa mempengaruhi kenyamanan wisatawan untuk tinggal di Bali. Dampaknya juga pada belanja wisatawan pada produk yang lainnya.

Dari respon pelaku usaha tampak bahwa, secara sistemis pelaku usaha meminta perlindungan, memanfaatkan peluang atau perlakuan khusus agar bisa bersaing dan berkembang. Dari ketiga respon tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki respon berbeda tergantung dengan tingkat tekanan terhadap usahanya. Bermunculannya usaha "clothing Bali" memberikan gambaran persaingan telah mendorong munculnya kreativitas untuk memproduksi barang yang dapat merebut hati konsumen. Gejala ini menunjukkan ada potensi dari pelaku usaha yang muncul seiring dengan derasnya barang impor di pasaran sebagai dampak dari perdagangan internasional. Pertumbuhan usaha yang muncul akibat dari persaingan merupakan respon yang positif dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas.

Sedangkan respon yang membutuhkan perlindungan menunjukkan produk lokal memang tidak bisa bersaing tanpa bantuan proteksi. Persoalannya proteksi tersebut ada batasnya sesuai dengan sikap dari negara yang kena dampak

proteksi. Selain itu proteksi juga menyebabkan rendahnya minat investor luar negeri untuk menanamkan modal di sektor riil. Hal ini bisa terjadi di sektor riil seperti jasa akomodasi dengan semakin meningkatnya investasi mancanegara di sektor ini. Walaupun hal ini berdampak pada daya saing pelaku usaha lokal yang semakin menurun, disebabkan mereka tidak mampu membiayai pengembangan usahanya. Isu pembatasan pertumbuhan usaha perhotelan diangkat oleh PHRI sebagai wadah pelaku usaha perhotelan lokal. Selain itu pertumbuhan hotel berdampak pada perluasan lahan, sehingga bersinggungan dengan lokasi-lokasi yang memiliki nilai ibadah dan historis yang menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Bali.

Respon ketiga, berasal dari pelaku usaha yang menghendaki perlakuan khusus, terutama pelaku usaha importir minuman keras. Dari kalangan ini, penurunan tarif impor dan pengenaan pajak atas minuman keras diharapkan meningkatkan konsumsi wisatawan terhadap minuman tersebut. Hal ini akan menambah tingkat keuntungan dari pelaku usaha. Fasilitas khusus juga salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat.

BAB V

TANTANGAN ACFTA TERHADAP PERDAGANGAN BALI

Liberalisasi perdagangan bagi Bali sendiri merupakan kenyataan yang sudah memiliki sejarahnya tersendiri seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali. Pertumbuhan yang tinggi di sektor pariwisata telah menciptakan pasar atau permintaan dan penawaran sebagai akibat aktivitas pariwisata di Bali. Dari sisi pariwisata setidaknya tampak dari pertumbuhan akomodasi dari jaringan perhotelan. Usaha perhotelan yang banyak melibatkan *foreign direct investment* mendorong permintaan terhadap sejumlah barang impor untuk memenuhi aktivitas perhotelan.

Bagi Bali sendiri liberalisasi perdagangan bukan sebuah efek dari pemberlakuan peraturan, tetapi secara historis menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan kegiatan pariwisata. Dari perspektif ekonomi Bali, perdagangan bebas merupakan satu sisi dari wajah pariwisata di Bali, karena setiap aktivitas pariwisata menciptakan permintaan dan penawaran tersendiri akan barang dan jasa. Hal ini memberikan landasan bagi Bali untuk tumbuh dalam iklim perdagangan bebas. Tentunya tidak semua wilayah Bali berhadapan dengan fenomena tersebut, terutama yang jauh dari industri pariwisata. Pemerataan pertumbuhan pariwisata ke seluruh wilayah Bali menjadi tantangan tersendiri, karena dapat memiliki dampak positif dan negatif.

Salah satu dampak bisa dilihat adalah yang berkenaan dengan waktu tinggal. Konsumen pariwisata, terutama dari mancanegara bukan hanya menciptakan permintaan barang cenderamata tetapi juga kebutuhan barang konsumsi dari asal negaranya. Karena rata-rata wisatawan di Bali memiliki waktu tinggal yang cukup tinggi permintaan produk kebutuhan sehari-hari berstandar negara asal atau internasional juga cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari pusat keramaian atau pasar kebutuhan *fashion* seperti pakaian di sepanjang daerah wisata Kuta, terdapat sejumlah etalase produk *fashion* internasional dari mulai alas kaki,

pakaian hingga produk makanan. Semua produk tersebut membawa baik merk hingga tampilan sebagai produk mancanegara atau negara asal wisatawan.

Fenomena banyaknya *outlet* produk internasional di kawasan pariwisata menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki pasar di kawasan wisata di Bali. Dalam hal ini produk lokal tidak bisa menutup pertumbuhan produk internasional, karena produk-produk tersebut masuk tanpa hambatan yang berarti. Artinya produk lokal harus mampu bersaing dengan produk yang sudah memiliki nama secara internasional.

Fenomena banyaknya *outlet* produk internasional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah Bali dalam menata wilayah perdagangannya. Untuk menciptakan keseimbangan dan membuka pasar produk lokal di Bali, pemerintah secara khusus memberikan pasar bagi produk lokal, seperti pasar tradisional yang secara khusus memasarkan produk lokal. Hal ini menjadikan konsumen (wisatawan) memiliki kesempatan untuk mengenal produk lokal, bahkan mengkonsumsinya. Proses ini tentunya dapat memberikan peluang wisatawan luar negeri untuk mengenal lebih mendalam produk dan cita rasa produk lokal. Barang-barang atau produk tertentu yang memberikan kesan tersendiri dan pengalaman yang khusus dapat menjadi potensi permintaan ekspor saat wisatawan kembali ke negara asalnya. Hubungan ini secara statistik berhubungan seperti tergambar pada tabel 1 dan tabel 2.

Hanya saja untuk kawasan wisata tertentu seperti Nusa Dua atau di dalam sajian hotel, akses produk lokal kurang diberikan. Hal ini bisa terjadi, karena sejumlah hotel merupakan sebuah jaringan perhotelan internasional, sehingga standar produk atau jasa sesuai dengan standar induk perusahaan. Kebijakan ini berakibat membatasi produk lokal sebagai bagian dari barang yang dijual atau jasa pelayanan yang diberikan oleh hotel.

Kebijakan hotel-hotel internasional yang kurang menggunakan produk lokal diakui oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Bali. Menurut Kepala Dinas Perdagangan²¹, sejumlah hotel bintang lima di Nusa Dua dalam menyajikan makanan baik yang ringan maupun utama masih mengandalkan produk impor. Padahal menurut Kepala Dinas Perdagangan produk-produk tersebut dapat disubstitusi dengan produk lokal. Kondisi ini menyebabkan permintaan pelaku usaha sektor perhotelan atas produk lokal masih kurang optimal.

Kenyataan di atas mempengaruhi permintaan atas produk impor yang tetap tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata seperti tampak pada tabel 2. Sumbangan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Bali

21 Wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Bali, 6 Oktober 2010.

tampak masih tinggi, walaupun masih di bawah pertumbuhan sumbangan ekspor Bali. Fenomena ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Bali, karena pertumbuhan impor yang tinggi ketika barang-barang tersebut bersifat komplementer atas produk lokal akan membahayakan keberlangsungan industri lokal.

Usaha persuasi dari pemerintah daerah yang meminta pelaku usaha swasta agar menggunakan produk lokal tidak akan efektif. Himbauan tersebut seharusnya dibarengi dengan penerapan tarif terhadap impor produk tertentu yang dikonsumsi oleh wisatawan, agar para wisatawan dapat mengkonsumsi produk lokal. Usaha persuasif tersebut harus dibarengi dengan upaya secara sistemik melalui mekanisme perdagangan, karena instrumen perdagangan dapat membuat keseimbangan pasar sebagai pendorong pengusaha perhotelan menggunakan produk lokal dibanding produk impor.

Selain itu, strategi dagang sejumlah usaha perhotelan yang memiliki jaringan internasional yang menentukan secara sendiri produk atau jasa yang diberikan kepada tamunya perlu diseimbangkan dengan memberi kesempatan produk lokal sebagai bagian dari sajian yang diberikan oleh jasa perhotelan. Kebijakan penggunaan produk lokal dalam sajian perhotelan yang memiliki jaringan internasional diperlukan untuk membuka peluang pasar produk lokal ke dalam jaringan hotel internasional tersebut. Strategi ini tentunya akan membuka peluang produk lokal dikenal di mancanegara dan sebaliknya jalur khusus yang dimiliki oleh jaringan hotel internasional tersebut harus dibatasi agar pertumbuhan impor tidak menggunakan jalur ini sebagai bagian dari strategi dagang Indonesia, khususnya Bali dalam era perdagangan bebas.

ACFTA sebagai praktek dari bekerjanya perdagangan bebas di tingkat regional juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Dalam kasus dampak dari perdagangan bebas di daerah pariwisata, dimana konsumen dari mancanegara memiliki peluang sebagai konsumen yang akan menjadi calon konsumen produk Indonesia atau Bali. Namun produk impor tetap tumbuh, karena permintaan dari wisatawan itu sendiri atau ada proses impor yang tidak tersentuh oleh kebijakan perdagangan pemerintah. Di tengah perdagangan bebas, instrumen tarif merupakan sasaran untuk diturunkan, tetapi pemerintah memiliki peluang untuk mengelola perdagangan dengan instrumen non tarif seperti kebijakan penggunaan produk lokal kepada sejumlah pengelola perhotelan.

Kebijakan tarif pada produk tertentu masih diperlukan terutama untuk menumbuhkan pelaku usaha lokal memenuhi permintaan pasar, terutama produk yang sudah dapat diproduksi oleh pelaku usaha lokal. Persoalannya adalah, memasok produk lokal kepada industri perhotelan memerlukan pelaku usaha lokal yang tangguh, terutama dalam mengelola faktor-faktor produksi yang secara kontinuitas memiliki jaminan yang tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan hotel-hotel internasional. Selain itu, usaha lokal memerlukan dukungan pemerintah terutama dalam menjamin pertumbuhan usaha dan peraturan-peraturan yang menjamin pelaku usaha mendapat jaminan berusaha dan kesempatan memasarkan produknya.

Selain itu, pariwisata yang menjual alam dan budaya berhadapan dengan permintaan akomodasi yang tinggi mengikuti permintaan wisatawan. Hal ini berdampak pada daya dukung lingkungan dan budaya sebagaimana tampak dari protes kelompok pemuda di Bali terhadap pertumbuhan akomodasi di sejumlah tempat suci. Pemerintah harus mengelola pertumbuhan usaha dan keseimbangan lingkungan baik fisik maupun budaya. Perdagangan bebas secara riil meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, tetapi permintaan berhadapan dengan daya dukung dan nilai kemanfaatan terhadap masyarakat Bali. Keseimbangan ini harus terus dicarikan jalannya, agar pertumbuhan perdagangan memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat Bali, bukan hanya dari sisi ekonomi tetapi juga keberlangsungan budaya yang juga merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan.

Tantangan lainnya, adalah mengatasi defisit perdagangan dengan Cina, dimana diakui oleh Gubernur Bali, bahwa dalam konteks perdagangan antara Bali dengan Cina terjadi defisit. Walaupun defisit dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barang modal akibat pertumbuhan akomodasi perhotelan atau industri pariwisata di Bali. Untuk produk sejenis, seharusnya pemerintah harus cepat mengidentifikasi agar produk sejenis dengan produk lokal dapat menggantikan produk impor, sehingga perlu dikurangi dampak produk impor mengganti produk lokal yang berdampak pada defisit perdagangan. Apabila defisit perdagangan juga terjadi pada produk yang sejenis dengan produk lokal maka itu dapat mengganggu pertumbuhan usaha lokal. Dengan demikian pemberlakuan tarif perlu dipikirkan untuk menjaga pertumbuhan usaha di Bali.

BAB VI

PENUTUP

Pariwisata telah melahirkan permintaan akan barang dan jasa tertentu. Ini yang menggerakkan roda perekonomian Bali, dimana perdagangan barang dan jasa terjadi karena adanya aktivitas wisatawan di Bali. Keterkaitan pariwisata dan perdagangan perlu dikelola agar memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat Bali secara maksimal. Hal tersebut bisa diwujudkan apabila pemerintah memahami, bahwa terdapat pelaku usaha lokal dengan posisi yang berbeda-beda terutama dalam menghadapi persaingan sebagai dampak dari perdagangan bebas.

Pemerintah perlu memberikan perlindungan secara proposional terhadap pelaku usaha lokal yang membutuhkan, seperti tuntutan dari penyedia jasa perhotelan yang semakin sempit tingkat keuntungannya akibat pertumbuhan pelaku usaha baru yang memiliki jaringan internasional. Pertumbuhan usaha perhotelan juga berhadapan dengan daya dukung lingkungan. Oleh karenanya dalam konteks perdagangan bebas keseimbangan pertumbuhan perlu diupayakan agar pelaku usaha lokal dapat mengoptimalkan manfaat dari adanya perdagangan.

Di sisi lain, perdagangan bebas memunculkan pelaku usaha kreatif yang bermunculan sebagai dampak dari perdagangan bebas. Munculnya pelaku usaha dengan kreativitas dan inovasi baru bukan muncul dari fasilitas proteksi, tetapi tumbuh akibat persaingan. Pertumbuhan ini perlu dijaga dan diberikan insentif, terutama dalam memperluas pasar dan kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan.

Hal lainnya yang muncul adalah pelaku usaha yang membutuhkan perlakuan khusus terkait tarif. Terutama di sektor perdagangan terutama pasokan kebutuhan wisatawan seperti minuman keras. Tarif impor yang tinggi kurang menumbuhkan pelaku usaha lokal, terutama yang dapat memberikan margin keuntungan. Tarif yang tinggi menyebabkan pelaku usaha yang bekerja

di bidang ini semakin terbatas, karena membutuhkan modal yang lebih besar. Ini hanya akan dinikmati oleh penyedia jasa perhotelan internasional.

Pemerintah perlu melihat kepentingan para *stakeholder* yang terkait dengan perdagangan. Minimnya kewenangan pemerintah daerah dalam perdagangan seharusnya menumbuhkan hubungan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pusat. Pada kasus kebutuhan bahan baku untuk industri kerajinan, seharusnya pemerintah pusat mengambil peran untuk mendukung pengembangan pasar pengrajin Bali dengan memastikan pasokan bahan baku dari daerah lainnya di Indonesia. Hubungan yang bersifat koordinatif tersebut juga dibutuhkan untuk mengantisipasi ketidakseimbangan perdagangan terutama defisit perdagangan. Antisipasi diperlukan apabila defisit perdagangan sudah menyentuh atau menggantikan pasar produk lokal. Ancaman ini perlu menjadi tanggungjawab dan seharusnya diantisipasi juga oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya pemerintah pusat harus membangun proses pencatatan perdagangan yang juga mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam dokumen Surat Keterangan Asal Barang, baik dari Bali sendiri maupun yang masuk ke Bali. Informasi hasil pencatatan perlu disampaikan kepada pemerintah daerah dan mencari kebijakan yang tepat untuk mengatasainya. Untuk itu dibutuhkan upaya integrasi pencatatan lalu lintas barang, dimana dokumen yang harus diisi oleh eksportir atau importir dapat mewakili gambaran sebenarnya lalu lintas barang dan juga mengantisipasi perdagangan yang melanggar hukum dan arah kebijakan perdagangan nasional ataupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

Audretsch, D. B. 1998. *Introduction to Industrial Policy and Competitive Advantage*, Vol 1-3, Aldershot: Edward Elgar.

Bhagwati, Jagdish N. 2002, *Free Trade Today*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hazari, Bharat R and Hoshmand Reza (eds), 2011, *Tourism, Trade and Welfare: Theoretical and Empirical Issues*. New York: Nova Science Publishers.

Chao, Chi-Chur; Hazari, Bharat R, Laffargue, 2011. "Is Free Trade Optimal for a Small Open Economy with Tourism?" di dalam Hazari, Bharat R and Hoshmand Reza (eds), *Tourism, Trade and Welfare: Theoretical and Empirical Issues*, New York: Nova Science Publishers.

Krugman, Paul. 1993. "Protection in Developing Countries", dalam Dornbusch Rudiger (ed). *Policy Making in The Open Economy*. London: Oxford University Press.

Suhartono, 2008. "Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali: Antara Kebijakan Kemitraan dan Persaingan", dalam *Majalah KAJIAN* Vol. 13, No.3, September 2008. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Internet

Abeng, Emil, "ACFTA, antara Harapan dan Realitas" diunduh dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/acfta-antara-harapan-dan-realitas/>

"Pemuda Hindu Unjuk rasa Protes Perusajan Alam Bali", diunduh dari <http://www.tempointeraktif.com>, 21 Oktober 2010.

<http://202.134.4.124/news/item/bali-tourism-boost-foreign-trade-“surplus-perdagangan-bali-china”> diunduh dari <http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/surplus-perdagangan-bali-china-qiauj9.html>

“Volume Perdagangan Bali-China Meningkat” diunduh dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/11/11/181072/129/101/Volume-Perdagangan-Bali-China-Meningkat>

Surat Kabar

“Aksi Lokal Membendung Dominasi Global”, Jawa Pos, 10 Oktober 2010





BAGIAN4

PERKEMBANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR PROVINSI BALI MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

*Achmad Sani Alhusain**

* Penulis adalah Peneliti Muda bidang Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. Email: sani_alhusain@yahoo.com

BABI PENDAHULUAN

Pemberlakuan perdagangan bebas antara ASEAN dan China (ACFTA) pada tanggal 1 Januari 2010 menjadi tantangan yang nyata bagi prospek perdagangan nasional. Dengan diberlakukannya ACFTA ini disinyalir dapat mengancam eksistensi perdagangan dalam negeri seiring dengan semakin membanjir produk China dengan harga yang lebih murah. Harga yang relatif lebih murah tersebut menjadikan produk China semakin digemari oleh konsumen dalam negeri.¹ Kebijakan ACFTA sendiri melibatkan enam negara di kawasan ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya di tahun 2015, negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam juga akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

Pemberlakuan ACFTA tersebut mendapat tanggapan dari banyak pihak, terutama dari pelaku usaha. Tanggapan pelaku usaha, seperti disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Erwin Aksa, kebijakan ACFTA sangat riskan karena ketidakseriusan dalam persiapannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ACFTA akan mengancam sejumlah kawasan industri. Padahal China sendiri sudah mempersiapkan sejak 8 sampai 10 tahun lalu, sedangkan Indonesia cuma dalam hitungan bulan.² Ancaman ACFTA ini bukan hanya pada sektor perdagangan tetapi secara langsung akan berimbas pada perkembangan industri dapat dilihat dari sektor industri karena ketidaksiapan industri nasional. Ketidaksiapan ini diawali sejak tahun 2005 dimana terjadi penurunan tarif bea masuk (*import duties*) dan secara bertahap berlanjut hingga penghapusan tarif nol persen pada 2010. Dengan kondisi ada bea masuk 5%, industri nasional sudah mulai banyak yang gulung tikar, karena harga-harga produk China seperti alat elektronik, tekstil, manufaktur, dan lain-lain jauh lebih murah dibanding produk nasional.

1 Kompas.com, Minggu 3 Januari 2010

2 "Pasar Bebas ASEAN-China Ancam Kawasan Industri," 20 Desember 2009 (<http://www.tempo.interaktif.com>, diakses 3 Februari 2010).

Untuk menghadapi perdagangan bebas ini, strategi yang harus dilakukan tentunya harus merupakan tata kelola yang mensinergikan berbagai potensi, kekuatan dan daya dukung sektoral lainnya. Pemilihan strategi ini harus tetap memperhatikan kondisi nyata terhadap kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, kualitas sumber daya manusia yang rendah, persaingan global, dan rendahnya pendapatan masyarakat.

Hal ini tentunya akan menjadi perhatian pengusaha-pengusaha di daerah untuk bersaing dengan produk luar khususnya dari China. Disamping itu, untuk meningkatkan daya saing produk lokal, bukan hanya pemerintah pusat tetapi pemerintah daerahpun dituntut untuk mempersiapkan diri agar dapat memberi dukungan bagi pengusaha daerahnya untuk mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing produk perdagangannya. Terlebih setelah dengan adanya otonomi daerah dimana semua daerah sangat memiliki peran dalam perekonomian daerah.

Kebijakan desentralisasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Melalui desentralisasi ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh daerah mempunyai peluang untuk mendapat kesempatan meraih kesejahteraan secara merata. Terutama menghadapi persaingan di era pasar bebas regional maupun global, kebijakan desentralisasi ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah haruslah mampu meningkatkan kemampuan daya saing pelaku ekonomi nasional dan daerah. Termasuk di antaranya adalah kebijakan di sektor perindustrian dan perdagangan, terutama daerah-daerah yang secara langsung dapat melakukan perdagangan pada kawasan regional maupun global. Pembangunan sektor industri dan perdagangan pada saat ini dan masa depan dihadapkan pada tantangan untuk menuju industri maju dan masyarakat niaga tangguh yang mampu membentuk dinamika industri dan perdagangan yang efisien dan efektif dalam menghadapi era globalisasi, sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan, seperti pembentukan blok ACFTA, tampaknya telah menjadi fenomena dunia yang tidak terelakkan. Sebagai anggota masyarakat dunia, setiap negara akan terkena arus liberalisasi perdagangan dunia tidak terkecuali Indonesia. Namun demikian dapat dikatakan bahwa tidak satu pun pelaku usaha Indonesia yang senang dengan ACFTA. Kebijakan liberalisasi perdagangan akan berdampak negatif terhadap pelaku usaha yang kurang mampu bersaing. Pelaku usaha tahu persis, Indonesia, sebagaimana kebanyakan negara ASEAN, tidak akan mampu mengungguli

produk baik dari China bahkan Vietnam. Sebelum memasuki ACFTA pun, ASEAN sudah kebanjiran produk China. Sekarang, dengan bea masuk nol persen, produk China dan Vietnam akan semakin mencengkeram pasar domestik. Pelaku usaha akan mengalami kesulitan dan konsekuensi paling nyata adalah PHK buruh tidak terelakkan.

Ada beberapa kendala yang memicu kegaman para industriawan dan pelaku perdagangan tersebut adalah daya saing masih rendah karena tingkat produktivitas dan penguasaan keterampilan yang rendah dalam menghadapi persaingan. Disamping itu juga karena ketiadaan produk unggulan yang memiliki potensi dalam menghadapi produk-produk impor dan untuk ekspor ke negara lain, akan menyebabkan akses pemasaran menjadi sulit, terutama dengan kondisi pasar di Indonesia yang begitu mudah dimasuki oleh negara lain. Selain itu pelaku usaha juga menghadapi kekurangan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku yang murah. Karena itu, jika kendala ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah maka akan mengakibatkan kebangkrutan industri dan usaha perdagangan lokal. Tapi, untuk kepentingan jangka panjang kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Indonesia, dengan potensi pasar 230 juta jiwa seharusnya tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia menempati peringkat keempat setelah China (1,3 miliar), India (1,1 miliar), dan AS (340 juta). Sebagaimana China, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan jumlah penduduk yang besar untuk menggapai globalisasi dan liberalisasi.

Di sisi lain para pedagang dan konsumen mungkin tidak memperlakukan perkembangan ini. Bagi pedagang, yang penting adalah margin laba yang besar. Sebagian dari mereka sebelumnya adalah pemilik pabrik tekstil dan garmen sehingga mereka akan beralih sebagai importir dengan pertimbangan harga produk hasil impor jauh lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Namun implikasi yang dihadapi adalah semakin terkurasnya devisa negara.

Sayangnya, pemerintah justru tidak sedikit pun menunjukkan kekhawatiran terhadap membanjirnya produk China. Seolah ada anggapan bahwa dengan mengikuti ACFTA, tidak akan ada masalah bagi Indonesia. Para menteri dan pejabat pemerintah lebih banyak bicara teori bahwa Indonesia harus bisa bersaing di pasar global dan tidak boleh takut menghadapi produk negara lain, termasuk produk China. Dalam hal ini pemerintah lupa bahwa persaingan itu ada syaratnya. China tidak membuka pasarnya ketika industri manufakturnya belum kuat. Karena itu China memproteksi produk dalam negerinya selama beberapa dekade sebelum ikut dalam persaingan bebas. Setelah industri

manufakturnya kokoh dalam dekade terakhir, China baru berani membuka pasar. Adanya strategi tersebut menjadikan saat ini negara-negara lain tidak mampu menahan produk China. Bahkan AS dan negara-negara Eropa tidak mampu menandinginya. Kelebihan produk China adalah sangat unggul dalam harga yang rendah. Jadi, meskipun mutunya kurang baik, konsumen tetap tergiur karena kualitas produk China tidak rendah dan mutunya terus mengalami perbaikan.

Kondisi tersebut di atas tidak saja menjadi tantangan bagi pemerintah pusat, namun telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi keterbukaan pasar regional dan global. Hal ini terjadi mengingat dalam otonomi daerah banyak daerah yang telah melakukan dan interaksi langsung untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor dari kegiatan industri. Tentunya hal ini perlu adanya sinkronisasi regulasi dalam upaya menghadapi keterbukaan pasar di kawasan regional dan global. Sesuai dengan itu maka Bab ini akan menelaah perkembangan perdagangan ekspor dan impor provinsi Bali dan upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan perdagangan ekspor dan impor tersebut pasca pemberlakuan ACFTA. Pembahasan difokuskan pada perkembangan perdagangan ekspor dan impor Provinsi Bali secara keseluruhan, berbagai kendala yang dihadapi Provinsi Bali dalam memajukan perdagangan ekspor dan impor, serta langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Bali. Namun sebelumnya akan dipaparkan secara singkat implikasi dan manfaat perdagangan bebas terhadap perekonomian nasional, serta bererapa kebijakan yang diambil negara-negara berkembang untuk mengoptimalkan manfaat perdagangan global.

BAB II

PARTISIPASI DALAM PERDAGANGAN GLOBAL: IMPLIKASI, MANFAAT DAN KEBIJAKAN

A. Implikasi Perdagangan Bebas

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar-daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki dan pada umumnya berbeda antar satu dengan kawasan regional lainnya.

Konsekuensi dari kebijakan perekonomian terbuka seperti pasar bebas ASEAN-China yang diambil akan berdampak kepada keseluruhan faktor-faktor kegiatan perekonomian Indonesia. Dampak kepada faktor Internal, yaitu faktor internal ekonomi seperti kondisi fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, realisasi APBN, kebijakan ekonomi pemerintah di bidang fiskal dan moneter serta perkembangan ekspor nasional. Faktor internal non-ekonomi, seperti kondisi politik, sosial-masyarakat, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah). Faktor eksternal, seperti prospek perekonomian dan perdagangan dunia, kondisi politik global dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Menurut Chacholiades (1978)³, partisipasi dalam perdagangan global atau internasional bersifat bebas (*free*) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan (*choice*) dengan pertimbangan secara ekonomi dan politik, sehingga sering dikatakan

3 Chacholiades, M. *International Trade Theory and Policy*. McGraw-Hill 1978.

perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua pihak (*mutually benefited*). Dalam sistem ekonomi tertutup (*autarchy*) negara hanya dapat mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi dengan melakukan perdagangan (*open economic*) suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya memproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi (Chacoliades, 1978; Chaves et al, 1993)⁴.

Perdagangan yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdagangan⁵ (Kindleberger dan Lindert, 1978). Dijelaskan oleh Hadi (2003)⁶, selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara, liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan peningkatan efisiensi ekonomi. Namun demikian, karena terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan⁷.

Pada kondisi semakin kuatnya tekanan untuk meliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuan kendala atau hambatan tersebut dalam perdagangan akan menentukan derajat keterbukaan pasar. Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintah suatu negara menurunkan tarif (bea masuk) produk yang diperdagangkan (*tariff reduction*) dan menghilangkan hambatan-hambatan nontarif (*non tariff barriers*). Hal sebaliknya terjadi bila pemerintah cenderung menaikkan tarif dan meningkatkan hambatan nontarif. Dengan keputusan tersebut, implikasi terhadap perekonomian secara umum dan neraca perdagangan yang menggambarkan dari perkembangan ekspor-impor Indonesia

4 Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones. *World Trade and Payments An introduction*. Sixth Edition. Harper Collins. New York. 1993.

5 Kindleberger, C.P. and P.H. Lindert. *International Economics* Six Edition. Richard D. Irwin. Inc. Homewood. Illinois 60430. 1978.

6 Hadi, PU. *Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

7 Abidin, Z. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. Disertasi, tidak dipublikasikan tahun 200... Program Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

secara keseluruhan dan provinsi yang bersangkutan dengan dengan berbagai negara yang melakukan interaksi perdagangan langsung.

B. Manfaat Partisipasi dalam Perdagangan Global

Menurut Sadono Sukirno⁸, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
2. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya: Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.
3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
4. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.
5. Memperluas pasar dan menambah keuntungan
6. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.
7. Transfer teknologi modern
8. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

C. Kebijakan dalam Menghadapi Perdagangan Global

Umumnya negara sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari

8 Sukirno sadono, "Makro Ekonomi Teori Pengantar", 2004.

negara-negara lain. Secara teoritis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri.⁹

1. Kebijakan Promosi Ekspor

Selain menghasilkan devisa, kebijakan promosi ekspor dapat melatih dan meningkatkan daya saing atau produktivitas para pelaku ekonomi domestik. Umumnya, negara sedang berkembang mengeksport hasil-hasil sektor primer (pertanian dan pertambangan) atau hasil-hasil industri yang telah ditinggalkan negara-negara yang lebih dahulu maju. Thailand misalnya, sangat terkenal sebagai negara yang mampu menghasilkan devisa dari ekspor hasil pertanian. Sementara Indonesia, memperoleh devisa yang besar dari ekspor tekstil. Saat ini mereka tidak lagi menambah perhatian pada sektor-sektor tersebut, melainkan berkonsentrasi pada industri yang padat ilmu pengetahuan, misalnya komputer dan peralatan komunikasi canggih atau peralatan militer modern. Hal ini dikarenakan nilai rambah dari penjualan produk-produk tersebut lebih tinggi dari yang dihasilkan industri mobil atau tekstil.

2. Kebijakan Substitusi Impor

Kebijakan substitusi impor adalah kebijakan untuk memproduksi barang-barang yang diimpor. Tujuan utamanya adalah penghematan devisa. Di Indonesia, pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah substitusi impor. Jika tahap substitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya menempuh strategi promosi ekspor.

3. Kebijakan Proteksi Industri

Kebijakan proteksi industri umumnya bersifat sementara, sebab tujuannya untuk melindungi industri yang baru berkembang, sampai mereka mampu bersaing. Jika industri tersebut sudah berkembang, maka perlindungan dicabut. Perlindungan yang diberikan biasanya adalah pengenaan tarif dan atau pemberian kuota untuk barang-barang produk negara lain yang boleh masuk ke pasar domestik.

9 Wijayantra & Widyaningsih, "Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi", hal 94.

BAB III

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI BALI

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator makro ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan diperlukan untuk mengetahui arus keluar masuk barang dan jasa ke suatu wilayah. Seiring dengan era globalisasi, dimana integrasi antar wilayah semakin kuat, neraca perdagangan (ekspor dan impor) memegang peranan yang semakin penting dalam menentukan laju perekonomian suatu daerah. Prinsip-prinsip perdagangan multilateral dan terbuka serta perdagangan bebas membuat daya saing antar wilayah semakin ketat. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi kinerja ekspor nasional maupun regional. Kendala yang dihadapi dalam perdagangan dunia selain harga dan kualitas komoditi ekspor, juga persaingan dengan eksportir negara lain, proteksionisme dan sistem kuota. Bagi negara yang belum maju dengan teknologi yang masih terbatas akan terasa sulit menghadapi persaingan dalam pasar bebas. Konsekuensi logis dari semua itu adalah perlunya kerja keras dari pemerintah untuk menunjang dan meningkatkan kelancaran ekspor, khususnya ekspor non migas melalui kebijakan berupa kemudahan prosedur ekspor, penurunan pajak ekspor, serta berbagai fasilitas kemudahan bagi para eksportir.

Disisi impor, impor (barang baku) yang dilakukan suatu wilayah diharapkan mampu menunjang dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Bahan baku dari luar negeri akan diubah menjadi barang jadi yang kemudian akan di ekspor kembali. Selain itu, impor berfungsi untuk menjaga ketersediaan kebutuhan barang dan jasa serta meningkatkan pendayagunaan devisa dalam rangka menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Kebijakan impor mengenai tarif bea masuk dan penyempurnaan tata niaga impor juga tidak kalah pentingnya menjadi perhatian bagi pemerintah.

Sementara ini Provinsi Bali memiliki fasilitas pelabuhan udara internasional dan pelabuhan laut tentunya dapat menunjang aktifitas perdagangan luar negeri. Adanya fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan mendayagunakan impor bagi kelangsungan pembangunan Provinsi Bali. Selama periode 2004-2008, kinerja neraca perdagangan barang luar negeri Provinsi Bali secara umum menunjukkan kondisi yang cenderung berfluktuasi. Selama periode tersebut, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi pada tahun 2006, yakni mencapai 270.860 ribu dollar AS. Pada tahun 2004, surplus neraca perdagangan sebesar 207.458 ribu dollar AS, kemudian menurun di tahun selanjutnya menjadi 135.697 ribu dollar AS. Surplus neraca perdagangan kembali meningkat di tahun 2006 menjadi 270.860 ribu dollar AS. Namun peningkatan tersebut tidak bertahan lama karena di tahun selanjutnya yaitu 2007 dan 2008 kembali mengalami penurunan masing-masing menjadi 243.433 ribu dollar AS dan 164.233 ribu dollar AS. Posisi neraca perdagangan Provinsi Bali yang fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pelambatan kinerja ekonomi global (krisis finansial global) dan makin ketatnya aturan yang diterapkan negara-negara tujuan ekspor Provinsi Bali, disamping berbagai faktor internal yang terjadi dalam negeri.

A. Perkembangan Ekspor

Bagi Provinsi Bali kegiatan ekspor mempunyai peranan penting sebagai penggerak perekonomian daerah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan ekspor dalam konteks ini adalah kegiatan ekspor barang antar negara yang dinilai dengan harga FoB (*Free on Board*), yakni penyerahan barang ekspor di pelabuhan muat. Pengertiannya, harga barang sampai di atas kapal negara pengeksport meliputi harga barang, pajak ekspor, biaya pengangkutan sampai kebatas negara, biaya asuransi, komisi, biaya pembuatan dokumen, biaya kontainer, biaya pengepakan dan biaya pemuatan barang ke kapal / pesawat udara atau alat transportasi lainnya.

Tabel 1: Perkembangan Beberapa Indikator Ekspor Barang Provinsi Bali Tahun 2004-2008

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
Total Ekspor Bali (US\$)	236.690.278,00	224.442.264,00	298.629.095,00	287.725.362,00	267.506.837,00
Total PDRB Bali harga berlaku (juta Rp)	28.986.595,66	33.946.467,53	37.388.484,90	42.336.424,40	49.922.604,45
Ekspor PDRP Bali harga berlaku (juta Rp)	13.149.055,30	14.183.640,70	15.434.082,34	17.002.856,35	39.026.746,03
Andil Total Ekspor Bali terhadap Total PDRB (%)	7,18	6,09	7,30	6,23	5,19

Andil Total Ekspor Bali terhadap Ekspor PDRB (%)	15,82	14,58	17,69	15,51	6,64
Ekspor Non Migas Nasional (juta US\$)	55.939,30	66.428,50	79.589,10	92.012,30	107.894,10
Andil Ekspor Bali terhadap Ekspor Non Migas Nasional (%)	0,42	0,34	0,38	0,31	0,25

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2007, BPS Pusat dan Tahun 21010 (diolah kembali)

Keterangan : Kurs tahun 2004: 1 US\$ ~ Rp. 9.790

Kurs tahun 2005: 1 US\$ ~ Rp. 9.212

Kurs tahun 2006: 1 US\$ ~ Rp. 9.141

Kurs tahun 2007: 1 US\$ ~ Rp. 9.164

Kurs tahun 2008: 1 US\$ ~ Rp. 9.693

Secara umum, perkembangan ekspor barang dari Provinsi Bali selama periode 2004-2008 mengalami fluktuasi seperti tampak pada tabel di atas. Pada tahun 2004, nilai ekspor barang yang dinilai dengan harga *Free on Board* tercatat sebesar 236.690 ribu dollar AS. Selanjutnya ekspor Provinsi Bali pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 224.442 ribu dollar AS. Penurunan nilai ekspor (baik secara nominal maupun dalam pembentukan PDRB) menunjukkan bahwa di tahun ini kinerja ekspor Provinsi Bali mengalami tekanan. Tekanan ini tidak saja berasal dari luar negeri melainkan situasi dalam negeri juga turut memiliki andil. Adanya berbagai aturan baru yang diterapkan negara tujuan ekspor sedikit banyak merugikan eksportir kita, serta meningkatnya harga BBM di dalam negeri. Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya produksi, yang merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi ekspor Provinsi Bali di tahun 2005. Namun demikian, pada tahun selanjutnya (2006) ekspor Provinsi Bali kembali menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pada tahun 2006 ini, ekspor Provinsi Bali meningkat sebesar 33,05% hingga mencapai 298.629 ribu dollar AS. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2007 kinerja ekspor Provinsi Bali kembali mengalami penurunan menjadi 287.725 ribu dollar AS. Penurunan tersebut kemudian berlanjut pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2008 menjadi 267.507 ribu dollar AS.

Penurunan kinerja ekspor tersebut disebabkan karena dampak krisis ekonomi global yang mulai terasa di pertengahan tahun 2008 dan kurangnya respon pasar terhadap barang yang dihasilkan dalam negeri. Respon yang kurang tersebut disebabkan oleh harga jual barang dalam negeri yang mahal karena mahalnya bahan baku dan biaya pengangkutan. Selain itu, masuknya negara-negara distributor yang menawarkan harga barang yang murah mengakibatkan

ekspor Provinsi Bali mengalami banyak tekanan.

Dengan menurunnya nilai ekspor Provinsi Bali, andil total ekspor terhadap total PDRB harga berlaku selama Tahun 2008 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2007 Andilnya sebesar 6,23% maka pada tahun 2008 Andilnya menurun menjadi 5,19%. Demikian juga untuk andil ekspor Provinsi Bali terhadap total ekspor non-migas nasional pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 0,25% dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,31%. Sementara itu, andil ekspor barang Provinsi Bali terhadap ekspor PDRB harga berlaku juga mengalami penurunan yaitu dari 15,51% menjadi 6,64%. Perkembangan nilai ekspor dan volume ekspor Provinsi Bali per bulan, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2: Nilai Ekspor Barang Provinsi Bali per Bulan Tahun 2004-2008
(dalam US\$)

Bulan	2004	2005	2006	2007	2008
Januari	23.543.214	19.740.194	40.235.148	27.927.122	21.463.458
Februari	21.676.299	21.555.600	31.948.731	25.078.120	24.209.969
Maret	25.460.729	17.663.907	9.036.155	25.052.154	25.220.797
April	25.910.742	29.866.021	13.704.968	25.041.770	26.738.951
Mei	6.634.996	15.951.565	13.419.734	23.629.102	22.912.872
Juni	6.499.998	19.576.414	12.264.572	20.455.317	20.391.294
Juli	3.533.800	27.156.850	42.857.056	22.343.350	19.735.962
Agustus	33.693.424	28.975.729	36.193.799	21.051.993	19.463.987
September	36.981.143	11.238.051	32.750.200	24.174.433	23.448.135
Oktober	23.690.881	9.268.098	24.263.102	24.306.742	22.471.312
November	8.043.556	7.852.814	21.475.570	25.755.922	21.405.962
Desember	21.021.496	15.597.021	20.480.060	22.909.337	20.042.138
Total	236.690.278	224.442.264	298.629.095	287.725.362	267.506.837

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah), tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan perkembangan nilai ekspor barang Provinsi Bali per bulan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai ekspor tertinggi Provinsi Bali tahun 2008 adalah pada bulan April yang mencapai 26.738.951 US\$. Sedangkan nilai ekspor terendah pada bulan Agustus yang hanya sebesar 19.465.987 US\$.

B. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Seperti dilihat pada tabel dibawah ini, 3 negara tujuan ekspor barang terbesar dari Provinsi Bali pada tahun 2008 adalah Jepang, Amerika Serikat dan

Singapura dengan nilai ekspor masing-masing sebesar 57.875 ribu dollar AS, 40.259 ribu dollar AS dan 33.273 ribu dollar AS. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertukaran posisi peringkat antara Italy dan Hongkong dari peringkat 6 peringkat 4 begitupun sebaliknya menjadi menarik dalam hal ini. Pada tahun 2007, Italy menempati urutan ke-4 kemudian turun ke urutan ke 6 pada tahun 2008 dengan nilai ekspor sebesar 14.343 ribu dollar AS. Sebaliknya posisi Hongkong pada tahun 2007 yang menempati posisi ke 6 meningkat ke posisi ke 4 pada tahun 2008 dengan nilai ekspor sebesar 20.607 ribu dollar AS.

Tabel 3: Nilai dan Pangsa Ekspor Barang Provinsi Bali Menurut Negara Tujuan Tahun 2007-2008

Peringkat 2007	Uraian			Peringkat 2008	Uraian		
	Volume (000 kg)	Nilai (000 US\$)	Pangsa (%)		Volume (000 kg)	Nilai (000 US\$)	Pangsa (%)
Jepang	157220	60878	21,16	Jepang	10292	57875	21,64
USA	4939	43399	15,08	Usa	3600	40259	15,05
Singapura	1308	31951	11,10	Singapura	2992	33273	12,44
Italia	1930	19045	6,62	Hongkong	590	20608	7,70
Australia	3107	18603	6,47	Australia	2750	20357	7,61
Hongkong	589	12551	4,36	Italia	977	14343	5,36
Inggris	829	11397	3,96	Inggris	610	9356	3,50
Jerman	1786	10973	3,81	Prancis	2064	9023	3,37
Perancis	2089	10668	3,71	Jerman	981	8480	3,17
Slovakia	230	8853	3,08	Taiwan	2089	5404	2,02
Lainnya	53776	59407	20,65	Lainnya	8748	48527	18,14
Jumlah	227803	287725	100,00	Jumlah	35693	267507	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah), tahun 2010

C. Sepuluh Kelompok Terbesar Komoditi Ekspor

Pada saat terjadi krisis global dunia, negara adidaya Amerika Serikat mengalami resesi yang serius sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya menggerus daya beli masyarakat Amerika. Hal ini sangat mempengaruhi negara-negara lain karena Amerika Serikat merupakan pangsa pasar yang besar bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat Amerika menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia. Tidak hanya Amerika, negara-negara pengimpor barang dari Indonesia juga sudah mulai mengurangi pasokan impornya, seperti Jepang dan Negara-negara Uni Eropa.

Provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang banyak mengekspor barang-barang kerajinan (*handycraft*) yang termasuk dalam produk-produk manufaktur bernilai tambah rendah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk dan juga mencari pangsa pasar baru untuk pemasaran produknya sehingga apabila terjadi krisis-krisis semacam ini di tahun-tahun yang akan datang tidak akan lagi membuat perekonomian Provinsi Bali terpuruk.

Berdasarkan tabel dibawah ini perhiasan dari perak menempati urutan pertama sebagai komoditas ekspor dengan nilai ekspor tertinggi di Provinsi Bali tahun 2008. Nilai ekspor perhiasan dari perak tersebut mencapai 28.566 ribu dollar AS dan menguasai hampir 11 % pangsa pasar ekspor di Provinsi Bali. Sementara itu, untuk urutan kedua ditempati oleh tuna sirip kuning, eksklusif fillet, hati dan telur ikan segar atau beku, dengan nilai ekspor mencapai 24.786 ribu dollar AS dengan berat 5.608 ribu kg. Untuk komoditi lainnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4: Sepuluh Kelompok Komoditas Ekspor Barang Terbesar Provinsi Bali Tahun 2008

No.	Kelompok Komoditas	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Pangsa Nilai (%)
1.	Perhiasan dari Perak	178923	28565710	10,68
2.	Tuna Sirip Kuning, Eksklusif Fillet, Hati dan Telur Ikan segar / beku	5607789	24786392	9,27
3.	Bagian dari Perhiasan Perak	21264	22796977	8,52
4.	Tuna Mara Besar, Eksklusif Fillet, Hati dan Telur Ikan segar / beku	3172143	14005702	5,24
5.	Patung atau Barang dari Kayu	2593501	6908061	2,58
6.	Mutiara yang belum di olah	695	6770957	2,53
7.	Pakaian Wanita dengan bahan selain Tekstil, selain pakaian renang dari sutera dan rami	293449	6757198	2,53
8.	Pakaian Wanita dengan bahan selain tekstil selain dari sutera dan rami	245932	5909089	2,21
9.	Pakaian berbahan Fiber Sintetik	208756	4686740	1,75
10.	Kerapu segar / beku	1799756	4595631	1,72
11.	Komoditas Lainnya	21570116	141724380	52,98
	Jumlah	35692324	267506837	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah), Tahun 2010

D. Perkembangan Impor

Pada tahun 2008, total impor Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 44.292.313 dollar AS menjadi 103.283.675 dolar AS. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan

(demand) beberapa komoditi impor dari luar negeri ke wilayah Provinsi Bali. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan impor dalam konteks ini adalah kegiatan impor barang antar negara yang dinilai dengan harga CIF (*Cost Insurance and Freight*) yaitu Penyerahan barang impor di pelabuhan barang tujuan. Pengertiannya harga barang sampai di pelabuhan negara pengimpor, meliputi biaya pengangkutan dari batas negara pengekspor ke batas negara pengimpor, biaya bongkar barang dan biaya asuransi pengirim.

Secara umum perkembangan impor barang Provinsi Bali dari mancanegara selama kurun waktu 2004-2008 mengalami fluktuasi seperti diperlihatkan pada tabel di bawah. Pada tahun 2004 nilai impor Provinsi Bali sebesar US\$. 29.232.063,00 lalu meningkat pada tahun 2005 hingga menjadi sebesar US\$ 88.745.434,00. Peningkatan tersebut tidak bertahan lama karena di tahun 2006, nilai impor Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar US\$ 27.769.303. kemudian merangkak naik kembali pada tahun 2007 dan 2008 hingga mencapai total nilai impor sebesar US\$ 103.283.675. pada tahun 2008.

Tabel 5: Perkembangan beberapa Indikator Impor Barang Provinsi Bali Tahun 2004-2008

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
Total Impor Bali (US\$)	29.232.063	88.745.434	27.769.303	44.292.313	103.283.675
Total PDRB Bali harga berlaku (juta Rp)	28.986.595,66	33.946.467,53	37.388.484,90	42.336.424,40	49.922.604,45
Impor PDRP Bali harga berlaku (juta Rp)	14.846.492,10	17.558.215,96	18.062.592,48	22.646.097,50	29.318.340,06
Andil Total Impor Bali terhadap Total PDRB (%)	0,99	2,41	0,68	0,96	2,01
Andil Total Impor Bali terhadap Impor PDRB (%)	1,93	4,66	1,41	1,79	3,42
Impor Non Migas Nasional (juta US\$)	34.792,50	40.243,30	42.102,60	52.540,60	98.644,40
Andil Impor Bali terhadap Impor Non Migas Nasional (%)	0,08	0,22	0,07	0,08	0,10
Rasio Impor thd Ekspor Bali	0,12	0,40	0,09	0,15	0,39

Sumber: BPS Provinsi Bali, Buletin Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BPS Pusat (diolah kembali), tahun 2010

Keterangan: Kurs tahun 2004: 1 US\$ = Rp. 9.790
 Kurs tahun 2005: 1 US\$ = Rp. 9.212
 Kurs tahun 2006: 1 US\$ = Rp. 9.141
 Kurs tahun 2007: 1 US\$ = Rp. 9.164
 Kurs tahun 2008: 1 US\$ = Rp. 9.693

Peningkatan impor pada tahun 2008 juga mengakibatkan meningkatnya rasio impor terhadap ekspor barang yaitu mencapai 0,39%. Peningkatan juga terjadi pada andil impor Bali terhadap total PDRB yaitu menjadi 2,01%. Nilai ini hampir mendekati nilai di tahun 2005 yang mencapai 2,41%. Kedudukan komponen impor pada PDRB berlaku adalah sebagai faktor pengurang, peningkatan pada nilai impor maka akan mengurangi nilai PDRB. Semakin besar Nilai andil impor Bali terhadap PDRB harus disikapi serius pemerintah daerah karena hal ini menandakan semakin besar pula nilai impor daerah. Peningkatan juga terjadi pada andil impor barang Bali terhadap impor PDRB dan andil impor Bali terhadap impor non migas nasional yaitu masing-masing sebesar 3,24% dan 0,10% pada tahun 2008.

Secara bulanan selama tahun 2008, Nilai impor barang di Provinsi Bali mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Nilai impor tertinggi tercatat sebesar US\$ 13.972.814 terjadi pada bulan April. Sebaliknya, Nilai impor barang terendah terjadi pada bulan Februari yaitu senilai US\$ 3.064.092 seperti terlihat pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6: Nilai Impor Barang Provinsi Bali per Bulan tahun 2004-2008
(dalam US\$)

Bulan	2004	2005	2006	2007	2008
Januari	883.869	385.2781	2.317.671	1.754.858	8.353.010
Februari	3.229.837	31.567.766	2.319.696	2.493.023	3.064.092
Maret	1.626.004	2.870.105	2.491.970	1.791.002	9.819.098
April	1.992.740	3.088.132	1.720.882	1.335.883	13.972.814
Mei	2.192.766	2.979.003	1.844.957	5.214.422	7.169.503
Juni	3.332.775	4.228.305	2.091.385	2.046.048	5.004.079
Juli	3.732.329	2.836.555	2.529.635	2.817.749	11.050.483
Agustus	2.440.031	3.541.385	2.739.908	3.994.848	9.839.876
September	2.124.291	4.119.369	1.490.056	13.315.586	8.455.590
Oktober	1.712.217	5.286.225	2.402.402	2.956.710	10.667.435
November	1.913.708	22.136.246	2.630.686	3.790.941	6.644.217
Desember	4.051.496	2.239.562	3.190.055	2.781.241	9.243.478
Total	29.232.063	88.745.434	27.769.303	44.292.313	103.283.673

Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah), Tahun 2010

E. Impor menurut Asal Negara

Singapura menempati urutan pertama sebagai negara pengeksport terbesar ke Provinsi Bali pada tahun 2008 dengan nilai sebesar 24.257 ribu dolar AS atau menguasai hampir 24% dari total impor Bali. Negara pengeksport terbesar

kedua ditempati oleh Hongkong dengan nilai eksportnya yang mencapai 16.737 ribu dolar AS. Pada tahun 2008, USA mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat ketiga dengan nilai ekspor sebesar 15.824 ribu dolar AS.

Tabel 7: Sepuluh Negara Asal Impor Terbesar Provinsi Bali Tahun 2007-2008

Peringkat 2007	Uraian			Peringkat 2008	Uraian		
	Volume (000 kg)	Nilai (000 US\$)	Pangsa (%)		Volume (000 kg)	Nilai (000 US\$)	Pangsa (%)
Swiss	16	11200	25,29	Singapura	734	24457	23,68
USA	291	10757	24,29	Hongkong	559	16737	16,21
Australia	938	6158	13,90	USA	328	15824	15,32
Hongkong	390	4637	10,47	Australia	1221	9628	9,32
China	538	1695	3,83	China	2004	7968	7,71
Singapura	100	1609	3,63	Taiwan	1704	4792	4,64
Inggris	470	1174	2,65	Jerman	41	3952	3,83
Taiwan	840	1026	2,32	Jepang	207	3344	3,24
Jerman	34	673	1,52	Korea selatan	449	2799	2,71
Malaysia	1182	594	1,34	Thailand	1091	2633	2,55
Lainnya	705	4769	10,77	Lainnya	4106	11149	10,79
Jumlah	5504	44292	100,00	Jumlah	12444	103284	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah), tahun 2010

F. Sepuluh Kelompok Terbesar Komoditas Impor

Apabila diperhatikan dari sepuluh kelompok komoditas dengan nilai impor terbesar selama tahun 2008, maka peralatan kecantikan lainnya menguasai pangsa impor terbesar di Provinsi Bali yaitu mencapai 10,99% dengan volume impor 57.486 kg dan nilai impor sebesar 11.356 ribu dolar AS.

Perolehan nilai impor tertinggi kedua adalah bagian dari perhiasan perak yang mencapai 6.514 ribu dolar AS atau 6,31% dari seluruh nilai impor barang dari luar negeri, dengan volume 14.153 kg. Sementara itu, komoditas dengan nilai impor terbesar ketiga pada tahun 2008 adalah serbuk perak yang mencapai 2.998 ribu dolar AS atau 2,9% dari seluruh nilai impor. Tabel dibawah ini akan menjelaskan selanjutnya perolehan nilai impor terbesar provinsi Bali dari sepuluh komoditas selama tahun 2008.

Tabel 8 Sepuluh Terbesar Kelompok Komoditas Impor Barang Provinsi Bali Tahun 2008

No.	Kelompok Komoditas	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Pangsa Nilai (%)
1.	Perlengkapan kecantikan lainnya dan untuk perawatan kulit (selain medikan)	57486	11355780	10,99
2.	Bagian dari Perhiasan Perak	14153	6513842	6,31
3.	Serbuk perak	10200	2998432	2,90
4.	Peralatan dan perlengkapan navigasi lainnya	3553	2516498	2,44
5.	Bahan perak setengah jadi	6098	2192568	2,12
6.	Bagian lain dari mesin pemroses data otomatis	136220	2116194	2,05
7.	Mesin Keruk	3609000	1985468	1,92
8.	Sound Card dan Video Card	119958	1681194	1,63
9.	Perhiasan dari Logam Berharga lainnya	735	1587931	1,54
10.	Bagian lain dari Turbin gas	1835	1551243	1,50
11.	Komoditas Lainnya	8484668	68784525	66,60
	Jumlah	12443906	103283675	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah), tahun 2010

BAB IV

KENDALA PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI BALI



Selain pariwisata, Bali sebenarnya masih memiliki sumber pemasukan besar dari ekspor berbagai komoditas, baik itu sektor pertanian, hasil hutan maupun produk kerajinan. Bahkan, dalam catatan ekspor di Disperindag Bali, ekspor kerajinan maupun hasil tangkapan laut meningkat cukup tajam. Hanya potensi besar itu belum maksimal bisa diberdayakan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali¹⁰ menyatakan bahwa dengan adanya pemberlakuan ACFTA), tidak banyak berpengaruh kepada arus perdagangan ekspor dan impor Provinsi Bali. Bali memiliki karakteristik produk yang menjadi daya tarik konsumen. Keunggulan budaya yang dimiliki, membuat produk Bali tidak banyak mengalami penurunan permintaan ekspor. Pada awalnya pengusaha Bali sedikit cemas namun kecemasan tersebut tidak terbukti karena produk Bali sangat dikenal oleh konsumennya dan produk Bali sangat sulit untuk ditiru. Yang menyebabkan penurunan ekspor Bali adalah Krisis global yang terjadi baru-baru ini. Hal ini menyebabkan permintaan komoditas dekoratif/kerajinan menjadi menurun.

Namun demikian, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali Wayan menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi perdagangan Bali, antara lain, biaya tenaga kerja di Bali cukup tinggi, bahan baku untuk memproduksi komoditas perdagangan Bali sebagian besar berasal dari luar Bali dan bahkan masih terbatasnya akses terhadap modal kerja pada produsen komoditi Bali. Hal ini menjadikan produk-produk yang dihasilkan para pengusaha Bali sedikit lebih mahal. Kendala lain dalam memperkuat nilai dan melestarikan produk kerajinan Bali adalah dalam mengusahakan hak paten, karena produk yang sama banyak beredar di pasar. Tetapi ditambahkannya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali pada tanggal 5 Oktober tahun 2010

diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN China Free Trade Zone tidak banyak berpengaruh karena dasar produk Bali memiliki karakteristik nilai seni yang berbeda dengan yang lain dan ini menjadi keunggulan.¹¹

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengatakan provinsi Bali memiliki luas wilayah yang kecil dan tidak dilengkapi dengan sumber daya alam. Tetapi yang unggul di Bali adalah kebudayaan dan pariwisata. Sementara itu, dengan adanya globalisasi secara tidak langsung terjadi penyesuaian antara budaya dengan sektor-sektor usaha di Bali. Sehubungan dengan itu pengembangan industri kecil dan menengah serta pertanian diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.¹²

Kepala Dinas memberi gambaran bahwa perdagangan ekspor Bali terutama produk kerajinan, Bali juga sangat mengandalkan bahan baku atau barang setengah jadi dari Jawa, Nusa tenggara Barat dan bahkan dari Kalimantan yang kemudian difinishing di Bali untuk kemudian diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut kendala kebijakan daerah lain terkait penyediaan bahan baku dan barang setengah jadi tersebut menjadi hambatan kelancaran pemenuhan kebutuhan ekspor.¹³

Kepala Dinas menyatakan bahwa kendala pengusaha Bali untuk melakukan pengiriman barangnya adalah Bali tidak memiliki pelabuhan ekspor sehingga produk ekspor Bali sedikit banyak harganya menjadi lebih tinggi. Kebijakan tersebut masih berada pada wewenang pusat untuk merealisasikannya. Kendala lain adalah masih banyaknya pengusaha yang masih lemah dalam melakukan pengelolaan perusahaannya sehingga mempersulit mereka untuk mengakses permodalan. Ditambahkannya bahwa seringkali terjadi anggapan pelanggaran HAM dalam memproduksi barang ekspor Bali. Padahal pada kenyataannya seperti contoh, banyak dalam memproduksi barang kerajinan anak-anak dibawah umur terlibat didalamnya. Namun demikian, setelah dijelaskan bahwa budaya di Bali kental dengan keseharian permainan yang anak-anak lakukan yaitu membuat kerajinan dan itu dilakukan tanpa paksaan dan bahkan mereka senang mengerjakannya. Dan yang masih menjadi kendala sampai saat ini adalah biaya perizinan yang masih cukup besar meskipun sudah berlaku pelayanan satu atap untuk pelayanan perizinan ini.¹⁴

11 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali pada tanggal 4 Oktober tahun 2010

12 Kepala Dinas. *Op.Cit.*

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

Kendala lain yang dihadapi pengusaha ekspor Bali adalah menyangkut berbagai peraturan internasional yang diterapkan sejumlah negara tujuan ekspor. Peraturan internasional tersebut menuntut adanya legalitas atas bahan baku kayu yang digunakan perajin. Produk kerajinan berbahan kayu yang tidak memiliki legalitas, dipastikan akan ditolak oleh negara bersangkutan. Beberapa negara tujuan ekspor bahkan membuat peraturan yang memberikan batasan yang sangat tegas tentang produk hasil hutan yang masuk ke negaranya. Sejumlah negara yang membuat kebijakan aturan impor produk dari kayu adalah negara-negara yang menjadi pasar utama ekspor Bali. Di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan sejumlah negara Eropa. Adapun ekspor produk yang terkena imbas atas berbagai peraturan itu di antaranya produk meubel dan rumah kayu *knock down*. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun perajin, untuk mencari solusi agar produk kerajinan kayu dari Bali bisa lebih diterima di pasar internasional. Di pihak lain, para perajin Bali juga tengah didera kesulitan bahan baku kayu, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan keterbatasan lahan di Bali serta tingginya kebutuhan bahan baku kayu pengusaha kerajinan Bali terpaksa harus mendatangkan bahan baku kayu dari luar Bali.¹⁵

Menurut Sekjen Asephi pencatatan hasil ekspor selalu rancu akan lebih baik menggunakan pemberitahuan ekspor barang (BEB) yang dikeluarkan bea cukai. Indonesia akan melaksanakan ekspor *single window*. Sekjen Asephi menyatakan meskipun perdagangan ekspor Bali sudah mempunyai konsumen yang loyal tetapi tempat promosi sangat diperlukan dan ini akan sangat efektif untuk memasarkan produk bukan hanya Bali tetapi seluruh Indonesia. Kenyataannya permintaan konsumen yang datang ke Bali sering kepada barang yang berasal dari Bali yang pada akhirnya harus bekerja sama dengan daerah lain. Berkaitan dengan perizinan ekspor meskipun sudah satu atap di pusat tetapi tetap menimbulkan biaya yang cukup besar. Belum lagi sarana *online service* pada kenyataannya para pengusaha juga harus datang sendiri ke pusat untuk memberikan klarifikasi atas barang yang akan di ekspor.¹⁶

Pelaku ekspor saat ini selain menghadapi kendala lamanya pengurusan perizinan juga biaya ekspor yang relatif tinggi. Pasalnya, untuk ekspor ke mancanegara, eksportir Bali masih harus menggunakan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Bali sebenarnya punya Pelabuhan Benoa yang sangat strategis. Namun, sampai sekarang tak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Untuk

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Sekretaris Jenderal Asephi pada tanggal 5 Oktober 2010

memakai angkutan udara jelas tak bisa efisien karena ongkosnya yang mahal. Itu pun terbatas untuk jenis barang kecil-kecil saja. Eksportir kini juga menghadapi kendala soal Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Sesuai ketentuan, sejak tahun 2003 setiap ekspor produk yang berbahan baku kayu seperti kerajinan, mebel dan produk kayu olahan lainnya hanya dapat dilaksanakan oleh eksportir yang telah memiliki ETPIK. Namun, kini sekitar 300 pemegang ETPIK resah. Pasalnya, data perusahaan yang dipergunakan pada saat pengajuan ETPIK seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) banyak yang sudah mati karena habis masa berlakunya. Namun, mengurus syarat-syarat itu memerlukan waktu sangat lama yang diakibatkan rantai birokrasi. Padahal, tanpa ETPIK jelas tak bisa melakukan ekspor. Kalau dilihat dari posisi ekspor, peningkatan permintaan produk kerajinan Bali di luar negeri cukup tinggi. Ada peningkatan volume ekspor sekitar 20 persen. Ini merupakan peluang bagus bagi perajin, dan pemerintah di sisi lain untuk mendulang devisa.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*

BABV

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERDAGANGAN EKSPOR DAN IMPOR



Pemerintah Provinsi Bali memiliki beberapa program kegiatan untuk meningkatkan perdagangan ekspor dan impor. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Bali mengatakan bahwa dukungan yang diberikan hanya fokus pada pengusaha kecil dan menengah terutama dalam pemberian subsidi permodalan. Pemerintah Bali memberikan sejumlah dana kepada Bank Pembangunan Daerah untuk menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan menengah. Pengalokasian dana pemerintah ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Bank agar dapat menyalurkan kredit ke pengusaha kecil dan menengah; hal ini seiring dengan program kredit tanpa agunan. Disamping itu, untuk permodalan ini Provinsi Bali mengaktifkan Lembaga Perkreditan Daerah untuk memperluas cakupan akses permodalan.¹⁸

Kepala Biro menjelaskan bahwa Pemerintah Bali selalu berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antara produsen dan konsumen. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung Bali merupakan etalase produk bukan hanya dari Bali tetapi seluruh Indonesia. Banyak daerah-daerah di luar Bali yang mengharapkan Provinsi Bali untuk dapat mendirikan *Bali Trade Center*. Namun demikian, untuk sementara ini pembangunan sarana promosi yang diharapkan belum direncanakan secara matang. Pertimbangannya adalah tanpa sarana itu pun Bali memiliki kelebihan dimana konsumen datang sendiri ke Bali sebagai turis.¹⁹

Sementara itu pemerintah Provinsi Bali juga berupaya untuk menjadikan pertanian bukan hanya sebagai produsen padi tetapi juga ini sebagai salah satu objek wisata. Dalam hal ini, pemerintah daerah memberikan insentif berupa

¹⁸ Kepala Biro. *Op.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

diskon atas tarif PBB bagi masyarakat yang memiliki lahan persawahan agar dapat menghasilkan *view* atau pemandangan yang indah untuk dikunjungi wisatawan. Disamping itu, pemerintah Bali memberikan subsidi kesehatan untuk para petani. Dalam hal barang impor, Pemerintah Bali berusaha untuk mengontrol produk impor yang beralkohol dengan penambahan retribusi. Pengenaan retribusi ini hanya sebagai alat untuk mengawasi jumlah barang beralkohol yang beredar di Bali.²⁰

Kepala Disperindag Provinsi Bali mengatakan bahwa Disperindag sedang melakukan koordinasi dengan bank Indonesia mengenai program perkreditan bagi pengusaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPD untuk menyalurkan kredit tanpa angunan sampai 50 Juta. Disamping itu, Pemerintah Bali kerja sama dengan universitas udayana untuk melakukan pembinaan bagi para pengrajin dan pengusaha.²¹

Untuk mendukung masyarakat Bali dalam memenuhi barang kebutuhan pokok dan bahan baku dan setengah jadi terkait dengan barang kerajinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan komunikasi dengan daerah lain untuk kelancaran ketersediaan barang konsumsi maupun perdagangan. Hal ini berhubungan dengan aturan perdagangan dalam negeri yang sedikit kurang adil bagi daerah yang kurang memiliki potensi yang dibutuhkan.²²

Dalam hal program promosi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali agak sedikit dikurangi karena anggaran daerah dialokasikan pada prioritas pengentasan keluarga miskin yang ternyata setelah dievaluasi, Provinsi Bali masih banyak keluarga miskinnya. Sementara itu, ada permintaan dari daerah-daerah lain yang berasal dari Kelompok Mitra Praja Uta ma sebanyak 10 provinsi disepakati menunjuk Bali untuk membuat tempat promosi bersama. Kendalanya adalah untuk membuat tempat promosi ini harus disediakan minimal 10 hektar, namun karena luas wilayah yang kecil dan yang pasti harganya sangat mahal karena wilayah Pariwisata. Namun demikian, rencana tersebut masih terus dilanjutkan.²³

Pemerintah Bali mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pengusaha dan pengrajin dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin agar dapat memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh konsumen. Selain itu, Pemerintah Bali mendorong program kemitraan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kepala Dinas. *Op.Cit.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

antara pengusaha besar dan kecil. Program ini dilakukan untuk memudahkan pengusaha kecil mengakses pasar dan meningkatkan kualitas produk ekspornya.

Dalam mendorong produk kerajinan yang ada di Bali Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengatakan bahwa sebenarnya untuk mengantisipasi berbagai peraturan internasional terkait impor kayu dan produk kayu ke negaranya, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/2009 yang mengatur tentang sistem verifikasi legalitas kayu. Saat ini tengah diupayakan mempersiapkan para perajin untuk menghadapi implementasi sistem verifikasi legalitas kayu

Untuk memajukan perdagangan ekspor dan impor provinsi Bali, Kadinda Bali mengusulkan agar tarif pajak yang diterapkan bagi umkm perlu mendapat dispensasi atau penurunan. Karena bagaimanapun pengusaha seringkali mengeluarkan modal sendiri dan menghadapi resiko kerugian yang tidak menjadi beban negara. Selain itu juga perlu menghilangkan pajak PPnBM terhadap produk-produk kerajinan perak, padahal untuk produk-produk emas pajak tersebut tidak diberlakukan. Kadin juga berharap Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat memilah-milah sektor usaha perdagangan yang berkembang di daerah maupun nasional.²⁴

Diberlakukannya ACFTA tidak banyak mempengaruhi perdagangan Bali karena ekspor komoditas Bali di dominasi negara Amerika dan Eropa. Yang justru mempengaruhi perdagangan ekspor Bali adalah krisis global yang menyebabkan menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor.²⁵

Kadin berharap untuk dapat lebih berperan dalam mengembangkan perindustrian dan perdagangan di Bali secara khusus. Terutama Kadin dilibatkan dalam membuat kajian dan seleksi untuk menelurkan suatu kebijakan perdagangan. Contohnya, di Bali banyak bermunculan pasar modern yang sampai ke daerah-daerah kecil. Hal ini perlu pengaturan daerah mengenai zoning pasar modern dan tradisional. Pasar modern harus melibatkan usaha kecil dan menengah dalam membuka usaha ini. Perlu adanya revitalisasi pasar tradisional.²⁶

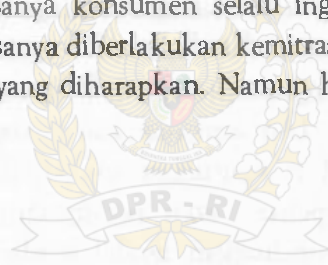
Terkait dengan distribusi, Kadinda sangat berharap infrastruktur jalan perlu dikembangkan untuk membuat alternatif jalur distribusi. Hal ini untuk mengatasi kenaikan harga yang diakibatkan terhambatnya distribusi ini. Selain

24 Hasil wawancara dengan Kadinda Bali pada tgl 6 Oktober .2010

25 *Ibid.*

26 *Ibid.*

itu, perlu dioptimalkannya dana *Corpotare Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan perindustrian dan perdagangan. Dalam hal ini Kadin perlu dilibatkan dalam melakukan seleksi untuk mengalokasikan dana ini bagi kepentingan usaha kecil dan menengah. Hal lain yang juga menjadi sorotan Kadinda adalah proses pembinaan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pengusaha besar harus diawasi, jangan sampai pembinaan menyebabkan pembinasaaan. Pengusaha kecil sudah dapat melakukan ekspor namun demikian biasanya konsumen selalu ingin memastikan kualitas barang. Oleh karena itu, biasanya diberlakukan kemitraan atau bapak asuh yang dapat menjamin kualitas yang diharapkan. Namun hal ini, berdampak pada harga yang lebih tinggi.²⁷



²⁷ Ibid.

BAB VI

PENUTUP

Pemerintah provinsi Bali sudah mengupayakan berbagai program peningkatan ekspor dan impor. Tetapi untuk meningkatkan kinerja ekspor Provinsi Bali maka perlu kerja keras dari Pemerintah Daerah dan dukungan Pemerintah Pusat guna menunjang dan meningkatkan kelancaran ekspor. Pemerintah Pusat harus membuat kebijakan untuk peningkatan ekspor berupa kemudahan prosedur ekspor, penurunan pajak ekspor, serta berbagai fasilitas kemudahan bagi para eksportir.

Kendala yang dihadapi dalam perdagangan ekspor impor Bali adalah keterbatasan bahan baku, tidak adanya pelabuhan barang untuk melakukan ekspor impor secara langsung, dan sejumlah pengusaha kecil dan menengah masih belum mempraktekkan pengelolaan perusahaan dengan baik. Untuk meminimalisir kendala-kendala seperti ini Pemerintah Daerah juga harus bersinergi dengan kelompok pengusaha agar upaya tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi para pengusaha.

Selain itu juga perlu adanya sinergi antara Pemerintah dengan Kadin untuk melakukan kajian dan seleksi untuk pengusaha yang akan mengajukan usaha. Hal ini untuk mencegah kelebihan supply usaha pada bidang yang sama sehingga akan merugikan pengusaha itu sendiri. Dengan melibatkan Kadin sebagai pengawas perdagangan baik daerah maupun nasional akan mempermudah pencapaian perdagangan yang efisien dan optimal.

Akhirnya, Pemerintah Daerah harus mampu mendorong pengusaha kerajinan untuk meningkatkan kualitas barang ekspor agar dapat memenuhi persyaratan konsumen internasional dan berusaha untuk mengurangi beban pengusaha yang berdampak pada harga produk yang tidak kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Z. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. Disertasi, tidak dipublikasikan tahun 200... Program Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

BPS Provinsi Bali, "Buletin Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia", 2009.

Chacholiades, M. *International Trade Theory and Policy*. New York: McGraw-Hill 1978.

Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones.. *World Trade and Payments. An introduction*. (Sixth Edition). New York: Harper Collins. 1993.

Kindleberger, C.P. and P.H. Lindert. *International Economics* (Six Edition). Homewood. Illinois.. Richard D. Irwin, Inc. 1978

Hadi, PU. " Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization". *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 2004

Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004

Wijayanta, Bambang dan Aristanti Widyaningsih. *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama. 2001

Surat Kabar/Majalah/Websites:

"Pasar Bebas ASEAN-Cina Ancam Kawasan Industri," 20 Desember 2009.
<http://www.tempointeraktif.com>, diakses 3 Februari 2010.

<http://www.kompas.com>, Minggu 3 Januari 2010.



BAGIAN5

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI DAN GLOBALISASI PERDAGANGAN DUNIA

*Juli Panglima Saragih**

* Penulis adalah Peneliti Madya Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BABI PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi pasar, tuntutan adanya liberalisasi pasar atau pasar bebas (*free market*) semakin meningkat. Salah satu indikasinya adalah terbukanya pintu impor terhadap berbagai produk dari luar negeri dengan menghapus berbagai hambatan, baik hambatan tarif maupun non-tarif (*tariff and non tariff barriers*). Dari kedua hambatan tersebut, kebijakan pemerintah suatu negara dengan membuat tarif impor terhadap produk dari luar sangat kontradiktif dengan kecenderungan liberalisasi atau pasar bebas.

Sebaliknya dengan menghapus proteksi berupa tarif bea impor barangan dan jasa, konsumen di setiap negara akan semakin diuntungkan dengan semakin banyaknya pilihan produk impor untuk memenuhi kebutuhannya pada harga yang semakin kompetitif dengan kualitas produk yang relatif lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan produk dalam negeri. Bukti dari pasar bebas dimaksud antara lain adalah dengan diberlakukannya (*Free Trade Area China-ASEAN*) pada 1 Januari 2010 dan beberapa perjanjian perdagangan bebas dunia baik secara bilateral maupun multilateral.

Tantangan yang dihadapi setiap negara dalam perdagangan global akan semakin nyata dengan liberalisasi pasar. Tantangan tersebut antara lain ancaman terhadap eksistensi industri dan perdagangan dalam negeri, khususnya produk-produk nasional dan produk daerah/lokal di suatu negara, termasuk Indonesia. Kondisi yang terjadi di dalam negeri Indonesia di mana para pedagang dan industriawan mengaku dan khawatir, produk-produk impor dari luar negeri, seperti China, India, dan negara lain telah membanjiri pasar Indonesia. Harganya yang relatif murah menjadi alasan produk-produk dari negara luar makin digemari¹.

Di kawasan ASEAN sendiri, misalnya, penghapusan tarif bea masuk sudah dilaksanakan sejak tahun 2000 yang dilakukan secara bertahap di beberapa

1 Lihat Kompas.com, Minggu, tanggal 3 Januari 2010, diakses pada tanggal 11 Maret 2011.

negara ASEAN, dan hingga penghapusan tarif nol persen pada tahun 2010 yang berlaku di seluruh negara ASEAN.

Dalam KTT ASEAN ke-9 tanggal 7-8 Oktober 2003 di Bali, enam negara anggota ASEAN Original Signatories of CEPT AFTA yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari *Inclusion List* (IL) tahun 2003; bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80% dari *Inclusion List* (IL) tahun 2007. Pada tahun 2010, seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100% untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar dan tahun 2010 untuk Kamboja.²

Efek negatif yang ekstrim yang sangat mungkin timbul akibat liberalisasi pasar global adalah terjadinya kebangkrutan industri nasional (de-industrialisasi) di dalam negeri. Apabila Indonesia tidak siap menghadapi liberalisasi dan globalisasi perdagangan dunia, maka pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk impor dari berbagai negara di dunia, termasuk dari China dan India. Saat ini saja dengan bea masuk impor barang sebesar 5% saja, industri nasional sudah mulai banyak yang gulung tikar, karena harga-harga produk ekspor, termasuk dari China (alat elektronik, tekstil, manufaktur dll) jauh lebih murah dibandingkan produk sejenis di dalam negeri. Belum lagi produk dari Negara Malaysia, Thailand, Vietnam, dan produk impor dari negara lain. Semakin bertambahnya produk impor dari luar yang masuk ke Indonesia tanpa diimbangi dengan peningkatan nilai ekspor, maka menghasilkan suatu defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia. Selain itu dengan meningkatnya impor, maka semakin terkurasnya devisa negara (*capital out-flow*).

Selain sisi negatif tersebut di atas, sisi positif dari liberalisasi dan globalisasi pasar dunia adalah antara lain: *pertama*, meningkatkan akses ke pasar global; *kedua*, meningkatkan aspek manajerial di berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha kecil dan menengah yang produknya berorientasi pasar ekspor; *ketiga*, adanya transfer teknologi; *keempat*, keterbukaan informasi pasar global yang dapat mendorong untuk meningkatkan daya saing produk; *kelima*, adanya tren pasar atau *buyers trend*.³

2 Lihar ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA), dalam <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>, diakses tanggal 10 Maret 2011.

3 Makalah 'Seminar Sehari tentang Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Globalisasi Perdagangan' oleh DR. Latief Adam, M.Sc., M.Stat, Peneliti PEP, LIPI, di Pusat pengkajian, Pengolahan data dan Informasi DPR RI, tanggal 10 Agustus 2010.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, strategi yang ditempuh tentunya harus dapat mensinergikan potensi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai kekuatan, daya dukung sektoral yang diharapkan mampu menjawab isu strategis yang dihadapi yaitu: semakin tergerusnya neraca perdagangan luar negeri, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar-daerah, dan kualitas SDM yang rendah yang berimplikasi terhadap daya saing produk ekspor.

Dalam konteks liberalisasi dan globalisasi perdagangan dunia, serta dengan pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001, semua daerah memiliki peran vital dalam membangun perekonomian daerah masing-masing. Kebijakan desentralisasi adalah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Menghadapi persaingan di era pasar bebas regional maupun global, kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, haruslah mampu meningkatkan kemampuan daya saing pelaku ekonomi nasional dan daerah. Termasuk di sini di antaranya adalah kebijakan di sektor perindustrian dan perdagangan, terutama daerah-daerah yang secara langsung melakukan perdagangan luar negeri ke pasar regional maupun pasar global, seperti Provinsi Kepulauan Riau.

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, tampaknya telah menjadi fenomena dunia yang tidak terelakkan oleh Indonesia. Sebagai anggota masyarakatdunia, setiap negara termasuk Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan dunia tidak terkecuali daerah-daerah di Indonesia. Fenomena tersebut ditandai oleh maraknya pembentukan blok-blok perdagangan bebas atau *free trade agreement* (FTA), baik secara bilateral maupun regional atau multilateral.

Disisi lain para pedagang konsumen mungkin tidak mempermasalahkan perkembangan ini. Bagi pedagang (*trader*), yang penting adalah margin laba yang besar. Sebagian dari mereka sebelumnya adalah pemilik pabrik tekstil dan garmen. Sebagian dari mereka beralih sebagai importir atau pedagang. Harga produk impor relatif jauh lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah, bahkan lebih bagus. Namun implikasi yang dihadapi adaiah semakin terkurasnya devisa negara ke luar negeri akibat meningkatnya nilai impor.

Ada beberapa kendala yang memicu kegamangan para industriawan dan pelaku perdagangan tersebut. Seperti, daya saing masih rendah karena tingkat produktivitas dan penguasaan pendidikan latihan yang rendah dalam menghadapi globalisasi pasar. Ketiadaan produk unggulan yang lebih spesifik yang memiliki potensi untuk menghadapi produk-produk impor dan untuk

ekspor ke negara lain. Sehingga menyebabkan akses pemasaran menjadi sulit akibat pasar di Indonesia mudah diintervensi oleh negara lain. Selain itu kekurangan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku yang relatif murah. Jika kendala ini tidak diperhatikan secara serius oleh pemerintah maka akan mengakibatkan kebangkrutan industri dan usaha perdagangan lokal.

Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Indonesia, negeri dengan penduduk lebih dari 230 juta jiwa ini, tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia menempati peringkat keempat setelah China (1,3 miliar), India (1,1 miliar), dan AS (340 juta). Sebagaimana Cina, India dan Amerika Serikat, maka Indonesia juga harus bisa memanfaatkan jumlah penduduk yang besar untuk menggapai globalisasi dan liberalisasi industri dan liberalisasi perdagangan.

Kepulauan Riau—sebelum dan setelah menjadi provinsi baru—merupakan salah satu daerah yang kegiatan ekspor-impor barang telah berkembang dan kecenderungannya mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Di sisi lain, perekonomian Kepulauan Riau juga didukung oleh perkembangan sektor industri, khususnya di daerah Pulau Batam. Batam sejak pemerintahan Presiden Suharto (Orde Baru) sampai saat ini masih sebagai daerah industri dan perdagangan. Batam, Bintan dan Karimun saat ini sudah menjadi suatu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas guna mendukung perkembangan sektor industri dan perdagangan. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia.

Dengan demikian Provinsi Kepulauan Riau harus sudah mempersiapkan berbagai hal termasuk berbagai kebijakan daerah yang mendukung sektor industri dan sektor perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri. Prioritas program pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau (faktor *endowment*) yang sangat potensial adalah sektor industri, di samping sektor pariwisata, sektor jasa keuangan, sektor perikanan dan kelautan. Dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan dunia, maka pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kepulauan Riau perlu mengantisipasinya dengan mempersiapkan berbagai hal termasuk kebijakan di sektor industri dan perdagangan agar perdagangan dunia memberikan keuntungan bagi daerah.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Jamaluddin, berpendapat, pemberlakuan Persetujuan Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China tidak bisa dihalang-halangi golongan manapun. Di era globalisasi tidak akan ada yang bisa menghalangi sebab tidak ada lagi batas negara bagi para pengusaha dalam mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan

pemerintah dalam ASEAN-China FTA hendaklah dinilai secara menyeluruh. Harus diakui bahwa dampak positifnya bagi konsumen cukup besar. Selain mengetengahkan dampak positif, ia meyakini pemberlakuan kebijakan perdagangan bebas mulai 2010 itu tidak secara serta merta disusul dengan banjir produk China, sebab akan ada regulasi mengenai hal tersebut. Pemerintah pusat dalam kaitan ASEAN-China FTA harus serius membangun sesuai dengan potensi daerah-daerah seperti Karimun, di daerah perbatasan Singapura dan Malaysia, dapat menjadi pintu gerbang wilayah Barat Indonesia.

Mata pengusaha dari luar negeri perlu lebih dibuka untuk mengenali dan menggali lebih dalam potensi Karimun. Di era ASEAN-China FTA, berbagai produk dari luar negeri sebelum membanjiri beranda barat Indonesia itu, menurut Jamaludin, tentu akan didahului dengan survei yang valid untuk kepentingan pengusaha bersangkutan. Terbuka kemungkinan, dalam survei menunjukkan pengusaha perlu mendirikan usaha baru di Karimun. Jamaluddin menyatakan yakin hal yang sama juga akan dialami wilayah Indonesia lainnya, karena setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda. Keberadaan usaha tadi otomatis akan membuka lapangan kerja baru. Tentang hilangnya pendapatan dari bea masuk barang, menurut dia, akan tertutupi dari berbagai pendapatan lain, misalnya dari penerbitan keterangan izin tinggal sementara dan keterangan izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing (TKA). Jumlah TKA otomatis akan meningkat seiring meningkatnya jumlah usaha yang didirikan pengusaha asing. Bila ada UMKM dan industri lokal tutup sebagai dampak pemberlakuan ASEAN-China FTA, adalah akibat seleksi alam karena tidak mampu menghasilkan produk yang bermutu. Perdagangan bebas ASEAN-China akan membuktikan keberhasilan atau kegagalan program pemberdayaan UMKM serta industri lokal yang telah menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit jumlahnya.⁴

Bab ini difokuskan untuk membahas sejauh mana kesiapan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi keterbukaan pasar dunia dengan liberalisasi perdagangan dunia, peranan dan permasalahan sektor industri dan perdagangan dalam perekonomian provinsi Kepulauan Riau, serta sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kesiapan sektor industri dan sektor perdagangan barang skala besar, menengah, serta skala kecil dalam menghadapi persaingan pasar atau perdagangan bebas dunia. Untuk dapat memahami persoalan lebih baik maka terlebih dahulu dibahas secara singkat konsep perdagangan internasional

4 Lihat 'Perdagangan Bebas ASEAN-China Tidak Bisa Dihalangi', dalam <http://appi-electric.co.id/news2.htm>, diakses tanggal 28 April 2011.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar-daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik (faktor *endowment*) yang dimiliki daerah yang pada umumnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Saat ini Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka.

Konsekuensi dari sistem ekonomi yang terbuka adalah dengan pasar bebas Asean, akan berpengaruh kepada keseluruhan kegiatan perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu berbagai kesiapan baik dari aspek kebijakan maupun kelembagaan. Kesiapan ekonomi dalam negeri dimaksud adalah: kondisi fundamental ekonomi seperti perkembangan inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, kapasitas APBN, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta perkembangan ekspor-impor non-migas nasional.

Disamping faktor ekonomi, juga perlu kesiapan dari aspek non-ekonomi antara lain: kondisi politik dan sosial, keamanan, dan hukum (berkaitan dengan kepastian hukum di bidang kegiatan bisnis dan pelaksanaan otonomi daerah) Faktor eksternal, yaitu: Prospek perekonomian dan perdagangan dunia, kondisi politik global dan pertumbuhan ekonomi global.

Menurut Chacholiades (1978)⁵ partisipasi dalam perdagangan global atau internasional bersifat bebas (*free*) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan (*choice*)

5 Chacholiades, M. *International Trade Theory and Policy*. Penerbit McGraw-Hill, Tahun 1978

dengan pertimbangan secara ekonomi dan politik, oleh sebab itu sering dikatakan perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua pihak (*mutually benefited*).

Dalam sistem ekonomi tertutup (*isolated economy system*), negara hanya dapat mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi dengan melakukan perdagangan (*open economic system*), suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya memproduksi karena terdapat perbedaan jenis dan harga barang yang relatif berbeda dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi (Chacoliades, 1978; Chaves et al, 1993)⁶.

Hal ini didasari argumen bahwa perdagangan dunia yang lebih bebas akan memberikan manfaat bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar dibandingkan tidak ada perdagangan⁷ (Kindleberger dan Lindert, 1978). Dijelaskan oleh⁸ Hadi (2003), selain meningkatkan distribusi kesejahteraan antar negara liberalisasi perdagangan juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan peningkatan efisiensi ekonomi.

Namun demikian, karena terdapat perbedaan penguasaan sumberdaya yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian pakar yang lain berpendapat liberalisasi pasar berpotensi menimbulkan dampak negatif karena mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itu maka timbul pandangan pentingnya upaya-upaya proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan pasar internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan.⁹

Pada kondisi semakin kuatnya tekanan untuk meliberalisasi pasar, efektivitas pemberlakuan kendala atau hambatan tersebut dalam perdagangan akan menentukan derajat keterbukaan pasar. Keterbukaan pasar semakin tinggi bila pemerintah suatu negara menurunkan tarif (bea masuk) produk yang diperdagangkan (*tariff reduction*) dan menghilangkan hambatan-hambatan

6 Chaves, R.E., J.A. Frankel dan R.W. Jones. *World Trade and Payments. An introduction*. Sixth Edition. Harper Collins. New York. . 1993

7 Kindleberger, C.P. and P.H. Lindert. *International Economics* Six Edition. Richard D. Irwin, Inc. Homewood. Illinois 60430. 1978.

8 Hadi, PU. *Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization*. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

9 Abidin, Z. "Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaan Industri Gula Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan. Disertasi, tidak dipublikasikan tahun 200. Program Pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

nontarif (*non tariff barriers*). Hal sebaliknya terjadi bila pemerintah cenderung menaikkan tarif dan meningkatkan hambatan nontarif. Dengan keputusan tersebut, implikasi terhadap perekonomian secara umum dan neraca perdagangan yang tergambarkan dari perkembangan ekspor-impor Indonesia secara keseluruhan dan provinsi yang bersangkutan dengan dengan berbagai negara yang melakukan interaksi perdagangan langsung.



BAB III

PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan dan Geografi Ekonomi

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah provinsi baru di Indonesia yang dibentuk tahun 2002. Sebelumnya provinsi ini merupakan bagian dari Provinsi Riau yakni Kabupaten Kepulauan Riau. Selain letak geografisnya yang sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur, juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di kawasan Asia Pasifik yakni Singapura, Malaysia dan Vietnam.

Dengan motto *Berpancang Amanah, Bersauh Marwah*, Provinsi Kepulauan Riau bertekad membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia. Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan *good governance* dan *clean government*, dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup: Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota provinsi; Kota Batam; Kabupaten Bintan; Kabupaten Karimun; Kabupaten Natuna; dan Kabupaten Lingga. Kabupaten Anambas merupakan daerah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten, 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya adalah sebesar 252.601 Km², di mana 95% merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah daratan.

Tabel 1: Kondisi Geografis Pulau Batam, Bintan, Karimun,
Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Wilayah	Luas Lautan (Km2)	Luas Daratan (Km2)	Jumlah Penduduk (Jwa)	Kepadatan Per Km2
Provinsi Kepri	242.825	10.595	1.273.011	120
Kota Batam	855	770	616.088	800
Kota Tanjungpinang	573	239	167.958	701
Kabupaten Bintan	57.905	1.946	116.876	60
Kabupaten Karimun	6.460	2.873	200.645	70
Kabupaten Natuna *	138,66 (13.866.600 ha)	3.235,2 (323.520 ha)	933.644	
Kabupaten Lingga	2.117,72		86.150	41

Keterangan: * Kab Natuna sebelum terbentuknya Kabupaten Anambas sebagai daerah pemekaran baru dari Kab.Natuna

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.



Gambar 1: Peta Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepri merupakan kawasan investasi tertentu yang memberikan kemudahan khusus di bidang-bidang Bea dan Cukai (*customs*); Perpajakan (*tax*); Petizinan (*licensing*) satu atap (*one stop service*); Keimigrasian (*immigration*); dan Ketenagakerjaan (*labour policy*). Ditetapkannya Batam, Bintan dan Karimun sebagai KEK antara lain adalah karena ketiga daerah tersebut terletak pada jalur pelayaran internasional dan dekat dengan pusat perdagangan dunia – negara Singapura; sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Batam, Bintan dan Karimun juga merupakan salah satu *cluster industry* terbesar di Kawasan Indonesia Barat (KIB). Di kawasan ini juga tersedia tenaga kerja yang cukup dan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDB) secara nasional.

BIDANG KEGIATAN EKONOMI

Bidang Usaha yang Dikembangkan

Bidang usaha yang direncanakan dikembangkan di Pulau Bintan adalah sebagai berikut: industri elektronika, industri *garment*, industri makanan dan minuman (*food industries*) dan industri manufaktur. Sedangkan bidang usaha yang direncanakan dikembangkan di Pulau Karimun adalah : *Shipyards/shipbuilding*; *Component Part*; Industri *processing* dan Industri manufaktur. Pulau Batam sendiri telah dikembangkan sejak tahun 1970-an masa pemerintahan Presiden RI Suharto. Pada awalnya Pulau Batam merupakan kawasan berikat (*bonded zone*). Kini sudah berkembang menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam serta Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kawasan Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kawasan dimaksud meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

Diantara pulau-pulau tersebut di atas terdapat Pulau Batam yang sebelumnya merupakan lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam yang dikelola oleh Otorita Batam. Selain itu, dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka perlu memperluas penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang meliputi pula Pulau Janda Berias dan gugusannya.¹⁰

Di samping Batam, Bintan dan Karimun juga sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Bintan ditetapkan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2007. Sedangkan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Karimun ditetapkan berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2007. Kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas masing-masing ditetapkan selama 70 tahun sejak peraturan pemerintah yang mengatur masing-masing kawasan diterbitkan dan disahkan tahun 2007.

Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2007 mencakup sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan, serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam. Di samping itu sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2007 adalah meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya. Di bawah ini dijelaskan secara ringkas hasil-hasil wawancara dengan dinas terkait dari Pemprov. Kepulauan Riau.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Bidang Investasi

Jumlah realisasi investasi periode 2002-2007 khusus di Pulau Batam adalah berjumlah 217 proyek dengan nilai investasi USD 526,273,915. Proyeksi pertumbuhan investasi periode 2008-2012 khususnya di Pulau Batam adalah sebesar 6-9%. Sektor ekonomi yang dikembangkan di Pulau Batam adalah: sektor industri, perdagangan, keuangan & jasa persewaan, shipping & komunikasi, bangunan atau konstruksi. Secara kumulatif total investasi di Pulau Batam sampai Juni 2009 berjumlah 13,73 Milyar Dolar AS, dimana investasi pemerintah sebesar 20,78%; PMA sebesar 36,40%, dan investasi dari domestik sebesar 42,82%.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa pelaksanaan koordinasi kebijakan penanaman modal di daerah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat. Dalam pelaksanaannya BPID Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi antara lain mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam hal ini investasi di Pulau Batam memprioritaskan sektor Industri, perdagangan, keuangan & jasa persewaan, shipping & komunikasi, bangunan dan konstruksi. Sesuai target investasi 2008-2012 khusus di Pulau Batam sebesar 6-9%. Sedangkan dana Anggaran Negara (APBN) yang telah dikucurkan dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur di Kawasan Bareleng adalah sebesar Rp 5.302.879.091.585 atau jika dihitung dengan nilai kurs pada saat itu setara dengan USD 2.61 Milyar.¹²

Berbagai infrastruktur di Bareleng yang telah dibangun Otorita Batam adalah Gedung-gedung instansi pemerintah, Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Rumah Sakit, Jembatan-jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang, Galang dan Galang Baru, Jalan Arteri dan Kolektor, Saluran Air, Waduk, Sarana Pendidikan, Balai Agribisnis, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan berbagai infrastruktur lainnya yang mendukung pembangunan Batam. Infrastruktur yang ada di Bareleng dan dibangun oleh Otorita Batam tersebut, sebagian tetap dikelola oleh Otorita Batam (OB) dan sebagian lagi diserahkan/dihibahkan sepenuhnya kepada instansi lain.¹³

11 Jawaban tertulis dan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Promosi, Badan Promosi dan Investasi Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 1 Mei 2010 dan Badan Pengusahaan Batam.

12 Ibid.

13 Ibid.

Sedangkan Industri yang diminati dan dikembangkan di Pulau Batam adalah industri elektronik, industri *shipyard*, jasa perdagangan dan jasa industry lainnya. Permasalahan umum yang masih menghambat investor adalah belum adanya peraturan pelaksanaan dari UU No. 44 Tahun 2007 dan PP No. 46 Tahun 2007 dalam bidang kepabeanaan dan perpajakan. Kebijakan fiskal yang ada saat ini, belum dapat meningkatkan daya tarik bagi investor di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk penanaman modal di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.¹⁴

Sedangkan kebijakan non fiskal yang diberikan oleh Otorita Batam selama ini, misalnya: di bidang keimigrasian dan tenaga kerja saat ini namun telah ditarik kewenangannya oleh Pemerintah Pusat. Dirasakan sangat memudahkan bagi para investor. Sebelum dibentuknya pemerintah provinsi Kepri, tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh OB. Pembagian kewenangan dan tugas antara Pemkot Batam dan pihak Otorita Batam bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pembina, dimana salah satu anggota Dewan Pembina adalah Gubernur Provinsi Riau. Sejak terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau pada 2004, maka salah satu Dewan Pembina adalah Gubernur Provinsi Kepri.

Sesuai dengan UU Nomor 53 Tahun 1999, diamanatkan bahwa hubungan kerja antara OB dengan PEMKO diatur dengan PP paling lambat satu tahun. Namun demikian PP tersebut belum terbit. Selanjutnya untuk kelancaran jalannya pemerintahan di Kota Batam, maka Otorita Batam, PEMKO, beserta DPRD Kota Batam membuat hubungan kerja yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.

Adapun tugas pokok dan fungsi OB dan Pemkot Batam telah ditetapkan secara jelas. Sedangkan permasalahan perpajakan adalah dalam hal masih berlakunya PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di kawasan berikat (*bonded zone*) daerah Industri Pulau Batam. Masalah kepabeanaan dalam hal keluar masuknya barang dalam pbpb. Masalah ketenagakerjaan misalnya, adalah dalam hal perpanjangan masa tenaga kerja asing (TKA) dan peraturan tenaga kerja. Dalam bidang hukum dan ham adalah masalah pengesahan badan-badan hukum perseroan. Adapun perubahan Badan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan diatur peralihannya sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2007 mengenai asset, pegawai dan hak pengelolaan lahan sehingga tidak

¹⁴ Ibid.

ada masalah dan berpengaruh terhadap kinerja terhadap pelayanan investasi asing di Pulau Batam.

Otorita Batam sesuai Keppres Nomor 41 Tahun 1973 adalah berfungsi mengembangkan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata dan *transshipment*. Sampai saat ini kegiatan tersebut telah berkembang dengan baik dengan ratio sebesar 1 : 4 dengan indikator ekonomi. Pada dasarnya sejak ditetapkan UU Nomor 44 Tahun 2007 dan PP Nomor 46 Tahun 2007, pelaksanaannya di Batam masih menggunakan peraturan sebelumnya karena peraturan pelaksanaan dari undang-undang belum ditetapkan. Dengan diundangkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 telah memberikan dampak positif antara lain: adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap penanaman modal, informasi yang terbuka dan transparan mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanannya, kemudahan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat langsung yang dirasakan oleh OB adalah meningkatnya kepercayaan dari investor kepada BIDA sebagai instansi yang mengelola, membina dan mengawasi investasi di Pulau Batam. OB dalam rangka menyiapkan lahan bersama-sama PEMKOT Batam menyusun RTRW sebagai acuan dalam pengembangan Kota Batam. Sedangkan untuk infrastruktur, OB mengembangkan bandara, pelabuhan laut, jalan dan jembatan, air bersih dan fasilitas penunjang lainnya yang berstandar internasional. OB saat ini menyiapkan Kawasan Industri di Pulau Batam yang sekarang ini berjumlah 22 Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan.

Bidang Infrastruktur¹⁵

Batam telah lama siap dalam hal ketersediaan infrastruktur dan akan terus mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur yang dimiliki tersedia bandara internasional, pelabuhan laut internasional baik untuk barang maupun penumpang, jalan raya yang menghubungkan semua pusat kegiatan, sarana listrik, telekomunikasi, air bersih dan gas. Kondisi infrastruktur tersebut beroperasi dengan baik. Di Pulau Batam pembangunan infrastruktur didanai dari pemerintahan (pusat dan daerah) dan pihak swasta. Khusus untuk Batam, infrastruktur utama dibuat dan dibangun oleh Otorita Batam.

Adapun kendala utama yang dihadapi oleh Kepulauan Riau khususnya Batam adalah keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur. Permintaan investor terhadap pengembangan infrastuktur terus meningkat. Di

15 Hasil wawancara dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 3 Mei 2011.

Batam, yang menjadi prioritas utama adalah perluasan pelabuhan laut, fasilitas bandara dan pembangunan jalan.

Saat ini Batam memiliki infrastruktur yang memadai dan berstandar internasional, seperti jalan dan pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Batam juga akan mengembangkan serta meningkatkan semua infrastruktur yang sudah dimiliki dengan menunjang tingkat aksesibilitas yang tinggi. Sama halnya dengan apa yang dijelaskan di atas bahkan lebih ditingkatkan lagi. Target perkembangan infrastruktur di Kepulauan Riau khususnya di Pulau Bintan dan Pulau Karimun yakni sebesar 6% - 9% per tahun.

Bidang Industri dan Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ¹⁶

Dengan telah terbitnya UUNo. 44 Tahun 2007 dan PP No. 46 Tahun 2007, maka sambil menunggu peraturan pelaksanaan seperti di bidang. kepabeaian, perpajakan, maka pelaksanaan kebijakan ini masih mengacu pada aturan yang sudah ada sebelumnya. Urusan perdagangan yang semula dilaksanakan secara terpadu di Otorita Batam, saat ini dengan adanya Pemerintah Kota Batam, maka sebagian besar pengurusan perijinan perdagangan telah dialihkan. Pengalihan pengelolaan Pulau Batam dari Otorita Batam ke Badan Pengusaan Kawasan akan sangat mendorong penguatan kebijakan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB).

Status Pulau Batam awalnya adalah merupakan *Bonded Zone*, namun saat ini menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan batas wilayah dan status yang jelas serta adanya ketentuan dan peraturan pelaksanaan yang jelas. Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) akan menjaga kontinuitas investasi, membangun infrastruktur, melakukan pengelolaan asset, pengembangan usaha dan pembangunan, mengeluarkan ijin, Kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan saat ini membuat prosedur yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam arus keluar masuk barang dan otang.

Target volume perdagangan dalam dan luar negeri di Batam diharapkan akan meningkat menjadi 29,78% tahun 2010. Negara tujuan ekspor utama dari Batam adalah Singapura, China, AS, Jepang dan Malaysia. Selebihnya adalah negara lain Sampai Maret 2010, jumlah proyek investasi asing (PMA) secara kumulatif (1971-2010) berjumlah 1.153 proyek investasi.¹⁷

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nelly Wirda, Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 2 Mei 2011.

¹⁷ Jawaban Badan Pengusahaan Batam atas pertanyaan tertulis penelitian.

Dengan adanya tren kenaikan harga minyak, maka terjadi peningkatan pada bidang industri shipping, perminyakan dll. Kebijakan Perdagangan Bebas akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam, dalam bidang investasi, industri dan pariwisata mengingat dengan adanya pembebasan bea masuk dan pajak bagi barang modal dan bahan baku penolong. Di bidang pariwisata adanya fasilitas keimigrasian untuk orang asing. Kawasan Batam sejak dikelola oleh Otorita Batam sampai dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2007, walaupun telah cukup berhasil dalam menarik investasi, namun belum merupakan Kawasan Perdagangan Bebas yang ideal. Hal ini dikarenakan Batam masih merupakan *Bonded Zone* dengan landasan hukum seperti Keppres. Dengan melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan, maka pelayanan/insentif yang diberikan oleh OB dan PEMKOT Batam dalam menarik investor adalah dengan membentuk Unit Pelayanan Investasi Terpadu (UPIT) atau *Batam Integrated Investment Service Unit*.

Pada dasarnya kebijakan perdagangan bebas pada masa Otorita Batam adalah merupakan landasan pembentukan Batam sebagai PBPB yang merupakan salah satu dari bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adanya KEK akan menjadikan Batam, Bintan dan Karimun semakin kompetitif untuk kegiatan investasi. Letak geografis Batam yang strategis dan lalu lintas perdagangan yang melintas Pulau Batam menjadikan salah satu faktor yang menjadikan Batam sebagai Kawasan KEK. Adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk pembentukan KEK di wilayahnya merupakan salah satu Kriteria bagi pengembangan KEK. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat akan jelas mempengaruhi kinerja Batam sebagai PBPB.

Dapat disimpulkan bahwa Pulau Batam merupakan titik pertemuan antara Singapura dan Indonesia. Hubungan yang ada antara Batam dan Singapura pada saat ini adalah saling melengkapi. Dengan adanya UU NO. 44 Tahun 2007, maka diharapkan akan terjadi peningkatan dalam hal, seperti jumlah investasi, jumlah ekspor (non-migas), jumlah kesempatan kerja, jumlah penerimaan pajak, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemda provinsi dan kabupaten/kota, jumlah DPKK, jumlah turis asing (sektor pariwisata). Sedangkan multiplier efek lain adalah mendorong peningkatan di berbagai sektor perekonomian di Kawasan Kepulauan Riau.

Adapun manfaat langsung dari Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan dan Karimun antara lain adalah: peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kepulauan Riau, khususnya ke Batam, Bintan dan Karimun, penyerapan tenaga

kerja, peningkatan penerimaan devisa dari ekspor, peningkatan pemanfaatan bahan dan produk lokal, mendorong terjadinya alih teknologi (peningkatan SDM), peningkatan UMKM (Usaha Kecil & Menengah), dan peningkatan PDRB/Pendapatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.¹⁸



¹⁸ Hasil wawancara dengan Drs. JON ARIZAL M.Hum., Kepala Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjungpinang.

BAB IV PENUTUP

Sebelum pembentukan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas di Indonesia, perkembangan sektor industri dan sektor perdagangan relatif lamban di Kepulauan Riau, kecuali di Pulau Batam. Hal yang sangat mendukung kegiatan industri dan perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri di Kepulauan Riau—sejak pembentukan Provinsi Kepulauan Riau adalah ditetapkan sebagai kawasan Pulau Batam sebagai daerah industri dan daerah kawasan berikat (*bonded zone*) sejak awal tahun 1970-an. Dari sini Batam terus berkembang sampai saat ini. Di samping itu, sebagian besar wilayah di Kepulauan Riau juga ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tetapi kebijakan ini muncul belakangan setelah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Dengan ditetapkan sebagai bagian Pulau Bintan dan Pulau Karimun sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, maka merupakan peluang besar bagi Bintan dan Karimun untuk berkembang mengikuti Batam yang sudah lebih dulu maju. Oleh karena itu, lahirnya era perdagangan bebas dunia seperti CAFTA atau perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Indonesia dengan negara lain, di satu sisi menjadi peluang untuk menarik investasi asing ke kedua pulau tersebut. Hampir semua sektor dapat dikembangkan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun, khususnya sektor industri dan sektor pariwisata. Secara geografis, Pulau Bintan dan Pulau Karimun relatif sama dan tidak jauh dari letak geografis Singapura, Malaysia dan Thailand. Keuntungan letak geografis inilah yang harus dimanfaatkan oleh Pemda Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun untuk menarik investasi asing. Tentu kedua kabupaten perlu mempersiapkan berbagai hal termasuk dalam aspek kebijakan, sarana dan prasarana khususnya pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut.

Pemerintah Provinsi Kepri perlu melakukan terobosan dan merubah paradigma dalam menarik investasi asing dengan senantiasa menciptakan kemudahan-kemudahan dan membangun berbagai fasilitas yang diperlukan oleh investor, seperti penyediaan energi listrik yang cukup, membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, sarana air minum (air bersih) dan sebagainya. Persiapan dan kesiapan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota akan mempengaruhi seberapa besar dan lama tidaknya investasi asing masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. Dalam konteks liberalisasi dan perdagangan bebas dunia, Kepulauan Riau mau tak mau juga harus menerima fenomena yang berkembang dalam perdagangan dunia saat ini. Dengan semakin tumbuhnya industri di kawasan Batam, Bntan dan Karimun, maka sektor perdagangan dalam dan luar negeri di Kepulauan Riau juga akan berkembang. Merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemda kabupaten/kota di Kepulauan Riau, khususnya Batam, Bintan dan Karimun yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

- Abidin, Z., 2000. *Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Keragaman Industri Gula Indonesia: Suatu Analisis Kebijakan*. (Disertasi, tidak dipublikasikan). Bogor: Program Pasca-Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Chaves, R.E., J.A. Frankel Dan R.W. Jones. 1993. *World Trade and Payments: An Introduction*. Sixth Edition. New York: Harper Collins.
- Hadi, Pu., 2003. "Marketing Policy To Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization" *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 1 (2). Juni 2003. Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor..
- Kindleberger, C.P. And P.H. Lindert., 1978. *International Economics*. (Six Edition). Homewood. Illinois: Richard D. Irwin. Inc.
- Latief Adam, 2010 "Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Globalisasi Perdagangan", (makalah seminar disampaikan di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, DPR-RI, tanggal 10 Agustus 2010)

Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2007. tentang. Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam.

Harian, Majalah, Internet/Website :

Asean Free Trade Area (Afta), Dalam [Http://www.Tarif.Depkeu.Go.Id/Others/ ?Hi=Afta](http://www.Tarif.Depkeu.Go.Id/Others/?Hi=Afta).

Kompas.Com, Minggu, Tanggal 3 Januari 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Mandala Harefa, adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi DPR RI yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisa kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang dan draf Pidato bagi Ketua DPR RI. Sebagai Peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di Jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang telah diterbitkan Oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi DPR. Penulis juga aktif menulis opini di berbagai harian media masa ibukota dan daerah.

Asep Ahmad Saefuloh, Penulis Lahir di Tasikmalaya 1 September 1971. Menyelesaikan Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS), tahun 1996. Pada tahun 2003, penulis menyelesaikan Magister Kajian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Universitas Indonesia. Sekarang ini penulis adalah Kandidat Doktor dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Berbagai pendidikan lainnya yang telah dijalani adalah: Analisis APBN Lanjutan, SMERU 2005; Parliamentary Governance Responsibility, Asia Pacific School of Economic Government, Australian National University, 2004; Diklat Ekonomi Makro, Ekonomi Publik dan Ekonomi Moneter, LPEM-UI, 2004; Analisis Data Kuantitatif: Aplikasi Software Eviews, Laboratorium Studi Pembangunan FE-UI, 2002; Analisis General Equilibrium Model Package (GEMPAC), IRIS-Maryland, 2001; Diklat Analisis Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, LPEM-UI, 2000; dan Diklat Metodologi Penelitian, LIPI, 1998. Mulai tahun 1997 sampai sekarang, penulis bekerja sebagai peneliti bidang kebijakan publik pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Data dan Informasi

(P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI. Berbagai topik penelitian tentang kebijakan publik telah dilakukan oleh penulis. Penulis juga aktif menghasilkan karya-karya ilmiah maupun populer.

Suhartono, adalah peneliti untuk bidang Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Sekretariat Jenderal DPRRI. Pada tahun 1998 menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Jurusan Hubungan Internasional. Menyelesaikan studi S2 (2001) pada Graduate Program of Public Policy, Australian National University. Salah satu Penulis buku *Respons IPU terhadap Masalah-masalah Global Pasca Perang Dingin*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRRI, 2000; *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrachman Wahid (1999-2001)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRRI, 2001; *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRRI, 2002, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRRI, 2003; *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia, Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Utama Putra, 2004; *Konflik dan Perkembangan Kawasan Pasca Perang Dingin*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRRI, 2004, *TKI dan Hubungan Indonesia Malaysia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPRRI, 2005. *Prospek dan Tantangan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, 2007. *Persiapan Menuju Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Barat*, Jakarta Sekretariat Jenderal DPRRI 2008. *Peran Parlemen Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Melalui Undang-Undang Bagi Kepentingan Publik*, Jakarta Sekretariat Jenderal DPRRI 2009. *Kajian Kebijakan Publik Berbagai Sektor dalam menghadapi Globalisasi berdasarkan Program Legislasi Nasional Sekretariat Jenderal DPRRI 2010*.

Achmad Sani Al husain, lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan Master of Art in Ecoonomic Policy di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA, 2002. Penulis merupakan Peneliti Muda golongan III/C dengan bidang kepakaran kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran.

Juli Panglima Saragih, lahir di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Telah menikah dan memiliki satu anak. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (PPPD1), Sekretariat Jenderal DPR RI. Pendidikan formal yang sudah ditempuh adalah Sarjana (S1) dari FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung Tahun 1988. Pascasarjana (S2) Magister Manajemen (MM) dari Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Penulis juga aktif menulis di surat kabar nasional dan daerah, dan beberapa majalah dalam negeri. Menulis buku tentang: 'Desentralisasi fiskal ...' yang diterbitkan oleh Penerbit Ghalia Indonesia (GI), Jakarta, April 2003. Aktif melakukan penelitian di dalam negeri, dan mengikuti berbagai seminar, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan peneliti dan keparlememen. Anggota Tim Asistensi Pansus UU, seperti: Pansus UU tentang Anti Monopoli, UU tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi komparasi/perbandingan dan mengikuti *training* tentang keparlemenan, demokrasi, dan keuangan negara/publik, seperti ke Amerika Serikat (2000 dan 2008), Australia (2006), India (2004), Philippina, Thailand dan Vietnam (1999). Saat ini (2010) ikut serta dalam tim pembuatan (perancangan) undang-undang: Tim RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.